



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025-2045

RPJPD



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
Jalan R.M Thaher Nomor 504
MUARA BUNGO



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang 2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wlayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Menteri 4

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025-2045.

BAB I 5

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bungo
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jambi adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Bungo untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bungo untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Bungo adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bungo.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jambi dan Nasional.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi dan RPJPN, yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun :
 - a. RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati;
 - b. RTRW; dan
 - c. Dokumen Perencanaan Lainnya.

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) RPJPD dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan dengan masa jabatan Bupati.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

Rincian, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
- BAB VI : PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2) Tata cara 7

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 23 Desember 2024



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH



MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Propinsi Jambi. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan RPJM Daerah 5 (lima) tahunan dan RKPD (tahunan).

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang terdiri dari :

1. RPJMD tahap ke -1 Tahun 2025-2029
2. RPJMD tahap ke -2 Tahun 2030-2034
3. RPJMD tahap ke -3 Tahun 2035-2039
4. RPJMD tahap ke -4 Tahun 2040-2045

Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2030, 2035, 2040 dan 2045. Namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2030, 2035, 2040 dan 2045 melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD menjadi utuh dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 adalah untuk :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Bungo;

2. Mendukung koordinasi 9

2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Propinsi dan Kabupaten;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Oleh karenanya RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik di Kabupaten Bungo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai bidang dan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR:.....



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3 Hubungan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-22
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-25
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-25
2.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya	II-33
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-37
2.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	II-38
2.3.2 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	II-39
2.3.3 Standar Pelayanan Minimal	II-39
2.3.4 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	II-44
2.3.5 <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP)	II-45
2.3.6 Indeks Kepuasan Masyarakat	II-46
2.4 Aspek Daya Saing	II-47
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-47
2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-56
2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-65
2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-80
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026	II-89



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

2.5.1	Sasaran RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026	II-89
2.5.2	Capaian Kinerja RPJPD Akhir Periode	II-91
2.5.3	Rekomendasi Tindaklanjut	II-93
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-95
2.6.1	Analisis Proyeksi Kependudukan	II-95
2.6.2	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II-99
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-103
2.7.1	Rencana Struktur Ruang	II-103
2.7.2	Rencana Pola Ruang	II-133
2.7.3	Rencana Kawasan Strategis	II-135
2.7.4	Daya Dukung Lingkungan	II-138
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ...	III-1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III-6
3.2	Isu-Isu Strategis Daerah	III-8
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1	Visi Daerah	IV-2
4.2	Sasaran Visi Daerah	IV-5
4.2	Misi Daerah	IV-10
4.3	Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi	IV-13
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
5.1	Arah Kebijakan Daerah	V-1
5.2	Sasaran Pokok Daerah	V-7
5.2.1	Arah Pembangunan Daerah	V-8
5.2.2	Arah Kebijakan Transformasi	V-11
5.2.3	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	V-36
BAB VI	PENUTUP	VI-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Nama Kecamatan dan Kelurahan/Dusun di Kabupaten Bungo II-2
Tabel 2.2	Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bungo II-5
Tabel 2.3	Rata-rata Ketinggian Kabupaten Bungo dari Permukaan Air Laut dirinci menurut Kecamatan II-7
Tabel 2.4	Panjang Sungai Utama di Kabupaten Bungo II-9
Tabel 2.5	Nama-Nama Sungai yang Melintasi Kecamatan di Kabupaten Bungo II-10
Tabel 2.6	Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi .. II-11
Tabel 2.7	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bungo II-12
Tabel 2.8	Kondisi Curah Hujan Tiap Bulannya di Kabupaten Bungo Tahun 2023 II-13
Tabel 2.9	Rencana Pola Ruang di Kabupaten Bungo II-14
Tabel 2.10	Daerah Rawan Bencana Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bungo II-18
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dalam Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023 II-22
Tabel 2.12	Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023 II-23
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bungo Tahun 2023 II-23
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Bungo Tahun 2023 II-25
Tabel 2.15	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023 II-29
Tabel 2.16	Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Bungo dari Tahun 2014-2023 II-32
Tabel 2.17	Daftar Nama Warisan Budaya di Kabupaten Bungo ... II-36
Tabel 2.18	Jumlah Prestasi dan Organisasi Pemuda di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023 II-37
Tabel 2.19	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023 II-38
Tabel 2.20	Indeks SPBE Kabupaten Bungo dari Kementerian PAN RB II-39



Tabel 2.21	Capaian SPM Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023 (persen)	II-40
Tabel 2.22	Nilai AKIP Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023	II-45
Tabel 2.23	Nilai MCP Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023 ..	II-46
Tabel 2.24	Hasil Survei IKM Tahun 2018-2023	II-47
Tabel 2.25	PDRB ADHK Kabupaten Bungo Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Periode Tahun 2018-2023	II-49
Tabel 2.26	PDRB ADHB Kabupaten Bungo Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Periode Tahun 2018-2023	II-50
Tabel 2.27	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023	II-53
Tabel 2.28	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023	II-54
Tabel 2.29	Persentase Pengeluaran per Kapita Non-Pangan Sebulan Menurut Komoditi di Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023	II-56
Tabel 2.30	Jumlah Sekolah di Kabupaten Bungo dari Tahun 2020-2024	II-59
Tabel 2.31	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bungo s.d Tahun 2023	II-62
Tabel 2.32	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023	II-63
Tabel 2.33	Rasio Ketergantungan DR, CDR dan ADR Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023	II-65
Tabel 2.34	Persentase Rencana dan Realisasi Tata Ruang dari Tahun 2018-2023	II-68
Tabel 2.35	Banyaknya Bus dan Penumpang yang Berangkat melalui Terminal Tipe A Muara Bungo dari Tahun 2018-2023	II-69
Tabel 2.36	Jumlah Lalu Lintas Penumpang dan Barang Melalui Bandara Muara Bungo Tahun 2018-2023	II-70
Tabel 2.37	Daftar Bank di Kabupaten Bungo Tahun 2023	II-71
Tabel 2.38	Daftar Asuransi di Kabupaten Bungo Tahun 2023	II-72
Tabel 2.39	Daftar Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan Tahun 2019-2023	II-73
Tabel 2.40	Nama Penginapan/Hotel, Alamat dan Kelas di Kabupaten Bungo Tahun 2023	II-74
Tabel 2.41	Unit Penyalur Distribusi air PDAM Pancuran Telago di Kabupaten Bungo	II-76
Tabel 2.42	Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni s.d. Tahun 2023	II-78
Tabel 2.43	Luas Permukiman dan Luas Kawasan Kumuh s.d Tahun 2023	II-79



Tabel 2.44	Data Persampahan Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023	II-80
Tabel 2.45	Penanganan Kriminalitas di Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023	II-81
Tabel 2.46	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk di Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023	II-82
Tabel 2.47	Proses Perizinan dan Non-Perizinan di Kabupaten Bungo	II-83
Tabel 2.48	Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Bungo	II-86
Tabel 2.49	Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Bungo.....	II-87
Tabel 2.50	Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha Di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023.....	II-88
Tabel 2.51	Indikator, Target dan Capaian Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun ke-20 (2026)	II-89
Tabel 2.52	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-91
Tabel 2.53	Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Beserta Indikator dan Target Capaian Akhir Tahun ke-20 (2026)	II-92
Tabel 2.54	Proyeksi Penduduk Kabupaten Bungo	II-96
Tabel 2.55	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bungo.....	II-96
Tabel 2.56	Proyeksi Penduduk Kabupaten Bungo Menurut Kelompok Umur dari Tahun 2023-2045	II-96
Tabel 2.57	Proyeksi Penduduk Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan Per 5 Tahunan dari Tahun 2025-2045	II-98
Tabel 2.58	Analisis Rasio Ketergantungan DR, CDR dan ADR Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045	II-99
Tabel 2.59	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan Per 5 Tahunan dari Tahun 2025-2045	II-100
Tabel 2.60	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan Per 5 Tahunan dari Tahun 2025-2045	II-101
Tabel 2.61	Proyeksi Kebutuhan Kelistrikan di Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan Per 5 Tahunan dari Tahun 2025-2045	II-102
Tabel 2.62	Proyeksi Produksi Sampah dan Kebutuhan Persampahan di Kabupaten Bungo Per 5 Tahunan dari Tahun 2025-2045	II-103
Tabel 2.63	Sistem Perkotaan di Kabupaten Bungo	II-108
Tabel 2.64	Kawasan Lindung di Pola Ruang Kabupaten Bungo ...	II-134
Tabel 2.65	Kawasan Budidaya di Pola Ruang Kabupaten Bungo .	II-134
Tabel 2.66	Perubahan penutupan lahan Kabupaten Bungo dari Tahun 2006-2018	II-139



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

Tabel 2.67	Luas DAS pada Wilayah Kabupaten Bungo	II-140
Tabel 2.68	Daya Tampung DAS pada Wilayah Kabupaten Bungo	II-140
Tabel 2.69	Luas (Ha) areal di Kabupaten Bungo berdasarkan Daya Dukung Sumber Daya Alam	II-141
Tabel 2.70	Luas (Ha) Areal Di Kabupaten Bungo Berdasarkan Daya Dukung Jasa Lingkungan	II-142
Tabel 4.1	Keselarasn Visi Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo	IV-5
Tabel 4.2	Sasaran, Indikator dan Target Visi Daerah Kabupaten Bungo	IV-7
Tabel 4.3	Keselarasn Sasaran Visi Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Bungo	IV-8
Tabel 4.4	Keselarasn Agenda Misi Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Bungo	IV-12
Tabel 4.5	Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dan Misi	IV-14
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Daerah Per Periode	V-3
Tabel 5.2	Penyelarasn Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bungo, RPJPD Provinsi Jambi dan RPJPN	V-9
Tabel 5.3	Keterkaitan Misi, Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045	V-10
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045	V-12
Tabel 5.5	Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045	V-37
Tabel 5.6	Penyelarasn Indikator Utama Pembangunan (IUP) Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Bungo	V-43



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional Dan Daerah I-7
Gambar 1.2	Keterkaitan RPJPD dan RTRW I-8
Gambar 1.3	Keterkaitan RPJPD dengan KLHS, RPPLH, dan Hasil Evaluasi RPJPD I-8
Gambar 1.4	Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD I-9
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bungo II-2
Gambar 2.2	Peta Kabupaten Bungo Dalam Provinsi Jambi II-6
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Bungo II-9
Gambar 2.4	Peta DAS Kabupaten Bungo II-10
Gambar 2.5	Peta DAS Sungai/Sub Sungai DAS Batanghari II-12
Gambar 2.6	Peta Pola Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042 II-14
Gambar 2.7	Nilai IKLH Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023 II-15
Gambar 2.8	Peta Rawan Banjir Kabupaten Bungo II-20
Gambar 2.9	Peta Rawan Longsor Kabupaten Bungo II-20
Gambar 2.10	Peta Rawan Kebakaran Kabupaten Bungo II-21
Gambar 2.11	Peta Rawan Bencana Gempa Kabupaten Bungo II-21
Gambar 2.12	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bungo Tahun 2023 II-24
Gambar 2.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023 II-26
Gambar 2.14	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023 II-27
Gambar 2.15	Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bungo Selama 2011-2023 II-28
Gambar 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023 II-30
Gambar 2.17	IPM Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023 II-31
Gambar 2.18	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023 II-34
Gambar 2.19	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023 II-35
Gambar 2.20	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023 II-48
Gambar 2.21	PDRB Perkapita Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023 (Ribu Rupiah) II-51



Gambar 2.22	Pengeluaran PerKapita Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023	II-52
Gambar 2.23	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023	II-57
Gambar 2.24	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023	II-58
Gambar 2.25	Angka Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023	II-61
Gambar 2.26	TPAK Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023	II-63
Gambar 2.27	Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023 (persen)	II-66
Gambar 2.28	Tenaga Listrik yang Tersambung menurut Jenis Pemakaian di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ULP Muara Bungo Tahun 2023	II-77
Gambar 2.29	Penanganan Kriminalitas di Kabupaten Bungo Tahun 2023	II-82
Gambar 2.30	Alur Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS RBA .	II-85
Gambar 2.31	Alur Non Perizinan Berusaha melalui Sistem <i>SiCantik Cloud</i>	II-86
Gambar 2.32	Piramida Penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2045	II-97
Gambar 2.33	Peta Struktur Ruang Wilayah Perencanaan Kabupaten Bungo	II-104
Gambar 2.34	Peta Kawasan Strategis Wilayah Perencanaan Kabupaten Bungo	II-137
Gambar 2.35	Peta Penutupan Lahan Kabupaten Bungo	II-139
Gambar 2.36	Luas (Ha) areal di Kabupaten Bungo berdasarkan Daya Dukung Sumber Daya Alam	II-141
Gambar 2.37	Luas (Ha) Areal Di Kabupaten Bungo Berdasarkan Luas (Ha) Areal Di Kabupaten Bungo Berdasarkan Daya Dukung Jasa Lingkungan	II-142
Gambar 3.1	Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	III-5
Gambar 4.1	Kerangka Besar Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2045	IV-2
Gambar 4.2	Visi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 ...	IV-3
Gambar 4.3	Kerangka Transformasi Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045	IV-10
Gambar 5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 Per Periode	V-2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah serta merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan dalam kurun waktu 20 tahun.

Sebagai awal dari pelaksanaan pembangunan daerah maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepada setiap Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan



pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan Masyarakat dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategi dengan sasaran yang dinamis;
2. Menyesuaikan dinamika perubahan; dan
3. Berorientasi pada tindakan antisipatif.

Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu (1) pendekatan teknokratik; (2) pendekatan partisipatif; (3) pendekatan politis; (4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; (5) pendekatan holistik-tematik; (6) pendekatan integratif; dan (7) pendekatan spasial.

RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pembangunan (*stakeholder*), serta penyelarasan dan sinkronisasi berpedoman kepada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-20245 sebagai bentuk dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Indonesia Emas 2045.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi



- Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wlayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



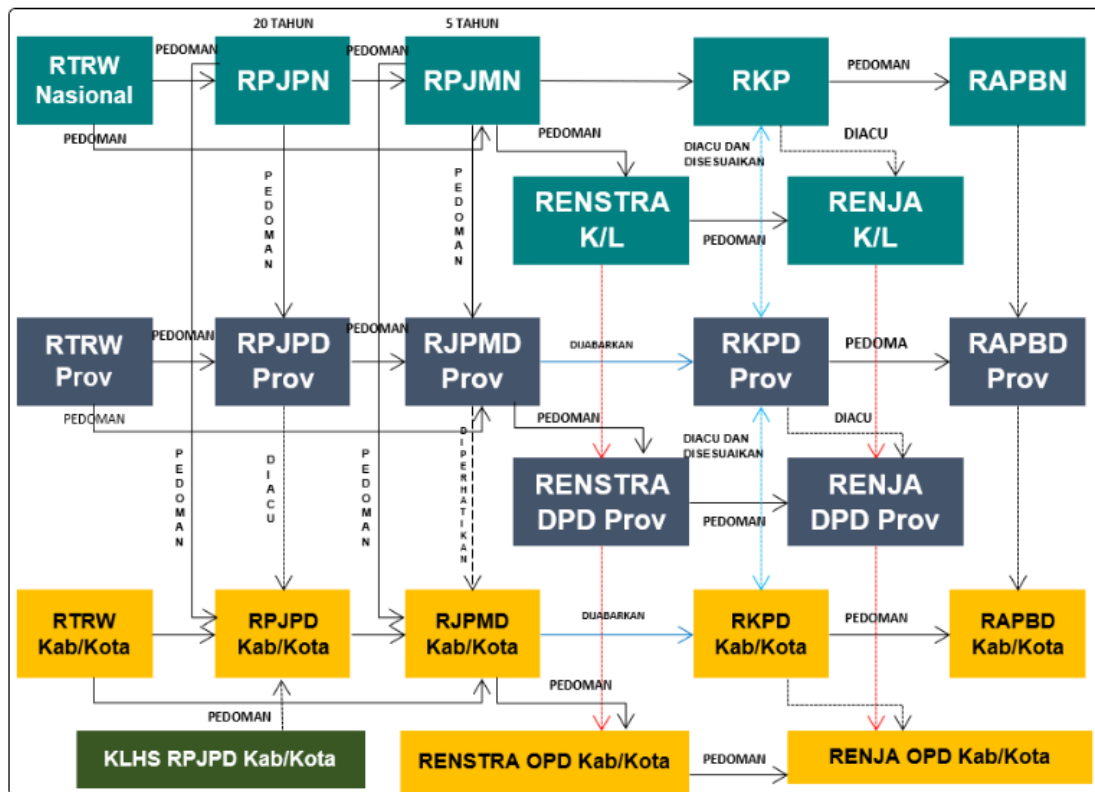
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600 1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 tidak terlepas dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045, khususnya pada arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan, dan indikator kinerja yang sesuai dengan kewenangan, karakteristik, dan pengembangan daerah. Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

Selain itu, RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 mengacu pada KLHS RPJPD. Substansi KLHS yang diperhatikan mencakup tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis yang mempengaruhi Pembangunan. Adapun gambar keterkaitan dokumen dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

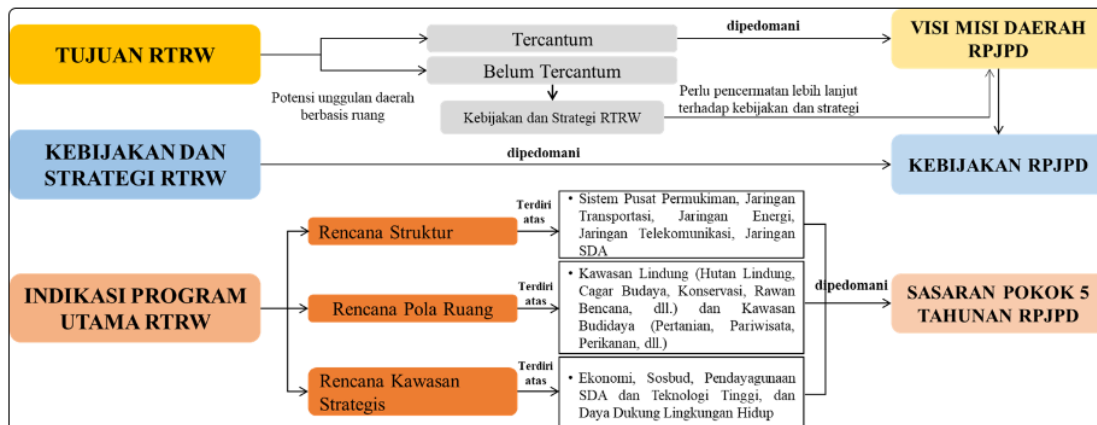


Sumber data: Diolah Tim Penyusun Tahun 2023.

RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo. Substansi RTRW yang dipedomani adalah arah pengembangan wilayah, sehingga tercipta keterkaitan yang erat antara RPJPD dan tata ruang wilayah.

Kewajiban untuk penyelarasan RPJPD dengan RTRW dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, yang menyatakan bahwa dalam penyusunan visi, misi RPJPD, kebijakan RPJPD, hingga sasaran pokok 5 tahunan RPJPD harus selaras dan berpedoman pada RTRW. Adapun keterkaitan RPJPD dan RTRW dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

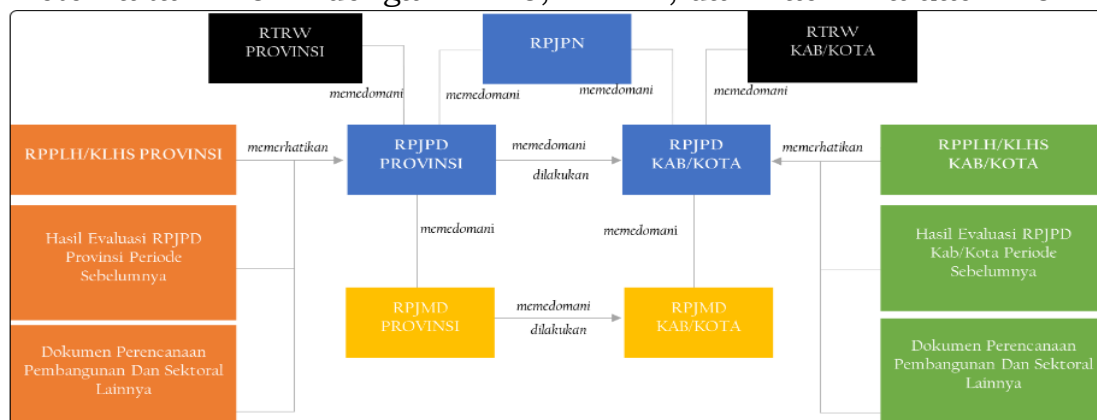
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJPD dan RTRW



Sumber data: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota harus juga memperhatikan dokumen KLHS, RPPLH, dan hasil evaluasi RPJPD Kab/Kota pada periode sebelumnya. Evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Bungo periode sebelumnya menjadi landasan penting, dengan memperhatikan capaian pembangunan dan rekomendasi hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2005-2025 untuk memberikan masukan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun keterkaitan RPJPD dengan dokumen lainnya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.3 Keterkaitan RPJPD dengan KLHS, RPPLH, dan Hasil Evaluasi RPJPD



Sumber data: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 harus menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lima tahunan atau perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) sebagai tahapan pembangunan lima tahun pertama hingga lima tahun keempat untuk pencapaian visi Kabupaten Bungo Tahun 2045. Adapun keterkaitan RPJPD dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.4
Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD



Sumber data: Diolah Tim Penyusun Tahun 2023.

Keterkaitan penyusunan RPJPD Kabupaten Bungo, RPJPD Provinsi Jambi, RPJPN, evaluasi RPJPD periode sebelumnya, KLHS, dan RTRW menjelaskan pendekatan menyeluruh dalam merumuskan strategi Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045. Hal ini menggambarkan adanya komitmen untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan, responsif terhadap tantangan lingkungan, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional dan regional.

Penyusunan dokumen RPJPD ini juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena



adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bungo untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan yang dituangkan ke dalam visi, misi, arah, kebijakan, sasaran pokok, serta indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Bungo.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 adalah:

- a. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bungo dalam kurun waktu 2025-2045;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD; serta
- d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.



1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Penyusunan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2006-2026

Pada bagian ini menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2006-2026.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Pada bagian ini menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pada bagian ini menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan

Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

3.2 Isu Strategis

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045

Pada bagian ini menjelaskan tentang visi daerah yang akan dicapai/dicita-dicitakan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun.

4.2 Misi

Pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana visi diwujudkan dan disisi lain sebagai komitmen terhadap keseluruhan *stakeholders* utama pelaku pembangunan daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan Daerah

Pada bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan



selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

5.2 Sasaran Pokok Daerah

Pada bagian ini menjelaskan sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20.

BAB VI PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dan juga berisi tentang pedoman dan kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bungo meliputi kondisi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bungo beberapa Tahun terakhir.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kabupaten Bungo memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografi daerah mencakup karakteristik lokasi dan wilayah, pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana, sedangkan aspek demografi menggambarkan deskripsi perubahan penduduk, komposisi dan populasi umat beragama di masyarakat.

2.1.1 Aspek Geografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan konsisi geografis, topologi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

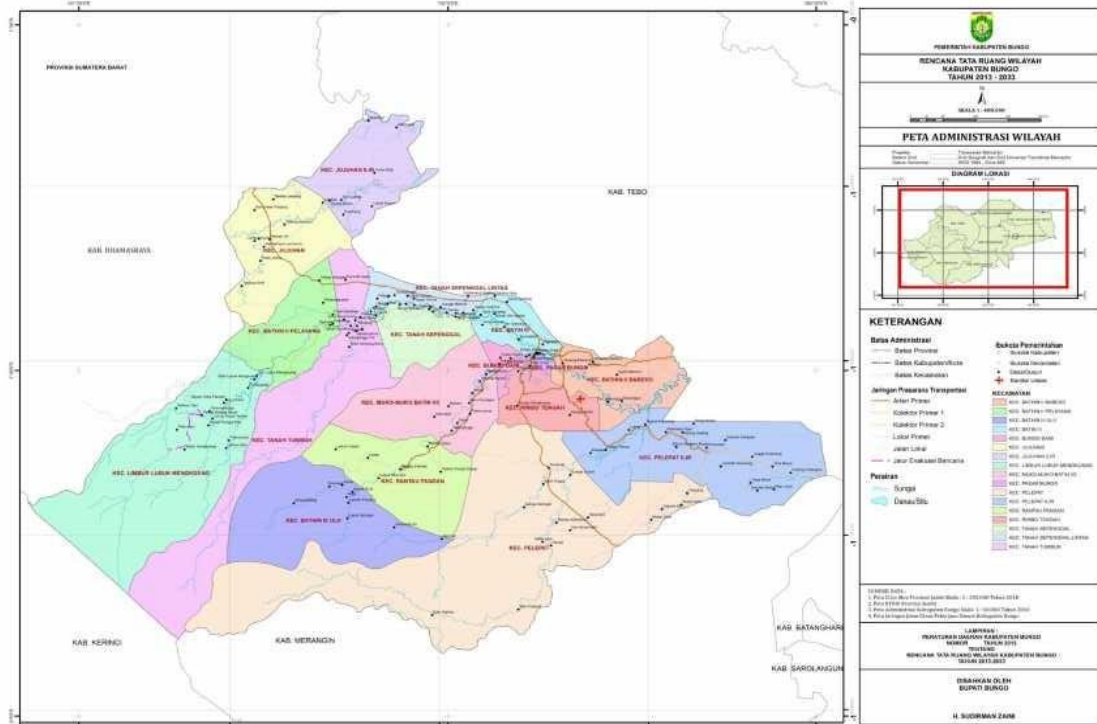
Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi wilayah barat dengan ibukota Muara Bungo. Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sebesar 4.659 km² atau 9,80% dari luas Provinsi Jambi (urutan ke-7 dari luas kabupaten/kota se-Provinsi Jambi).



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

Kabupaten Bungo terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 141 dusun dan 12 kelurahan (total 153 dusun/kelurahan).

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Bungo



Sumber data: Dokumen RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.

Adapun nama kecamatan, kelurahan atau dusun (sebutan desa di Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016) disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Nama Kecamatan dan Kelurahan/Dusun di Kabupaten Bungo

No	Kecamatan	Kelurahan/Dusun	Jumlah
1	Bathin II Babeko	Babeko, Simpang Babeko, Tuo Sepunggur, Sepunggur, Suka Makmur dan Tanjung Menanti	6 Dusun
2	Limbur Lubuk Mengkuang	Rantau Tipu, Pemunyian, Renah Sungai Ipuh, Sekar Mengkuang, Muara Tebo Pandak, Tuo Lubuk Mengkuang, Tuo Limbur, Limbur Baru, Pauh Agung, Baru Lubuk Mengkuang, Tebo Jaya, Tanjung Bungo,	14 Dusun



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Kelurahan/Dusun	Jumlah
		Lubuk Tanah Terban dan Renah Sungai Besar	
3	Jujuhan Ilir	Tepian Danto, Aur Gading, Pulau Batu, Bukit Sari, Sari Mulya, Lubuk Tenam dan Kuamang	7 Dusun
4	Rantau Pandan	Lubuk Kayu Aro, Rantau Pandan, Rantau Duku, Leban, Lubuk Mayan dan Talang Sungai Bungo	6 Dusun
5	Muko-muko Bathin VII	Mangun Jayo, Suka Jaya, Tanjung Agung, Tebat, Baru Pusat Jalo, Datar, Tebing Tinggi, Bedaro dan Pekan Jumat	9 Dusun
6	Jujuhan	Sirih Sekapur, Sirih Sekapur Perkembangan, Baru Balai Panjang, Rantau Ikil, Rantau Panjang, Jumbak, Ujung Tanjung, Pulau Jelmu, Tanjung Belit dan Talang Pamesun	10 Dusun
7	Tanah Sepenggal Lintas	Embacang Gedang, Sungai Tembang, Sungai Mancur, Tanah Periuk, Sungai Lilin, Lubuk Landai, Tebing Tinggi, Rantau Makmur, Rantau Embacang, Paku Aji, Sungai Puri dan Pematang Panjang	12 Dusun
8	Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh, Lubuk Niur, Pedukun, Perenti Luweh, Koto Jayo, Panjang, Teluk Kecimbung, Rambah, Tebing Tinggi Uleh, Bukit Kemang dan Renah Jelmu	11 Dusun
9	Bathin II Pelayang	Pelayang, Talang Silungko, Peninjau, Seberang Jaya, Pulau Kerakap dan Pelayang	5 Dusun
10	Pasar Muara Bungo	Tanjung Gedang, Jaya Setia, Bungo Barat, Bungo Timur dan Batang Bungo	5 Kelurahan
11	Bathin III	Bungo Taman Agung, Manggis, Sungai Binjai,	3 Kelurahan



No	Kecamatan	Kelurahan/Dusun	Jumlah
		Purwo Bakti, Sarana Jaya, Lubuk Benteng, Teluk Panjang dan Air Gemuruh	dan 5 Dusun
12	Pelepat	Senamat, Rantau Kelayang, Sungai Gurun, Sungai Beringin, Balai Jaya, Rantel, Baru Pelepat, Batu Kerbau, Dwi Karya Bhakti, Mulia Jaya, Gapura Suci, Mulia Bhakti, Cilodang, Sekampil dan Bukit Telago	15 Dusun
13	Bungo Dani	Sungai Kerjan, Sungai Pinang, Talang Pantai, Sungai Arang dan Pulau Pekan	2 Kelurahan dan 3 Dusun
14	Rimbo Tengah	Cadika, Pasir Putih, Sungai Buluh dan Sungai Mengkuang	2 Kelurahan dan 2 Dusun
15	Tanah Sepenggal	Teluk Pandak, Empelu, Tanah Bekali, Pasar Lubuk Landai, Sungai Gambir, Pasar Rantau Embacang, Tenam, Candi, Telentam dan Tanjung	10 Dusun
16	Pelepat Ilir	Purwasari, Lembah Kuamang, Sumber Harapan, Daya Murni, Sumber Mulya, Maju Jaya, Tirta Mulya, Lingga Kuamang, Bangun Harjo, Kuning Gading, Kuamang Jaya, Karya Harapan Mukti, Muara Kuamang, Lubuk, Padang Palangeh, Danau dan Koto Jayo	17 Dusun
17	Bathin III Ulu	Lubuk Beringin, Karak Apung, Aur Cino, Laman Panjang, Senamat Ulu, Sungai Telang, Muara Buat, Timbolasi dan Buat	9 Dusun

Sumber data: Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.



Untuk luas kecamatan dan persentase luas wilayah Kabupaten Bungo per kecamatan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan
di Kabupaten Bungo

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Kecamatan	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Pelepat	Rantau Kelayang	1.069,07	22,94
Pelepat Ilir	Kuamang Jaya	410,29	8,81
Bathin II Babeko	Simpang Babeko	176,29	3,78
Rimbo Tengah	Kelurahan Cadika	96,90	2,1
Bungo Dani	Talang Pantai	35,97	0,7
Pasar Muara Bungo	Kelurahan Bungo Timur	9,21	0,2
Bathin III	Kelurahan Manggis	80,46	1,7
Rantau Pandan	Rantau Pandan	239,61	5,14
Muko-Muko Bathin VII	Tanjung Agung	186,73	4,01
Bathin III Ulu	Muara Buat	373,83	8,01
Tanah Sepanggal	Pasar Lubuk Landai	106,92	2,29
Tanah Sepanggal Lintas	Ambacang Gedang	77,51	1,66
Tanah Tumbuh	Tanah Tumbuh	236,55	5,07
Limbur Lubuk Mengkuang	Tuo Limbur	932,41	20,01
Bathin II Pelayang	Pelayang	179,84	3,84
Jujuhan	Rantau Ikil	254,12	5,45
Jujuhan Ilir	Pulau Batu	193,04	4,14
Kabupaten Bungo		4.659	100

Sumber data: Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Pelepat dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pasar Muara Bungo.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bungo terletak pada posisi antara 101' 27' sampai 102' 30' bujur timur dan antara 01' 55' lintang selatan serta berbatasan dengan:



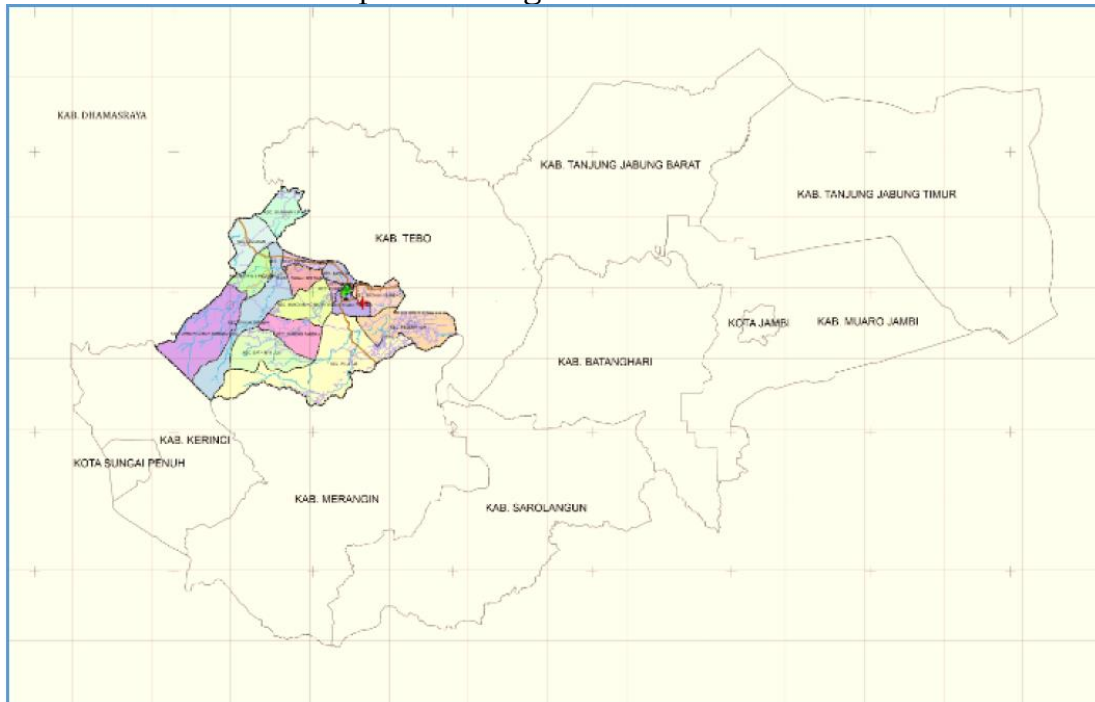
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat).

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat) dan Kabupaten Kerinci.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tebo.

Gambar 2.2
Peta Kabupaten Bungo Dalam Provinsi Jambi



Sumber data: Dokumen RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.

Kabupaten Bungo memiliki berbagai kelebihan dalam aspek geografi sehingga menimbulkan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik. Selain itu, Kabupaten Bungo merupakan jalur perlintasan dari Provinsi Jambi ke Sumatera Barat dan juga sebagai penghubung antar kabupaten di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari), dengan bagian barat (Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh).

Kabupaten Bungo memiliki kawasan strategis nasional, berupa Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).



Kawasan TNKS ini diarahkan untuk direhabilitasi dan dimantapkan fungsinya sebagai Kawasan Lindung Nasional. Selain kawasan Taman Nasional, di Kabupaten Bungo juga terdapat Kawasan Hutan Lindung (HL).

C. Topografi

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Bungo adalah sebagian dataran rendah di sebelah utara dan tengah yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dengan ketinggian yang hampir sama dengan permukaan laut atau sampai dengan 20 Meter dpl. Rata-rata Ketinggian Daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Rata-rata Ketinggian Kabupaten Bungo dari
Permukaan Air Laut dirinci menurut Kecamatan

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Pelepat	65
Pelepat Ilir	72
Bathin II Babeko	60
Rimbo Tengah	91
Bungo Dani	54
Pasar Muara Bungo	53
Bathin III	63
Rantau Pandan	97
Muko-Muko Bathin VII	70
Bathin III Ulu	141
Tanah Sepenggal	62
Tanah Sepenggal Lintas	75
Tanah Tumbuh	112
Limbur Lubuk Mengkuang	202
Bathin II Pelayang	101
Jujuhan	91
Jujuhan Ilir	90

Sumber data: Dokumen RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.

Sekitar 43,23% lahan yang ada di Kabupaten Bungo memiliki kemiringan lahan antara 0-15%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 36,55% kemiringan lahannya 16-40%. Karakteristik fisik dengan kemiringan yang cukup bervariasi ini membentuk bentang alam yang bervariasi pula, namun secara umum merupakan wilayah yang relatif



landai dan bergelombang. Wilayah yang relatif curam yaitu 20,22% dari luas lahan secara keseluruhan.

Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1.300 mdpl, dimana sekitar 87,70 persen di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 mdpl.

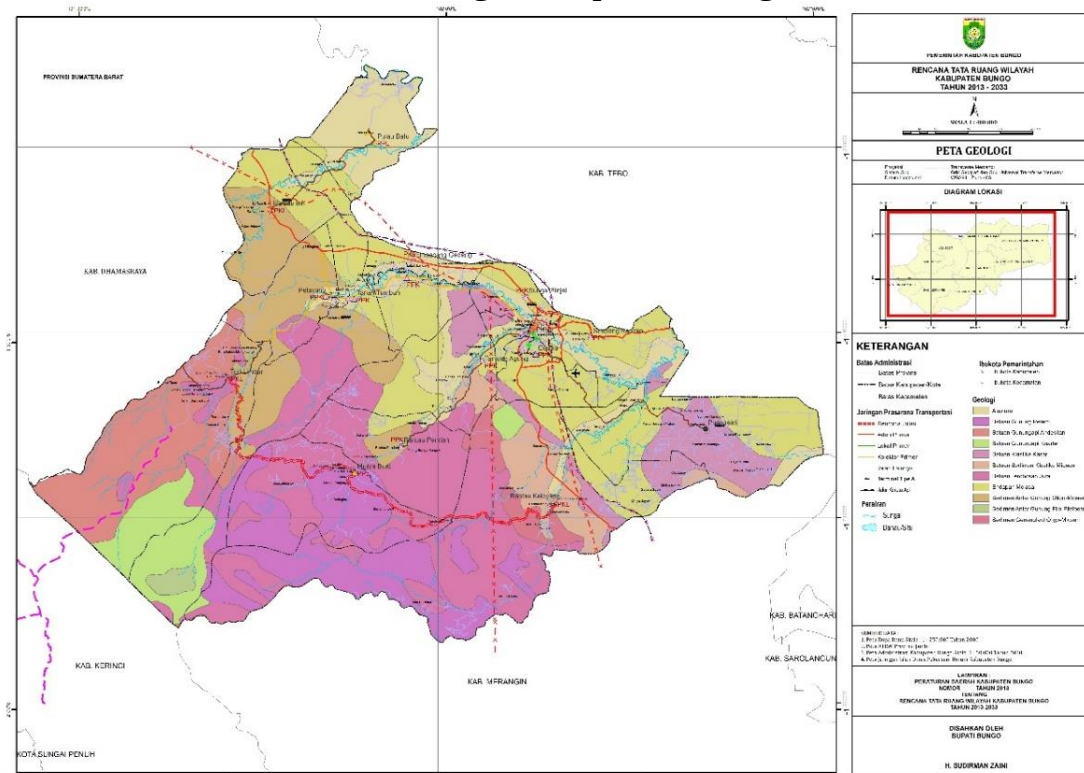
D. Geologi

Struktur batuan pembentuk lapisan tanah atau kondisi serta formasi geologi di Kabupaten Bungo terdiri atas batuan Aluvium, Andasit dan Basal, Batuan Gunung Api tak terpisahkan, Batuan Gunung Asam tak terpisahkan, Diorit, Formasi Air Berikat, Formasi Bukit Punjung, Formasi Gumai, Formasi Kasai, Formasi Muara Enim, Formasi Pelepat, Formasi Rantau Ikil, Formasi Granit dan Formasi Lava.

Secara umum, kelompok tanah yang ada di Kabupaten Bungo terdiri atas jenis tanah Andosol, Latosol, Latosol, Hidromorf dan Podsolik. Jenis tanah pada masing-masing kecamatan yaitu:

- a) Jenis tanah Andosol sebagian kecil terdapat di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Tanah tumbuh, Bathin III Ulu dan Pelepat.
- b) Jenis tanah Latosol sebagian besar terdapat di Kecamatan Jujuhan Ilir, Jujuhan, Bathin II Pelayang, Limbur Lubuk Mengkuang, Sebagian Kecil terdapat di Kecamatan Tanah Tumbuh Bathin III Ulu, Rantau Pandan dan Pelepat.
- c) Jenis tanah Hidromorf terdapat di sebagian Kecamatan Rantau Pandan, Bathin III Ulu dan Pelepat.
- d) Jenis tanah Podsolik terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Bungo.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kabupaten Bungo



Sumber data: Dokumen RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.

E. Hidrologi dan Hidrogeologi

Kabupaten Bungo memiliki empat Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Batang Tebo, DAS Batang Bungo, DAS Batang Pelepat dan DAS Batang Jujuhan. Sungai-sungai tersebut sangat potensial sebagai sumber kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat menjadi bumerang manakala pengelolaan daerah aliran sungai tidak dilakukan secara lestari.

Tabel 2.4
Panjang Sungai Utama di Kabupaten Bungo

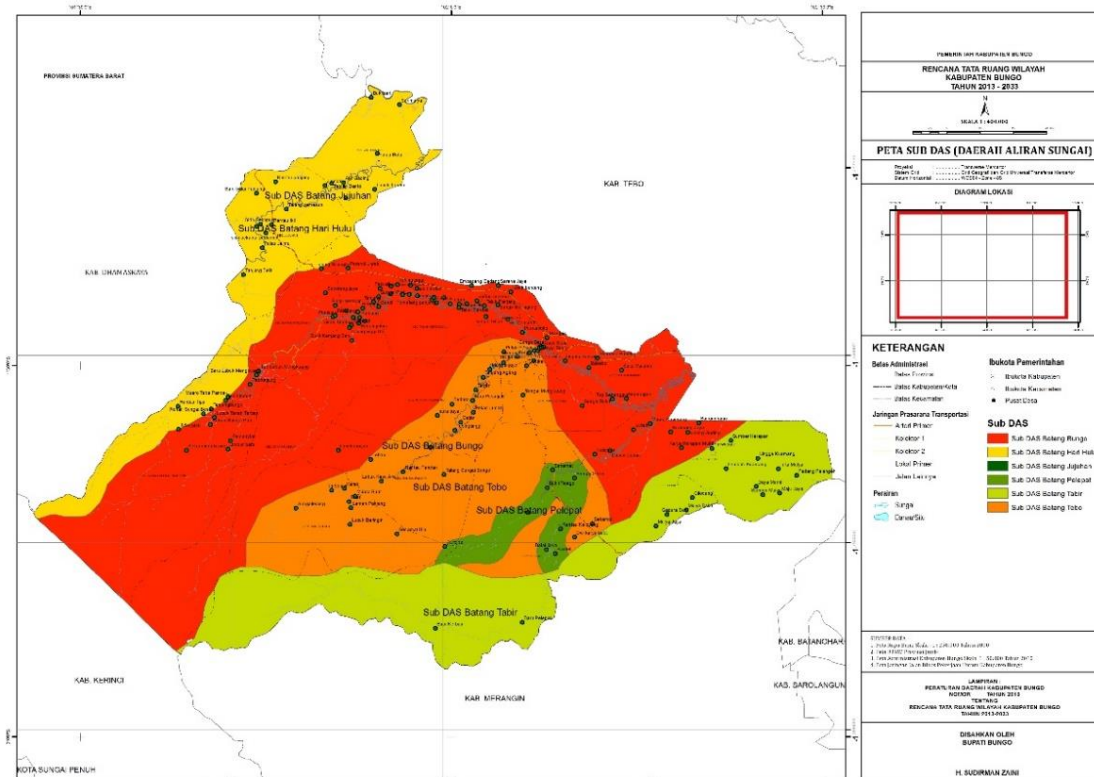
No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Batang Tebo	256
2	Batang Bungo	95
3	Batang Pelepat	105
4	Batang Jujuhan	158

Sumber Data : Badan Informasi Geospasial.

Selain itu, ada banyak DAS sungai yang melintasi Kabupaten Bungo selain 4 DAS disebutkan diatas diantaranya adalah, DAS

Batang Benit, DAS Batang Ule, DAS Jantayo, DAS Kemarau, DAS Kuamang Bungo, DAS Mengkuang, DAS Pagian, DAS Sungkai, DAS Semagai, DAS Pandak Tebo, DAS Telantam, DAS Telentam Besar, DAS Pamesun, DAS Penyumian, DAS Plangke dan DAS Komersi.

Gambar 2.4
Peta DAS Kabupaten Bungo



Sumber data: Dokumen RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.

Jika dilihat dari pola aliran sungai yang terbentuk pada beberapa sungai di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa beberapa sungai yang melalui daerah bertopografi datar membentuk pola aliran yang berkelok-kelok (meander), sedangkan sungai-sungai yang berada di daerah perbukitan akan membentuk pola aliran semi dendritik (semi cabang-cabang) dan dendritik (cabang-cabang).

Tabel 2.5
Nama-Nama Sungai yang Melintasi Kecamatan
di Kabupaten Bungo

No	Kecamatan	Nama Sungai
1	Pelepat	Baru Pelepat
2	Pelepat Ilir	Baru Pelepat, Kuamang
3	Bathin II Babeko	Batang Tebo
4	Rimbo Tengah	Mengkuang
5	Bungo Dani	Batang Bungo



6	Pasar Muara Bungo	Batang Bungo, Batang Tebo
7	Bathin III	Batang Bungo, Batang Tebo
8	Rantau Pandan	Batang Bungo
9	Muko-Muko Bathin VII	Batang Bungo
10	Bathin III Ulu	Batang Bungo
11	Tanah Sepenggal	Batang Tebo
12	Tanah Sepenggal Lintas	Batang Tebo
13	Tanah Tumbuh	Batang Tebo
14	Limbur Lubuk Mengkuang	Batang Tebo
15	Bathin II Pelayang	Batang Tebo
16	Jujuhan	Batang Jujuhan
17	Jujuhan Ilir	Batang Jujuhan

Sumber data : Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2023.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2013-2033, diketahui bahwa Sungai Batang Bungo memiliki luas daerah pengaliran seluas 410,60 hektar dengan debit maksimal 177,20 m³/detik dan debit minimal 6,54 m³/detik.

Tabel 2.6
Luas Daerah Pengaliran dan Debit dari Beberapa Sungai
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Kabupaten/ Kota	Nama Sungai	Luas Daerah Pengaliran	Debit Max (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
Kerinci	Batang Merao	187,50	245,00	5,11
Merangin	Batang Merangin	3.645,00	2.300,00	26,07
Sarolangun	Batang Sarolangun	1.258,00	-	-
Batanghari	Batanghari	35.984,38	8.484,00	202,00
Muaro Jambi	Batanghari	38.704,00	8.363,00	515,00
Tanjab Timur	Jangkat	-	-	-
Tanjab Barat	Batang Pengabuhan Merlung	4.300,00	57,11	2,50
Tebo	Batang Tebo	1.831,60	742,00	20,60
Bungo	Batang Bungo	410,60	177,20	6,54
Kota Jambi	Batanghari	42.142,00	12.059,00	-

Sumber data: Dokumen RTRWP Provinsi Jambi Tahun 2022-2042.

Dilihat dari pola aliran sungai yang terbentuk pada beberapa sungai di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa beberapa sungai yang melalui daerah bertopografi datar membentuk pola aliran yang berkelok-kelok (meander), sedangkan sungai-sungai yang berada di daerah perbukitan akan membentuk pola aliran semi deandritik dan

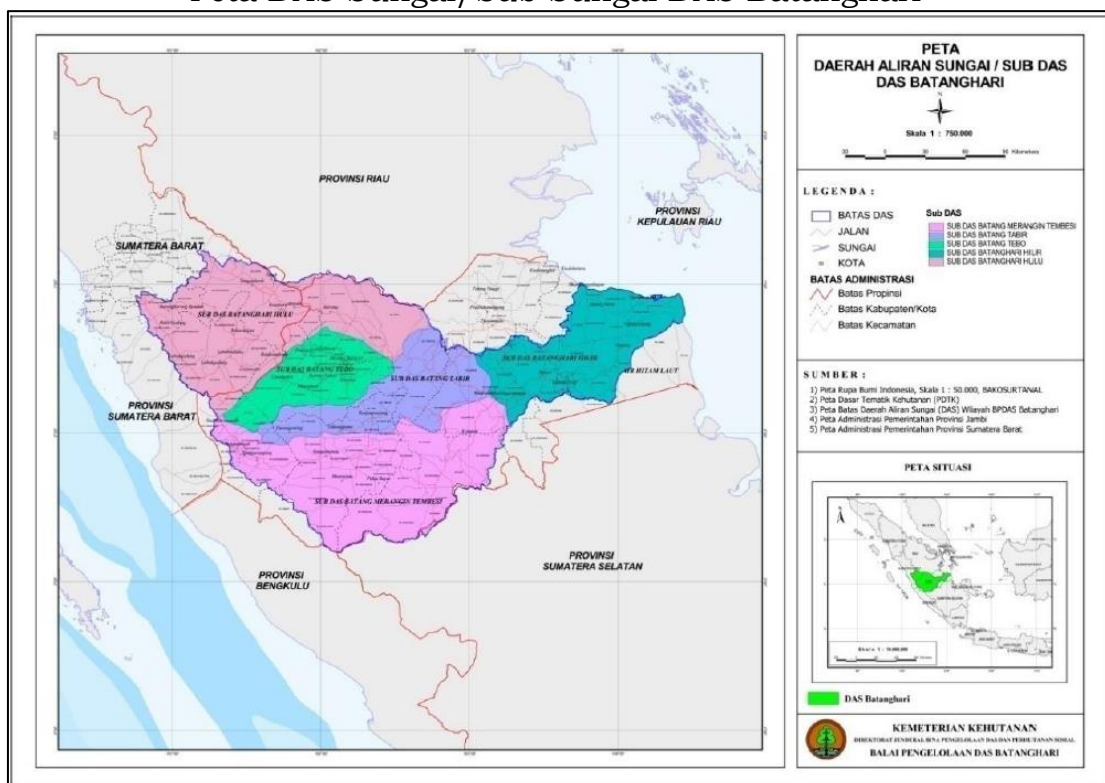
deandritik. Di Kabupaten Bungo terdapat beberapa Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS), yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bungo

Nama DAS	Luas (Ha)
DAS BATANGHARI	4.550.338,98
Sub DAS Batang Tabir	25.559,43
Sub DAS Batang Tebo	391.144,22
Sub DAS Batanghari Ulu	47.689,46

Sumber data: BP-DAS Batanghari Jambi.

Gambar 2.5
Peta DAS Sungai/Sub Sungai DAS Batanghari



Sumber data: BP-DAS Batanghari Jambi.

F. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 25,8°-26,7°C. Kondisi curah hujan di Kabupaten Bungo cukup berfluktuatif, dimana berdasarkan hasil amatan curah hujan terpantau rata-rata 11 hari hujan sepanjang Tahun 2023 dengan debit rata-rata 204,3 mm³ per hari. Untuk melihat kondisi curah hujan tiap bulan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 2.8
Kondisi Curah Hujan Tiap Bulannya
di Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
1	Januari	231	13
2	Februari	191	13
3	Maret	376	17
4	April	176	11
5	Mei	203	12
6	Juni	181	10
7	Juli	130	7
8	Agustus	153	7
9	September	61	5
10	Oktober	58	5
11	November	314	11
12	Desember	378	17
Jumlah/ Total		38.275	2.452
Rata-rata		3.190	204,3

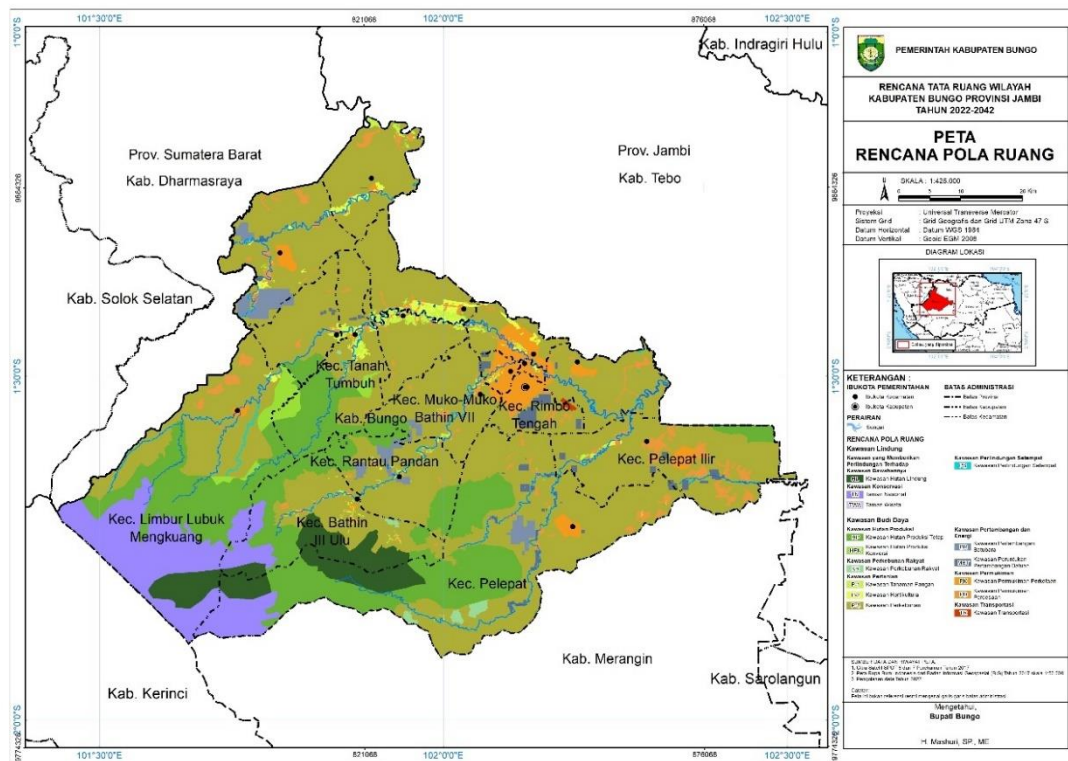
Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2023.

Dari tabel di atas curah hujan di Kabupaten Bungo tertinggi terjadi pada bulan desember dan curah hujan terendah terjadi dibulan september. Disisi lain hari hujan terbanyak terjadi pada bulan maret dan desember dan paling sedikit terjadi pada bulan september dan oktober.

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan untuk pembangunan secara optimal dan efisien. Sementara Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Dengan adanya tata alokasi lahan, maka perencanaan sebuah daerah akan tertata dengan baik, tertib dan rapi, serta meminimalisir terjadinya penggunaan lahan secara sembarangan oleh orang yang tidak memiliki izin. Penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Bungo terdiri atas kawasan hutan, budidaya pertanian, non pertanian, dan lainnya.

Gambar 2.6
Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bungo
Tahun 2022-2042



Sumber data: Dokumen RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.

Adapun rencana pola ruang di Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Rencana Pola Ruang di Kabupaten Bungo

No	Uraian
1	Hutan Lindung
2	Hutan Produksi
3	Perkebunan
4	Perkotaan/Permukiman
5	Pertanian Lahan Basah
6	Pertanian Lahan Kering
7	Sempadan Sungai
8	Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS)

Sumber data: RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa rencana pola ruang di Kabupaten Bungo berdasarkan RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 ada 8 jenis tutupan lahan.



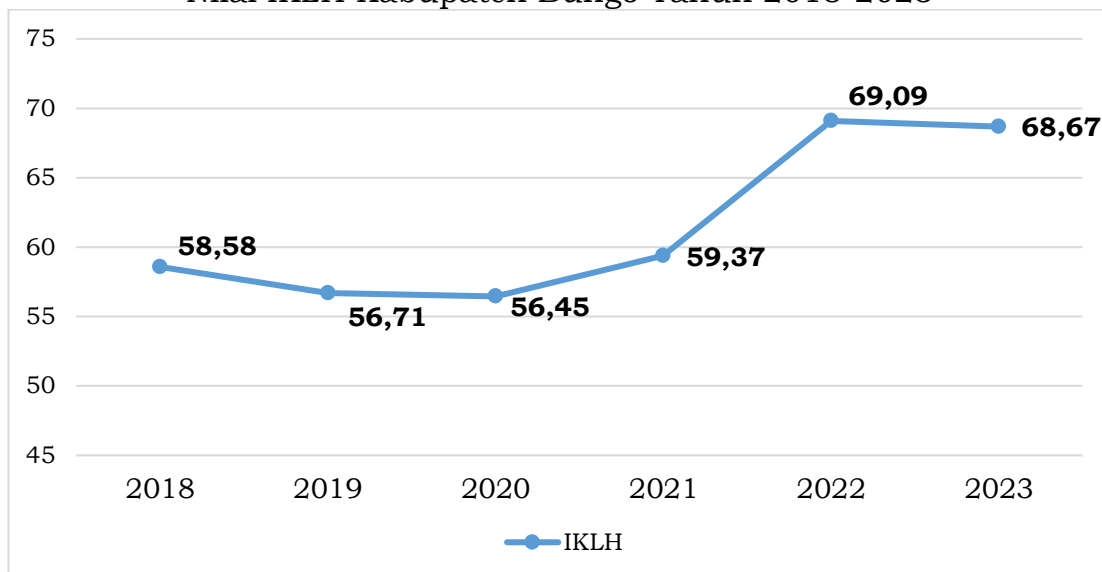
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mencapai target IKLH tersebut perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, salah satunya melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup baik kualitas udara, kualitas air sungai, kualitas air laut dan kualitas lahan.

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting. Adapun nilai IKLH Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023 disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.7
Nilai IKLH Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023



Sumber data: Dokumen LKjIP Kabupaten Bungo.

Nilai IKLH Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023 cenderung naik, hal ini menunjukkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam Pembangunan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup.



3. Pengembangan Wilayah

Potensi daerah yang menjadi andalan dan merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bungo adalah potensi sumber daya pertanian dan perkebunan. Kabupaten Bungo memiliki lahan perkebunan seluas 147.594 ha atau 31 % dari luas wilayah keseluruhan, lahan yang sudah dioleh menjadi lahan perkebunan seluas 46.494 Ha, masih terdapat potensi lahan seluas 101.096 Ha.

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional salah satu kabupaten dalam Propinsi Jambi yang ditetapkan sebagai PKW adalah Muara Bungo dengan arahan mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi.

Kawasan strategis Kabupaten Bungo dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu (1) kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, (2) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari:
 - a) Kota Terpadu Mandiri Bathin III Ulu berada di Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Rantau Pandan.
 - b) Perkotaan Rantau Ikil, Tuo Limbur, Rantau Kelayang dan Embacang Gedang.
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Hutang Lindung Bukit Panjang-Bukit Bayur dengan luas 13.529,40 Ha.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo 2013-2033 telah dirumuskan rencana kawasan budidaya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, meliputi:

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hutan yang dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi.



- b. Kawasan Peruntukan Pertanian, dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, pertanian tanaman Tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
- c. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi: perikanan tangkap, budidaya perikanan dan pengolahan ikan.
- d. Kawasan Peruntukan Pertambangan, dirinci meliputi: jenis pertambangan golongan bahan galian strategis (Golongan A); golongan bahan galian vital (Golongan B); serta golongan bahan galian lainnya yang tidak termasuk golongan diatas (Golongan C).
- e. Kawasan Peruntukan Industri, dirinci meliputi kawasan peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga.
- f. Kawasan Peruntukan Pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan peruntukan: pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Rencana ini disusun berdasarkan potensi yang ada, potensi yang akan datang atau potensi yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata ini harus diikuti wisata andalan serta yang berkaitan dengan wisata nasional.
- g. Kawasan Peruntukan Permukiman, terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi dan sebagainya.
- h. Kawasan Peruntukan Lainnya, berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

4. Wilayah Rawan Bencana

Daerah rawan bencana merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam atau daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia. Potensi bencana alam di Kabupaten Bungo antara lain Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran dan Rawan Gunung Berapi.



Adapun data daerah rawan bencana di Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.10
Daerah Rawan Bencana Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Bungo

No	Kecamatan	No	Dusun/ Kelurahan	Jenis Bencana			
				Banjir	Karhutla	Longsor	Gempa
1.	Bathin II Babeko	1.	Babeko	Banjir			
		2.	Baru Sepunggur	Banjir			
		3.	Sepunggur	Banjir			
		4.	Simpang Babeko	-	Karhutla	-	-
		5.	Tanjung Menanti	Banjir	Karhutla	-	-
2.	Bathin II Pelayang	6.	Pelayang	-	Karhutla	-	-
		7.	Peninjau	-	Karhutla	-	-
3.	Bathin III	8.	Air Gemuruh	Banjir	-	-	-
		9.	Purwobakti	Banjir	-	-	-
		10.	Bungo Taman Agung	Banjir	-	-	-
		11.	Manggis	Banjir	Karhutla	-	-
4.	Bathin III Ulu	12.	Sungai Binjai	-	Karhutla	-	-
		13.	Muara Buat	Banjir	-	Longsor	-
		14.	Laman Panjang	Banjir	-	-	-
		15.	Lubuk Beringin	Banjir	-	-	-
		16.	Karak Apung	Banjir	Karhutla	Longsor	-
		17.	Timbolasi	Banjir	-	Longsor	-
		18.	Sungai Telang	-	Karhutla	Longsor	-
5.	Bungo Dani	19.	Senamat Ulu	-	-	Longsor	-
		20.	Sungai Pinang	Banjir	-	-	-
		21.	Sungai Arang	Banjir	-	-	-
		22.	Talang Pantai	Banjir	-	-	-
6.	Jujuhan	23.	Sungai Kerjan	-	Karhutla	-	-
		24.	Pulau Jelmu	Banjir	-	-	-
		25.	Rantau Ikil	Banjir	Karhutla	-	-
		26.	Rantau Panjang	Banjir	-	-	-
		27.	Sirih Sekapur	Banjir	-	-	-
		28.	Tanjung Belit	Banjir	-	-	-
7.	Jujuhan Ilir	29.	Ujung Tanjung	Banjir	-	-	-
		30.	Jumbak	Banjir	-	-	-
		31.	Pulau Batu	Banjir	Karhutla	-	-
		32.	Tepian Danto	Banjir	-	-	-
8.	Limbur Lubuk Mengkuang	33.	Aur Gading	Banjir	-	-	-
		34.	Baru Lubuk Mengkuang	Banjir	-	Longsor	-
		35.	Renah Sungai Ipuh	Banjir	Karhutla	Longsor	Gempa
		36.	Muara Tebo Terban	Banjir	-	-	Gempa
		37.	Tuo Limbur	Banjir	Karhutla	-	Gempa
		38.	Renah Sungai Besar	Banjir	-	Longsor	Gempa
		39.	Lubuk Tanah Terban	Banjir	Karhutla	-	Gempa
		40.	Pauh Agung	Banjir	-	-	Gempa
		41.	Rantau Tipu	-	Karhutla	Longsor	Gempa
		42.	Pemunyan	-	Karhutla	-	-
		43.	Tuo Lubuk Mengkuang	-	-	Longsor	Gempa
9.	Muko-Muko Bathin VII	44.	Tanjung Bungo	-	-	-	Gempa
		45.	Suka Jaya	Banjir	-	-	-
		46.	Mangun Jaya	Banjir	-	-	-
		47.	Pakan Jum'at	Banjir	-	-	-
		48.	Tebat	Banjir	-	-	-
		49.	Baru Pusat Jalo	Banjir	-	-	-
50.	Datar	Banjir	-	-	-		

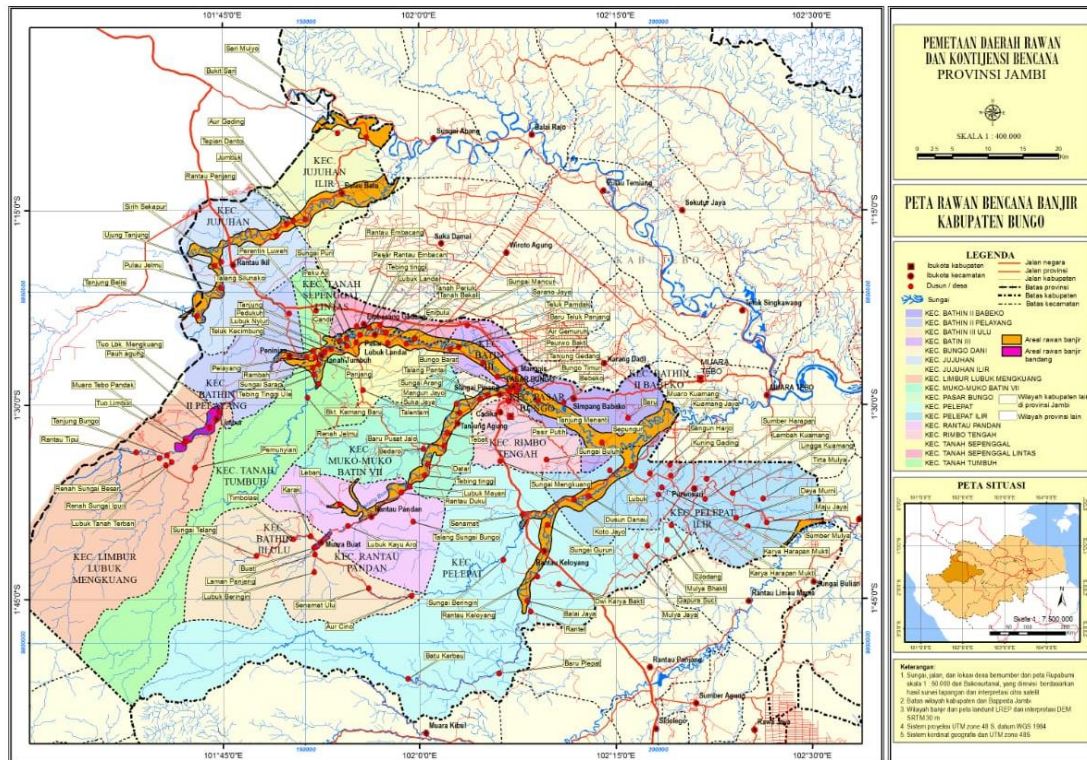


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	No	Dusun/ Kelurahan	Jenis Bencana			
				Banjir	Karhutla	Longsor	Gempa
10	Pasar Muara Bungo	51.	Tebing Tinggi	Banjir	-	-	-
		52.	Bedaro	Banjir	-	-	-
		53.	Batang Bungo	Banjir	-	-	-
		54.	Bungo Timur	Banjir	-	-	-
		55.	Jaya Setia	Banjir	-	-	-
		56.	Tanjung Gedang	Banjir	-	-	-
11.	Pelepat	57.	Batu Kerbau	Banjir	Kurhutla	-	-
		58.	Buku Telago	Banjir	-	-	-
		59.	Baru pelepat	Banjir	Kurhutla	-	-
		60.	Rantau Kelayang	Banjir	Kurhutla	-	-
		61.	Sungai Beringin	Banjir	Kurhutla	-	-
		62.	Senamat	-	Karhutla	-	-
		63.	Rantel	-	Karhutla	-	-
		64.	Sekampil	-	Karhutla	-	-
12	Pelepat Ilir	65.	Danau	Banjir	-	-	-
		66.	Lubuk	Banjir	-	-	-
		67.	Muara Kuamang	Banjir	Karhutla	-	-
		68.	Padang Palangeh	Banjir	Karhutla	-	-
		69.	Koto Jayo	Banjir	Karhutla	-	-
		70.	Tirta Mulya	Banjir	-	-	-
13	Rantau Pandan	71.	Leban	Banjir	-	-	-
		72.	Rantau Duku	Banjir	-	Longsor	-
		73.	Lubuk Kayu Aro	Banjir	-	Longsor	-
14	Rimbo Tengah	74.	Cadika	-	Karhutla	-	-
		75.	Pasir Putih	-	Karhutla	-	-
		76.	Sungai Buluh	-	Karhutla	-	-
		77.	Sungai Mengkuang	-	Karhutla	-	-
15	Tanah Sepengga Lintas	78.	Tanah Periuk	Banjir	Karhutla	-	-
		79.	Lubuk Landai	Banjir	Karhutla	-	-
		80.	Rantau Makmur	-	Karhutla	-	-
		81.	Sungai Tembang	-	Karhutla	-	-
16	Tanah Sepenggal	82.	Candi	Banjir	-	-	-
		83.	Tenam	Banjir	-	-	-
		84.	Empelu	Banjir	-	-	-
		85.	Tanah Bekali	Banjir	-	-	-
		86.	Teluk Pandak	-	Karhutla	-	-
17	Tanah Tumbuh	87.	Lubuk Niur	Banjir	-	-	-
		88.	Rambah	Banjir	-	-	-
		89.	Tebing Tinggi Uleh	Banjir	-	-	-
		90.	Teluk Kecimbung	Banjir	-	-	-
		91.	Pedukun	Banjir	-	-	-
		92.	Bukit Kemang	Banjir	-	-	-
		93.	Panjang	Banjir	-	-	-
		94.	Koto Jayo	Banjir	-	-	-
		95.	Renah Jelm	Banjir	-	-	-
96.	Perantih Lueh	-	Karhutla	-	-		
Jumlah				75	35	12	9

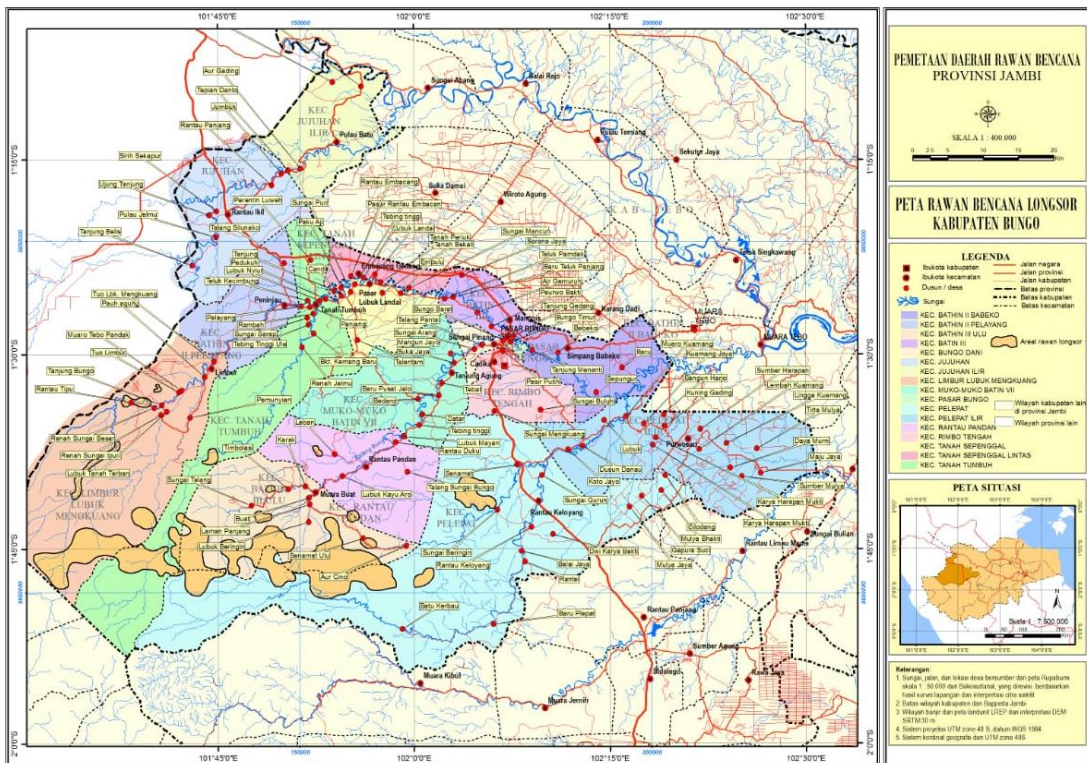
Sumber data: BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Gambar 2.8
Peta Rawan Banjir Kabupaten Bungo



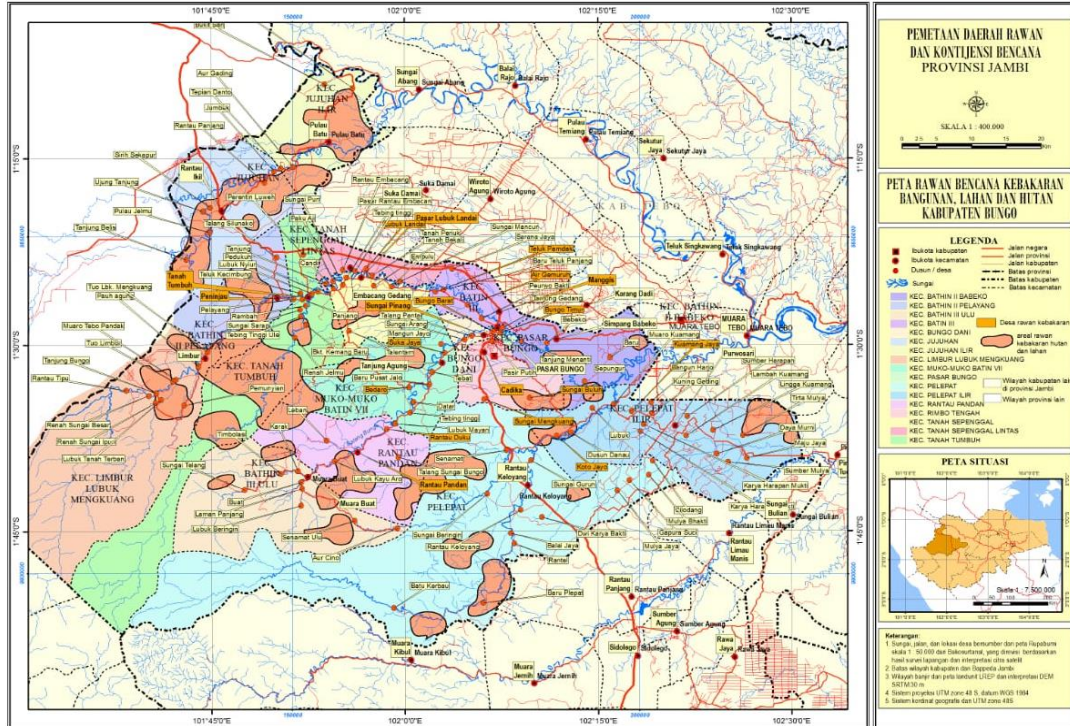
Sumber data: BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Gambar 2.9
Peta Rawan Longsor Kabupaten Bungo



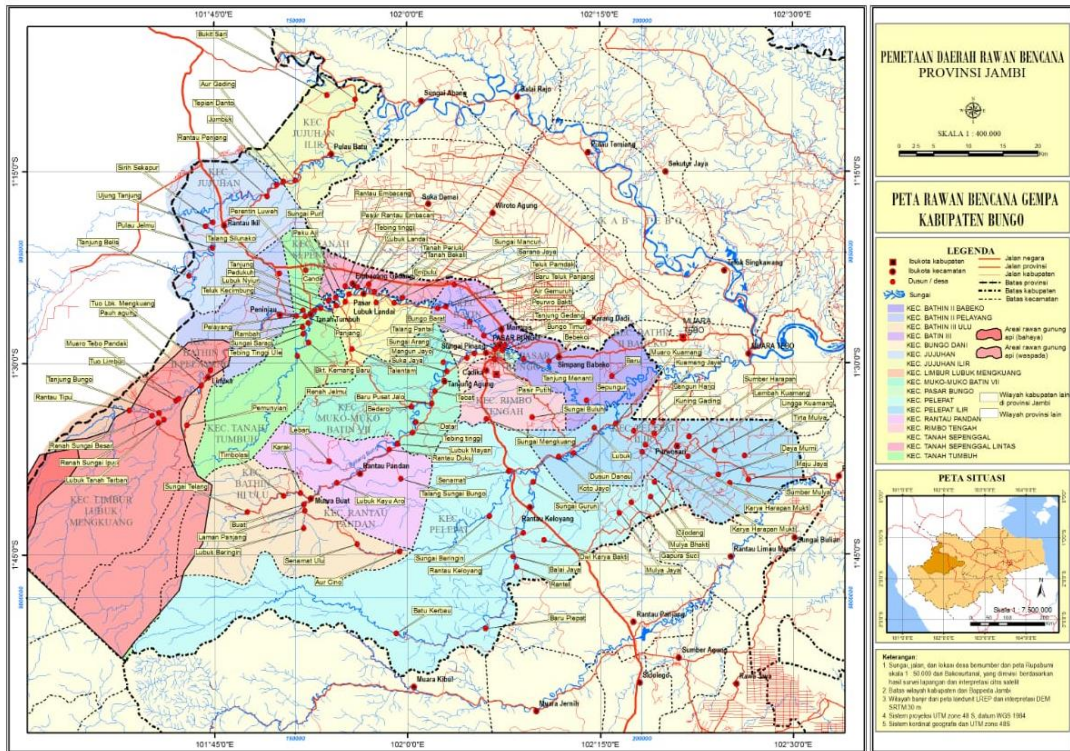
Sumber data: BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Gambar 2.10
Peta Rawan Kebakaran Kabupaten Bungo



Sumber data: BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Gambar 2.11
Peta Rawan Bencana Gempa Kabupaten Bungo



Sumber data: BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Bungo Tahun 2024.



2.1.2 Aspek Demografi

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya.

Perkembangan penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023 mengalami kenaikan rata-rata 0,52 persen per Tahun. Adapun data perkembangan penduduk Kabupaten Bungo dari Tahun 2011-2023 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023

Tahun	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah (orang)	Kepadatan Penduduk (Orang/ Km ²)
	Laki -laki	Perempuan		
2011	159.994	152.701	312.695	67,10
2012	163.983	156.644	320.627	68,80
2013	167.993	160.382	328.375	70,50
2014	172.028	164.292	336.320	72,20
2015	175.997	168.103	344.100	73,90
2016	179.893	171.985	351.878	75,50
2017	183.893	175.697	359.590	77,20
2018	187.677	179.505	367.182	78,82
2019	191.571	183.199	374.770	80,44
2020	184.799	177.564	362.363	78,00
2021	187.107	180.087	367.194	78,81
2022	190.083	183.261	373.344	80,13
2023	191.594	184.788	376.382	81,40

Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

Jumlah penduduk Kabupaten Bungo dari Tahun 2011-2023 cenderung fluktuatif. Persebaran penduduk di Kabupaten Bungo relatif merata, secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap daerah atau kecamatan terlihat relatif berimbang, namun karena luas wilayah masing-masing kecamatan berbeda maka tingkat kepadatan penduduk selalu bervariasi.

Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk per kecamatan di wilayah Kabupaten Bungo pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.12
Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Pelepat	1.069,07	37,16	34,9
2	Pelepat Ilir	410,29	52,43	129,7
3	Bathin II Babeko	176,29	15,31	86,5
4	Rimbo Tengah	96,9	35,34	362,6
5	Bungo Dani	35,97	28,30	796,0
6	Pasar Muara Bungo	9,21	21,29	2.337,0
7	Bathin III	80,46	28,39	350,1
8	Rantau Pandan	239,61	10,84	46,0
9	Muko-Muko Bathin VII	186,37	15,78	85,7
10	Bathin III Ulu	373,83	10,02	27,0
11	Tanah Sepanggal	106,92	25,16	238,0
12	Tanah Sepanggal Lintas	77,51	24,00	315,3
13	Tanah Tumbuh	236,55	15,46	66,4
14	Limbur Lubuk Mengkuang	932,41	17,28	18,7
15	Bathin II Pelayang	179,84	9,07	51,6
16	Jujuhan	254,12	20,29	79,9
17	Jujuhan Ilir	193,04	10,28	54,5
	Kabupaten Bungo	4.659	376,38	81,40

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2023 di Kabupaten Bungo adalah sebesar 81,40 per km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pasar Muara Bungo dan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Sementara untuk gambaran jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bungo Tahun 2023

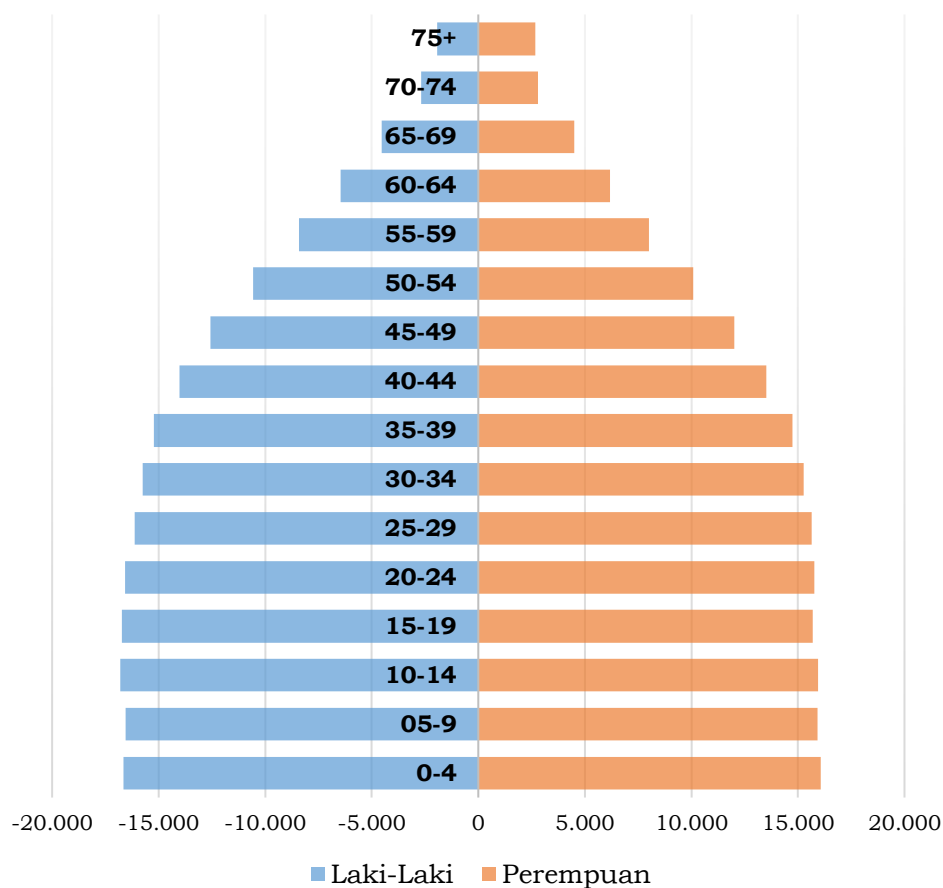
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	16.658	16.061	32.719
5-9	16.540	15.916	32.456
10-14	16.800	15.941	32.741



15-19	16.721	15.696	32.417
20-24	16.589	15.760	32.349
25-29	16.118	15.648	31.766
30-34	15.756	15.262	31.018
35-39	15.233	14.738	29.971
40-44	14.035	13.508	27.543
45-49	12.573	12.023	24.596
50-54	10.556	10.081	20.637
55-59	8.412	8.000	16.412
60-64	6.452	6.191	12.643
65-69	4.545	4.492	9.037
70-74	2.681	2.801	5.482
75+	1.925	2.670	4.595
Bungo	191.594	184.788	376.382

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Gambar 2.12
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bungo Tahun 2023



Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Perkembangan penduduk Kabupaten Bungo tidak menggambarkan pertumbuhan alami. Hal ini disebabkan karena



pesatnya pembangunan daerah, sehingga menarik minat penduduk daerah lain untuk berusaha dan akhirnya menetap di Kabupaten Bungo.

Sementara untuk melihat banyaknya penduduk Kabupaten Bungo berdasarkan agama yang dianutnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
di Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Agama	Jumlah
1	Islam	362.010
2	Protestan	8.387
3	Katolik	1.751
4	Hindu	18
5	Budha	1.181
6	Khonghucu	7
7	Lainnya	229

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Berdasarkan data di atas dapat diperoleh persentase penduduk Kabupaten Bungo memeluk agama Islam sebanyak 96,90 persen, Protestan sebanyak 2,25 persen, Katolik sebanyak 0,47 persen, Hindu sebanyak 0,005, Budha sebanyak 0,32 persen, Khonghucu sebanyak 0,002 persen, dan Lainnya sebanyak 0,06 persen.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

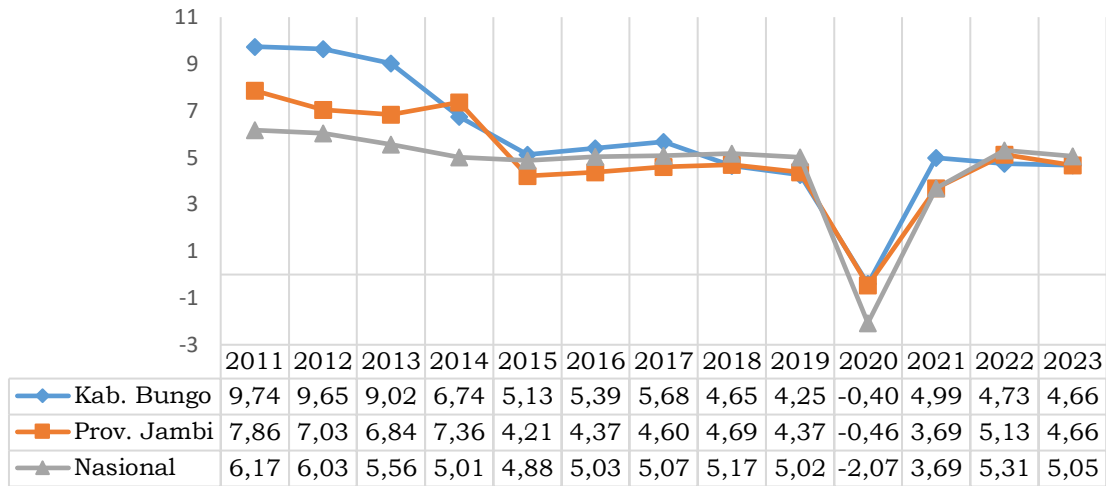
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo dari Tahun 2011-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo
Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Kabupaten Bungo.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo menunjukkan tren penurunan dari Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023, dengan beberapa fluktuasi di antaranya. Namun, terjadi pemulihan signifikan setelah Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada Tahun 2011 sebesar 9,74% dan terjadi penurunan bertahap dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Dampak Pandemi Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 terjadi kontraksi ekonomi sebesar -0,40%. Pemulihan Pasca-Pandemi pertumbuhan melonjak signifikan ke 4,99% pada Tahun 2021, menandakan pemulihan ekonomi yang kuat. Pertumbuhan terus positif di 4,73% pada Tahun 2022 dan 4,66% pada Tahun 2023. Secara umum, pertumbuhan Bungo lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jambi, menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif lebih baik.

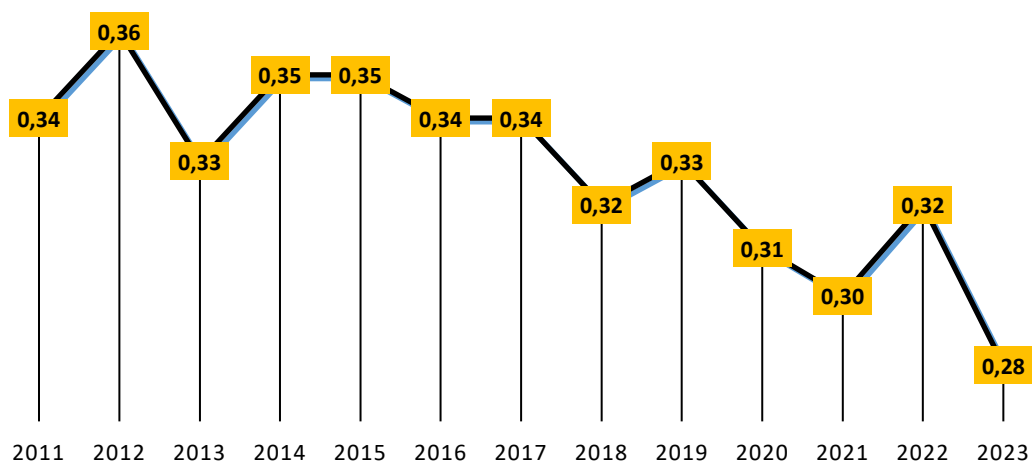
2. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan umum yang sudah menjadi hal biasa dalam proses perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup nasional, bahkan sampai pada wilayah Provinsi, Kabupaten atau unit

yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan tersebut sering menjadi permasalahan yang serius dan berpotensi menimbulkan konflik ekonomi, sosial, atau lemahnya tingkat keterhubungan antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan yakni melalui Indeks Gini. Indeks Gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

Semakin tinggi nilai Koefisien Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi (Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1). Penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Gambar 2.14
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Bungo
Tahun 2011-2023



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

Secara keseluruhan, Indeks Gini Kabupaten Bungo menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil dari Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023 dengan kecenderungan sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Gini bergerak dalam rentang 0,28 hingga 0,36, menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan



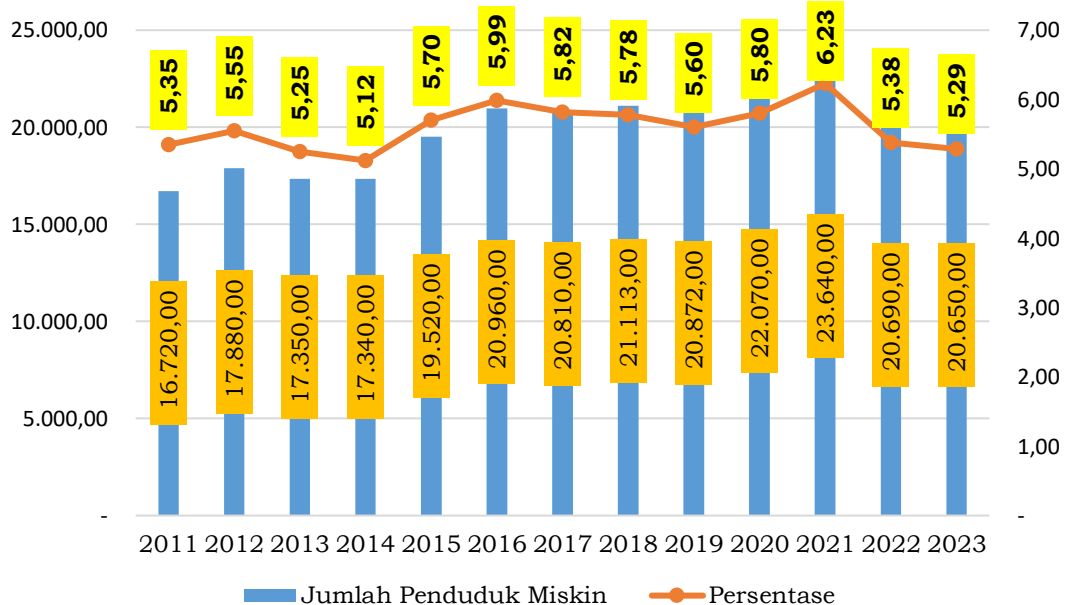
yang moderat. Meskipun masih dalam kategori ketimpangan moderat, penurunan konsisten Indeks Gini mengindikasikan kebijakan distribusi pendapatan yang cukup efektif. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata.

3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan terhadap pemenuhan hak-hak dasar serta perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Gambar 2.15
Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bungo
Selama 2011-2023



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.



Grafik di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bungo mengalami fluktuasi selama periode Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023. Kenaikan signifikan pada Tahun 2021 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Penurunan setelah Tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Tabel 2.15
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
1	2018	0,62	0,13
2	2019	0,81	0,16
3	2020	0,72	0,17
4	2021	0,92	0,18
5	2022	0,81	0,17
6	2023	0,59	0,11

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Tahun 2023 sebesar 0,59 persen, Tahun 2022 sebesar 0,81 persen. Hal ini menjelaskan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Tahun 2023 lebih baik dari Tahun 2022 (nilai indeks Tahun 2023 lebih kecil dari Tahun 2022).

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Tahun 2023 sebesar 0,11 persen dan Tahun 2022 sebesar 0,17 persen. Hal ini menjelaskan bahwa indeks keparahan kemiskinan Tahun 2023 semakin kecil jarak antara penduduk miskin yang satu dengan lainnya sebesar 0,06 poin.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

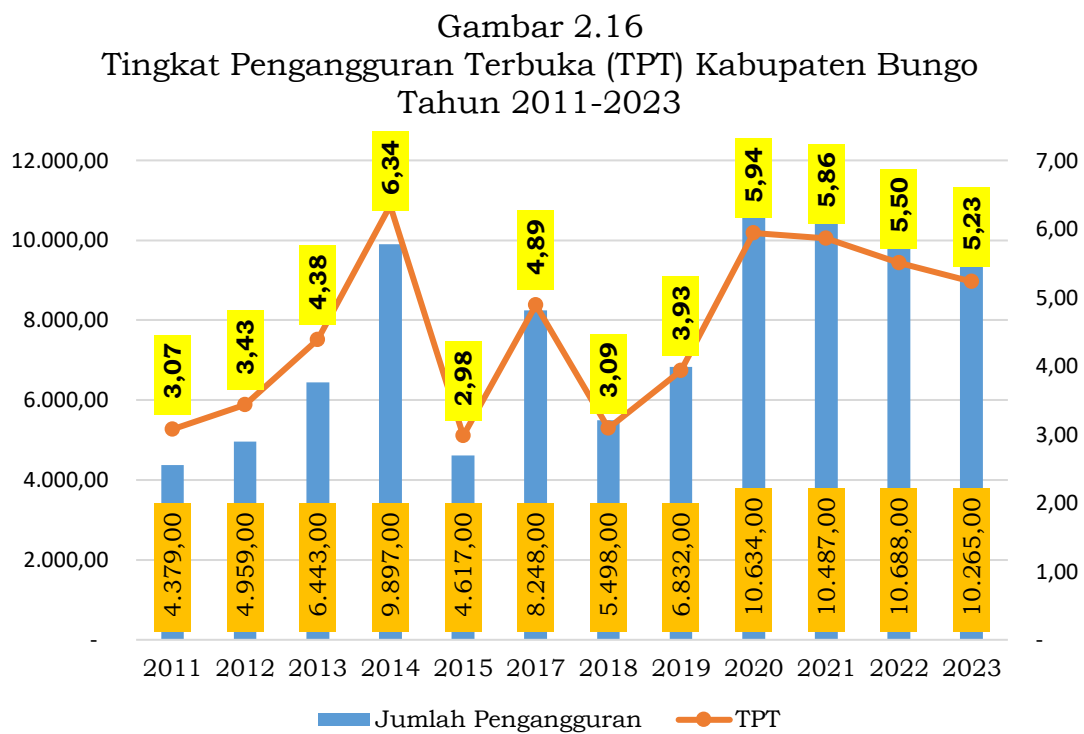
Salah satu komponen penggerak ekonomi yang paling berpengaruh adalah tenaga kerja. Pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja dan



menyiapkan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif merupakan tantangan yang harus dihadapi di era industry 4.0 ini.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran terbuka, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Adapun data perkembangan TPT Kabupaten Bungo dari Tahun 2011-2023 dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

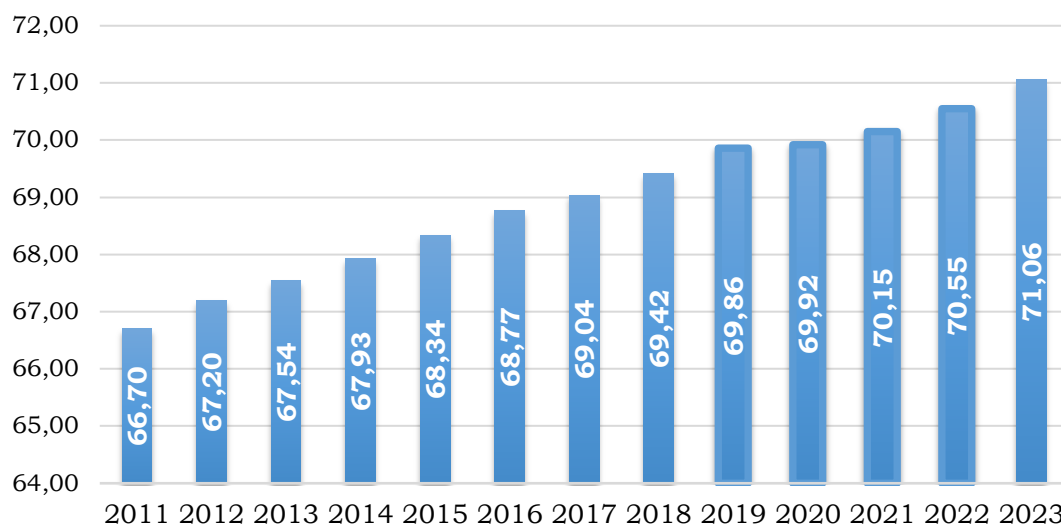
Grafik di atas menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan jumlah pengangguran dan TPT di Kabupaten Bungo selama periode Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023. Peningkatan yang signifikan pada Tahun 2020 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Setelah Tahun 2020 jumlah pengangguran maupun TPT menunjukkan tren penurunan. Hal ini, mencerminkan upaya pemulihan ekonomi dan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengangguran.



5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat dalam aspek sosial dapat dianalisis melalui IPM. IPM ini meliputi tiga indikator utama yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga indikator utama tersebut antara lain adalah 1) pendidikan, 2) pendidikan, dan 3) daya beli. Data IPM Kabupaten Bungo dari Tahun 2011-2023 dapat pada gambar dilihat dibawah ini:

Gambar 2.17
IPM Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bungo menunjukkan perkembangan yang baik selama lebih dari satu dekade terakhir. Dari Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023, terlihat tren peningkatan yang konsisten dan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat. Dengan tren positif yang telah ditunjukkan selama ini, Kabupaten Bungo memiliki fondasi yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.

6. Laju Inflasi

Gambaran stabilitas ekonomi sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo dapat dilihat dari besaran inflasi. Dimana laju inflasi diukur dari laju perubahan Indeks



Konsumen. Adapun data laju inflasi Tahunan Kabupaten Bungo selama Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 2.16
Laju Inflasi Tahunan Kabupaten Bungo
dari Tahun 2014-2023

No	Tahun	Laju Inflasi
1	2014	8,99
2	2015	1,29
3	2016	3,11
4	2017	4,25
5	2018	2,46
6	2019	2,61
7	2020	2,32
8	2021	1,65
9	2022	6,04
10	2023	2,85

Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

Laju inflasi Kabupaten Bungo selama satu dekade terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2014 sebagai data awal sebesar 8,99 persen dan terendah tercatat pada Tahun 2015 sebesar 1,29 persen. Setelah Tahun 2015 inflasi Kabupaten Bungo mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai 4,25 persen pada Tahun 2017. Namun, periode Tahun 2018 hingga 2021 ditandai dengan penurunan bertahap, mencapai titik terendah sebesar 1,65 persen di Tahun 2021. Stabilitas relatif ini mencerminkan upaya pengendalian harga yang efektif atau kondisi ekonomi yang lebih terkendali.

Lonjakan inflasi yang cukup signifikan pada Tahun 2022 sebesar 6,04 persen naik tajam dari 1,65 persen hampir empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini merupakan dampak dari berbagai faktor global dan domestik, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan gejolak pasar internasional di mana permintaan meningkat pesat sementara pasokan masih terbatas.

Namun pada Tahun 2023 inflasi kembali turun ke level 2,85 persen ini menunjukkan adanya upaya stabilisasi harga yang cukup berhasil dan penurunan ini menandakan normalisasi kondisi ekonomi dan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi yang diterapkan



Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, hal ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi ke tingkat yang lebih moderat dan sejalan dengan target inflasi nasional. Rata-rata inflasi di Kabupaten Bungo selama periode 10 tahun sekitar 3,46 persen

Fluktuasi inflasi selama periode Tahun 2014 sebagai data awal hingga Tahun 2023 menggambarkan Kabupaten Bungo sebagai daerah yang responsif terhadap berbagai faktor ekonomi. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, kemampuan untuk menjaga inflasi pada tingkat yang relatif terkendali di sebagian besar periode menunjukkan adanya fundamental ekonomi yang cukup kuat dan pengelolaan kebijakan yang efektif. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya kewaspadaan dan fleksibilitas dalam manajemen ekonomi daerah, mengingat faktor-faktor tak terduga seperti pandemi global dapat memiliki dampak signifikan pada tingkat inflasi. Ke depannya, mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga akan menjadi kunci bagi kesejahteraan ekonomi Kabupaten Bungo.

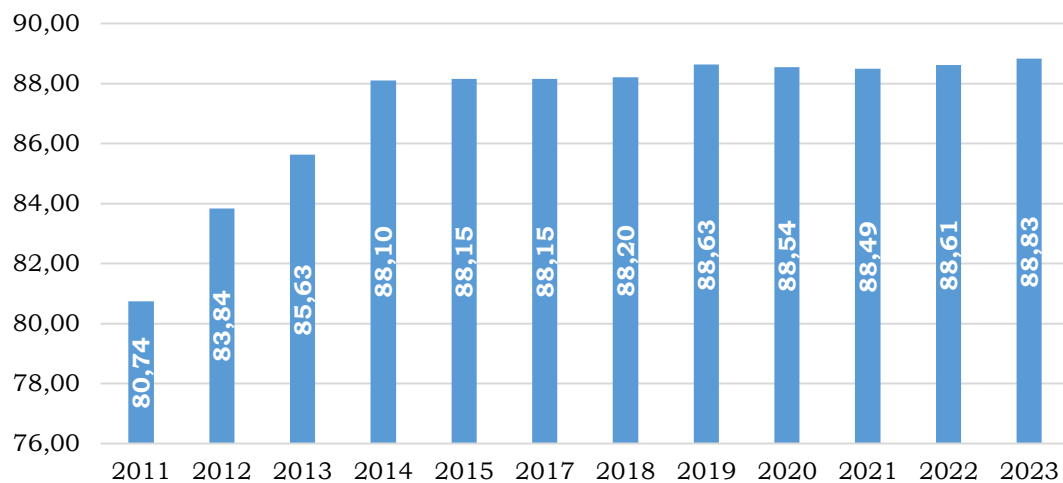
2.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah jika nilai IPG kurang dari 90 dan kategori tinggi jika nilai IPG lebih besar atau sama dengan 90.

Untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bungo digunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender-Related Development Index* (GDI). Nilai IPG Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bungo
Tahun 2011-2023



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

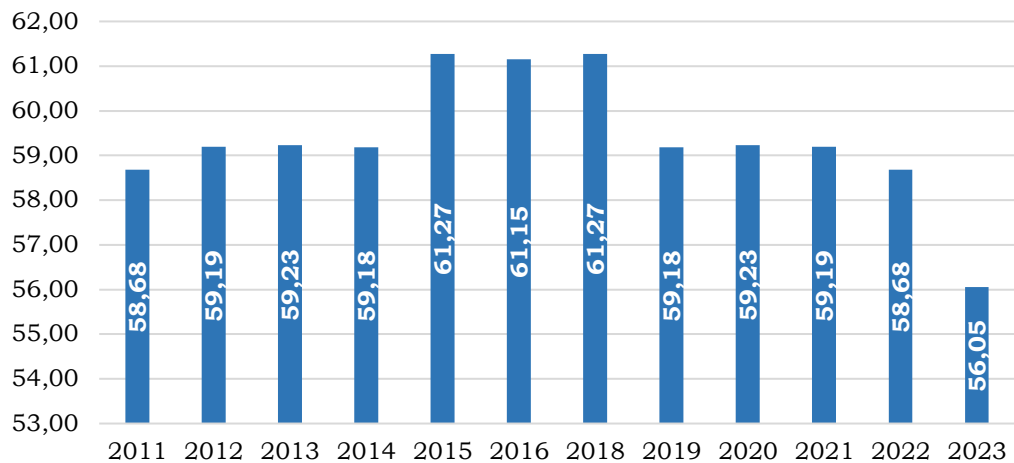
Secara umum, IPG menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023, mengindikasikan perbaikan dalam kesetaraan gender baik. Selama periode Tahun 2011-2023 tidak terjadi penurunan signifikan ini menunjukkan ketahanan upaya pemberdayaan gender terhadap berbagai tantangan atau guncangan eksternal.

2. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.19
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bungo
Tahun 2011-2023



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bungo menunjukkan dinamika selama periode Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023. Fluktuasi nilai IPG ini menunjukkan bahwa pemberdayaan gender di Kabupaten Bungo mengalami pasang surut. Tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan untuk mengatasi hambatan baru dalam kesetaraan gender.

3. Pembangunan Kebudayaan

Peningkatan nilai-nilai budaya dan adat istiadat sangat diperlukan demi menjaga kelestarian objek sumber daya melalui mekanisme kearifan lokal. Penerapan unsur kearifan lokal yang menyeluruh ke dalam berbagai aspek kehidupan diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan taraf kualitas kehidupan masyarakat melalui basis pemberdayaan.

Kabupaten Bungo memiliki sejumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang menunjukkan adanya sumber daya (*resources*) kultural yang potensial untuk dilestarikan. Objek Pemajuan Kebudayaan itu terdiri dari 11 (sebelas) jenis, yakni manuskrip, tradisi lisan, bahasa, adat-istiadat, ritus, permainan rakyat, teknologi tradisional, olahraga tradisional, cagar budaya, seni, dan pengetahuan tradisional.



Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menjaga budaya asli tetap berupaya mengusulkan dan menetapkan warisan budaya baik secara nasional, provinsi maupun kab/kota. Adapun warisan budaya di Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Daftar Nama Warisan Budaya di Kabupaten Bungo

No	Nama Warisan Budaya
1	Seni Krinok
2	Tradisi Lisan Dideng
3	Pengetahuan Tradisional Lubuk Larangan
4	Bungo Tanduk dan Kebat Kayu

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Dari tabel di atas Kabupaten Bungo memiliki 4 warisan budaya sampai dengan Tahun 2022. Dalam rangka menumbuh kembangkan seni budaya khas Melayu, Pemerintah Kabupaten Bungo selama ini telah melaksanakan dan menetapkan agenda berkala kegiatan festival lomba dan pawai berbagai seni budaya. Setiap Tahunnya dilaksanakan festival budaya daerah untuk memperkenalkan budaya yang ada kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda sehingga mereka mengetahui dan menyayangi budayanya sendiri.

4. Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan pemuda sebagai generasi pewaris nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sebagai insan pembangunan yang memiliki tanggungjawab serta percaya akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersumber dari Pancasila dan kepribadian bangsa. Pemuda merupakan suatu kekuatan dalam membangun suatu negara karena pemuda sebagai harapan bangsa, kader pemimpin bangsa masa depan dan pelopor serta penggerak pembangunan yang produktif.

kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, antara lain dalam Pembangunan pemuda dan olahraga, antara lain



peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan serta peningkatan kelembagaan dan organisasi kepemudaan.

Adapun Jumlah prestasi dan organisasi pemuda yang terdapat di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Jumlah Prestasi dan Organisasi Pemuda
di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023

No	Indikator	Tahun					
		2018 <i>(data awal)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Prestasi dalam Bidang Olahraga (Cabor)	30	19	22	34	27	37
2	Jumlah Organisasi Pemuda	32	32	22	22	22	25

Sumber data: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Dari data di atas menjelaskan bahwa dari Tahun 2018-2023 jumlah prestasi dibidang olahraga (cabor) di Kabupaten Bungo paling banyak didapat pada Tahun 2023 dengan jumlah prestasi pada cabor sebanyak 37 dan paling sedikit pada Tahun 2019. Sementara untuk jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2022 cenderung turun.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



2.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018 <i>(data awal)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	NA	48,57 (C)	50,15 (CC)	50,98 (CC)	54,98 (CC)	56,93 (CC)

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024.

(C = Agak kurang, perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar, CC = *Cukup baik (memadai)*, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)

Selama Tahun 2018-2023 nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bungo terus mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.



2.3.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan Teknologi dan Informasi dalam sebuah instansi pemerintahan sudah menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan, sebagaimana hal ini telah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2018 telah mengeluarkan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini juga merupakan langkah nyata implementasi reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Adapun nilai indeks SPBE Kabupaten Bungo berdasarkan evaluasi Kementerian PAN RB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.20
Indeks SPBE Kabupaten Bungo dari Kementerian PAN RB

No	Tahun	Indeks	Predikat
1	2018 <i>(data awal)</i>	1,15	Kurang
2	2019	1,15	Kurang
3	2020	1,15	Kurang
4	2021	1,46	Kurang
5	2022	1,50	Kurang
6	2023	1,95	Cukup

Sumber data: Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB, Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023 mengalami kenaikan. Semula pada Tahun 2018 sebesar 1,15 dengan predikat kurang menjadi 1,95 dengan predikat cukup pada Tahun 2023. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Bungo semakin membaik, namun masih perlu ditingkatkan.

2.3.3 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Teknis lainnya.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten ada 6 Bidang Urusan yaitu SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta SPM Sosial. Di Kabupaten Bungo pelaksanaan SPM ini berada pada 7 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pencapaian SPM Kabupaten Bungo Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.21
Capaian SPM Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023 (persen)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun				
			2019 <i>(data awal)</i>	2020	2021	2022	2023
Bidang Urusan Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	61,53	75,20	74,91	82,40	73,37
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI. SMP/MTS)	80,59	92,27	92,39	92,30	95,37
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	83,08	8,78	72,80	72,80	21,31
Bidang Urusan Kesehatan							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu hamil	88,12	87,49	87,49	78,00	82,13
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin	80,76	94,60	94,60	82,00	83,19
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir	88,09	97,20	97,20	86,00	81,23



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun				
			2019 <i>(data awal)</i>	2020	2021	2022	2023
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita	71,78	67,79	67,79	42,00	76,61
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar	100	71,58	71,58	92,00	80,22
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 Tahun.	20,21	28,73	28,73	92,00	75,72
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga negara Indonesia usia 60 Tahun ke atas.	95,00	93,69	93,69	89,00	77,05
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita hipertensi.	17,88	44,16	44,16	13,00	44,36
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Penderita diabetes melitus.	40,80	69,18	69,18	85,00	89,25
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	83,30	100	100	81,00	97,14
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah Orang dengan TB.	17,58	83,47	83,47	99,00	35,72
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	31,69	53,08	53,08	34,00	73,87
Bidang Urusan Pekerjaan Umum							
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Setiap rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui system penyediaan air minum	54,12	79,88	79,88	80,20	80,20
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili	-	69,79	69,79	-	-
Bidang Urusan Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria	-	-	-	-	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Setiap rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria	-	-	-	-	100



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun				
			2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Pelayanan informasi Rawan Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	-	-	-	-	100
		Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana:					
		a. Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana1) - Pemberdayaan Destana.	100	100	100	-	100
		b. Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia.	-	-	-	-	100
		c. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	-	-	-	-	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	-	-	-	-	-
		Pembuatan rencana kontinjensi Pelatihan pencegahan dan mitigasi:	-	-	-	-	-
		a. Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparaturnya	-	-	-	-	-
		- Bimtek aparaturnya PB (10 orang x 5 dusun)	-	-	-	-	-
		b. Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara	-	-	-	-	-
		- Bimtek relawan PB (30orang x 5 dusun)	-	-	-	-	-
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana:					
		a. Simulasi dalam ruang (<i>table top exercise</i>)	100	100	90	-	-
		b. Gladi lapang	100	100	90	-	-
		Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana:					
a. Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	90	-	-		
b. Penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana	-	-	90	-	100		
c. Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast	100	100	85	-	100		
d. Penyediaan obat-obatan dan vaksin	-	-	-	-	-		
e. Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi	-	-	-	-	-		
f. Penyediaan peralatan kesehatan	-	-	-	-	-		
g. Penyediaan peralatan laboratorium	-	-	-	-	-		



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun				
			2019 (data awal)	2020	2021	2022	2023
		h. Penyediaan layanan biosekuriti	-	-	-	-	-
		i. Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	100	100	100	100	100
		Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana:	-	-	-	-	-
		a. Penyediaan peralatan penyelamatan diri	-	-	-	-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas:					
		a. Investigasi/penyelidikan epidemicologi terpadu/wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian specimen serta konfirmasi laboratorium	-	-	-	-	-
		b. Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas)	-	-	-	-	-
		c. Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tatalaksana kasus/isolasi/ pengebalan/pengobatan/komunikasi risiko).	-	-	-	-	-
		Respon cepat darurat bencana:					
		a. Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	100	100	100	-	100
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana:					
		a. Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	100	100	100	-	100
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana:					
		a. Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	-	100
		b. Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan	100	100	100	-	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun				
			2019 <i>(data awal)</i>	2020	2021	2022	2023
		jalur pertolongan dan evakuasi	100	100	100	-	100
		c. Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	-	100
		d. Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana					
4	Pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Respon time penanganan kebakaran di kabupaten Bungo 15 menit	100	95,00	85,71	85,70	100
5	Pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga Negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah	Setiap warga Negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten serta Perkada	66,67	66,67	-	-	100
Bidang Urusan Sosial							
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Penyandang disabilitas terlantar	18,90	18,90	5,14	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Anak terlantar	0,40	0,40	0,12	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Lanjut usia terlantar	5,30	5,30	0,84	100	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Gelandangan dan pengemis	100	100	100	100	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota	Korban bencana daerah	100	100	100	100	100

Sumber data: Laporan Penerapan SPM Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023.

2.3.4 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk



mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adapun capaian kinerja AKIP Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Nilai AKIP Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018 <i>(data awal)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai AKIP	65,16 (B)	67,53 (B)	67,60 (B)	67,77 (B)	68,18 (B)	68,72 (B)

Sumber data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023.

(CC = Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar, B = Baik dan perlu sedikit perbaikan)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama enam tahun terakhir yakni Tahun 2018-2023 cenderung naik, hal ini menggambarkan bahwa penggunaan APBD di Kabupaten Bungo efektif, efisien, fokus, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dalam kata lain penggunaan APBD Kabupaten Bungo dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.3.5 *Monitoring Center for Prevention (MCP)*

Untuk mengurangi tindak korupsi yang terjadi di Pemerintah Daerah (Pemda) upaya KPK untuk pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui *Monitoring Center For Prevention (MCP)*. MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Adapun nilai indeks MCP di Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.23
Nilai MCP Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023

No	Tahun	Nilai Indeks	Zona	Peringkat se- Provinsi Jambi
1	2018 <i>(data awal)</i>	57%	Biru	5
2	2019	71%	Biru	6
3	2020	72%	Biru	5
4	2021	78%	Hijau	9
5	2022	82%	Hijau	3
6	2023	84%	Hijau	4

Sumber data: Inspektorat Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Dapat dilihat nilai indeks MCP Kabupaten Bungo terus mengalami perbaikan sebelumnya pada Tahun 2018 nilai indeks Kabupaten Bungo sebesar 57 persen dan masuk zona biru, terakhir pada Tahun 2023 menjadi 84 persen dan masuk kedalam zona hijau bahkan menjadi peringkat ke-4 dari 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam pencegahan tindak korupsi. Hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo terus berupaya dalam melakukan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih.

2.3.6 Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya. Melalui pelaksanaan survey ini diharapkan akan diketahui sejauhmana perkembangan kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) maupun Unit Pelayanan Publik (UPP). Hasil pengukuran tertuang dalam nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai cerminan kualitas pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat, berdasarkan hasil survei pada 4 (empat) fokus pelayanan yang menjadi prioritas pembangunan, seperti: 1). layanan pendidikan; 2). layanan kesehatan; 3). layanan ekonomi; dan 4). layanan infrastruktur masih dalam kriteria pelayanan yang baik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.24
Hasil Survei IKM Tahun 2018-2023

No	Tahun	Nilai IKM terhadap Pemerintah Daerah
1	2018 <i>(data awal)</i>	70,10
2	2019	70,30
3	2020	70,50
4	2021	70,80
5	2022	71,70
6	2023	69,54

Sumber data: Dokumen LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Bungo cenderung meningkat dan secara mutu pelayan dikategorikan dengan kepuasan yang Baik.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

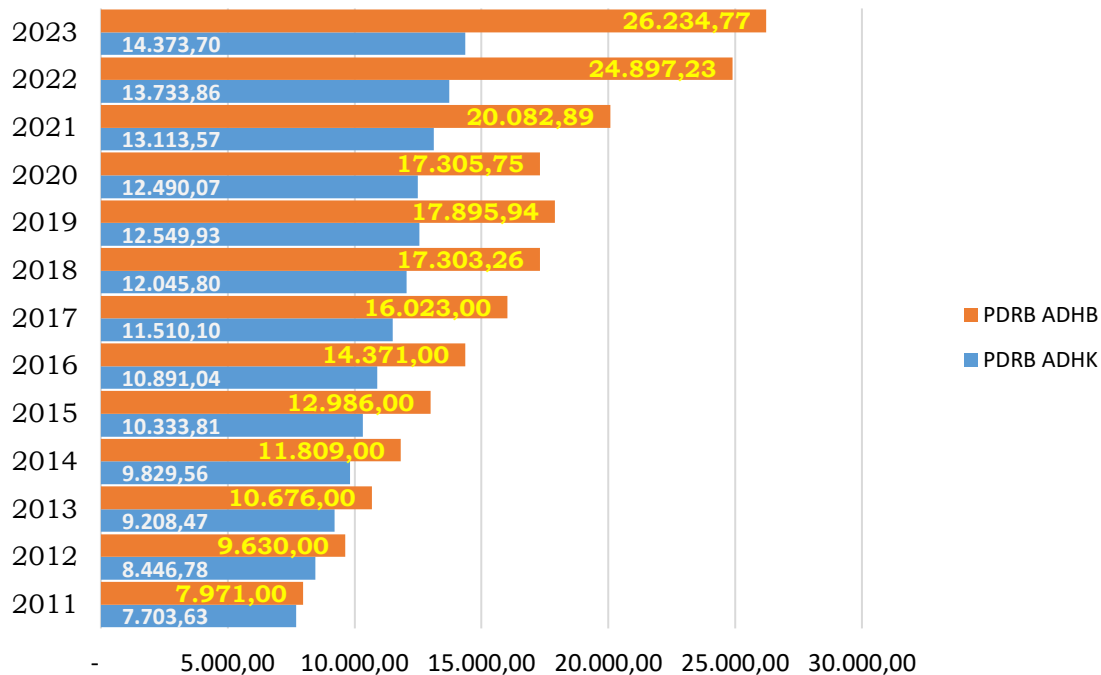
2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB pada dasarnya merupakan produk domestik bruto (PDB) yang dikonversi dan dihitung untuk masing-masing wilayah/daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Secara umum, PDRB menjadi salah satu indikator kinerja perekonomian suatu daerah yang sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah.

PDRB Kabupaten Bungo selama enam Tahun terakhir PDRB ADHK dan ADHB menunjukkan trend pertumbuhan positif. Adapun data perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo selama Tahun 2011-2023 baik PDRB ADHK dan PDRB ADHB dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.20
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023
(Milyar Rupiah)



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

Nilai PDRB ADHB (atas dasar harga berlaku) dan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) dari Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023 di Kabupaten Bungo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pertumbuhan signifikan PDRB ADHB dari 7.971,00 pada Tahun 2011 menjadi 26.234,77 pada Tahun 2023, sementara PDRB ADHK dari 7.703,63 pada Tahun 2011 menjadi 14.373,70 pada Tahun 2023. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang substansial.

Pada tahun 2020 terlihat perlambatan pertumbuhan, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19, namun pemulihan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun fluktuasi laju pertumbuhan, PDRB ADHB dan PDRB ADHK menunjukkan tren positif yang konsisten, menandakan ketahanan ekonomi yang baik.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

Tabel 2.25

PDRB ADHK Kabupaten Bungo Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Periode Tahun 2018-2023

Lapangan Usaha		2018		2019		2020		2021		2022*		2023**	
		Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.394,65	19,88	2.511,60	20,01	2.580,93	20,66	2.672,37	20,38	2.790,24	20,32	2.936,80	20,43
2	Pertambangan dan Penggalian	2.828,10	23,48	2.827,59	22,53	2.794,33	22,37	2.977,43	22,70	3.229,28	23,51	3.303,87	22,99
3	Industri Pengolahan	789,54	6,55	815,17	6,50	821,39	6,58	858,20	6,54	863,63	6,28	898,00	6,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,83	0,04	5,12	0,04	5,45	0,04	5,62	0,04	5,97	0,04	6,57	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,37	0,20	25,34	0,20	26,42	0,21	28,46	0,22	29,13	0,21	30,30	0,21
6	Konstruksi	1.492,61	12,39	1.595,82	12,72	1.502,72	12,03	1.579,89	12,05	1.600,17	11,65	1.660,01	11,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan Sepeda Motor	1.458,86	12,11	1.535,78	12,24	1.452,17	11,63	1.552,55	11,84	1.631,05	11,88	1.780,99	12,39
8	Transportasi dan Pergudangan	302,90	2,51	322,68	2,57	309,15	2,48	328,00	2,50	353,47	2,57	379,50	2,64
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	300,91	2,50	323,46	2,58	307,93	2,47	317,74	2,42	342,27	2,49	370,95	2,58
10	Informasi dan Komunikasi	590,94	4,91	635,55	5,06	688,37	5,51	720,57	5,49	784,27	5,71	841,89	5,86
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	443,40	3,68	449,29	3,58	488,36	3,91	527,97	4,03	522,92	3,81	525,42	3,66
12	Real estate	278,57	2,31	294,44	2,35	293,29	2,35	304,15	2,32	321,87	2,34	333,12	2,32
13	Jasa Perusahaan	23,26	0,19	24,22	0,19	23,91	0,19	24,02	0,18	27,39	0,20	30,86	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	364,68	3,03	385,72	3,07	371,26	2,97	368,45	2,81	369,27	2,69	386,05	2,69
15	Jasa Pendidikan	583,59	4,84	622,78	4,96	645,72	5,17	652,28	4,97	663,25	4,83	676,97	4,71
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,81	0,72	94,53	0,75	100,61	0,81	115,68	0,88	114,17	0,83	120,93	0,84
17	Jasa Lainnya	77,79	0,65	80,87	0,64	78,06	0,62	80,20	0,61	85,52	0,62	91,47	0,64
Produk Domestik Regional Bruto		12.045,80	100	12.549,93	100	12.490,07	100	13.113,57	100	13.733,86	100	14.373,70	100

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS.

(* angka sementara, ** angka sangat sementara)



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

Tabel 2.26

PDRB ADHB Kabupaten Bungo Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Periode Tahun 2018-2023

Lapangan Usaha		2018		2019		2020		2021		2022*		2023**	
		Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%	Miliar (Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.637,25	21,02	3.853,85	21,53	4.133,85	23,89	4.863,30	24,22	5.553,39	22,31	6.211,09	23,68
2	Pertambangan dan Penggalian	3.044,99	17,60	2.577,11	14,40	1.655,35	9,57	2.771,81	13,80	5.909,69	23,74	5.324,95	20,30
3	Industri Pengolahan	1.027,00	5,94	1.064,11	5,95	1.152,00	6,66	1.334,79	6,65	1.455,12	5,84	1.564,09	5,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,29	0,06	11,26	0,06	12,07	0,07	12,51	0,06	13,61	0,05	15,50	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	32,04	0,19	33,73	0,19	35,25	0,20	38,87	0,19	40,98	0,16	46,25	0,18
6	Konstruksi	2.190,25	12,66	2.381,69	13,31	2.317,85	13,39	2.467,44	12,29	2.602,63	10,45	2.802,04	10,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan Sepeda Motor	2.656,30	15,35	2.844,78	15,90	2.752,60	15,91	3.056,05	15,22	3.388,33	13,61	3.922,03	14,95
8	Transportasi dan Pergudangan	426,85	2,47	463,50	2,59	425,73	2,46	458,59	2,28	529,48	2,13	618,48	2,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	459,90	2,66	499,28	2,79	466,38	2,69	496,40	2,47	543,47	2,18	596,51	2,27
10	Informasi dan Komunikasi	871,16	5,03	947,12	5,29	1.020,81	5,90	1.070,98	5,33	1.163,19	4,67	1.245,20	4,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	675,82	3,91	704,74	3,94	761,68	4,40	874,87	4,36	939,44	3,77	964,89	3,68
12	Real estate	448,03	2,59	487,30	2,72	491,67	2,84	515,17	2,57	573,64	2,30	606,09	2,31
13	Jasa Perusahaan	37,03	0,21	39,71	0,22	39,99	0,23	41,35	0,21	52,27	0,21	62,01	0,24
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	746,62	4,31	852,62	4,76	853,66	4,93	839,42	4,18	840,68	3,38	888,29	3,39
15	Jasa Pendidikan	834,14	4,82	913,16	5,10	958,07	5,54	984,97	4,90	1.022,75	4,11	1.066,47	4,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,18	0,62	118,57	0,66	127,48	0,74	149,97	0,75	150,30	0,60	164,59	0,63
17	Jasa Lainnya	98,30	0,57	103,41	0,58	101,30	0,59	106,39	0,53	118,25	0,47	136,30	0,52
Produk Domestik Regional Bruto		17.303,26	100	17.895,94	100	17.305,75	100	20.082,89	100	24.897,23	100	26.234,77	100

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS.

(* angka sementara, ** angka sangat sementara)

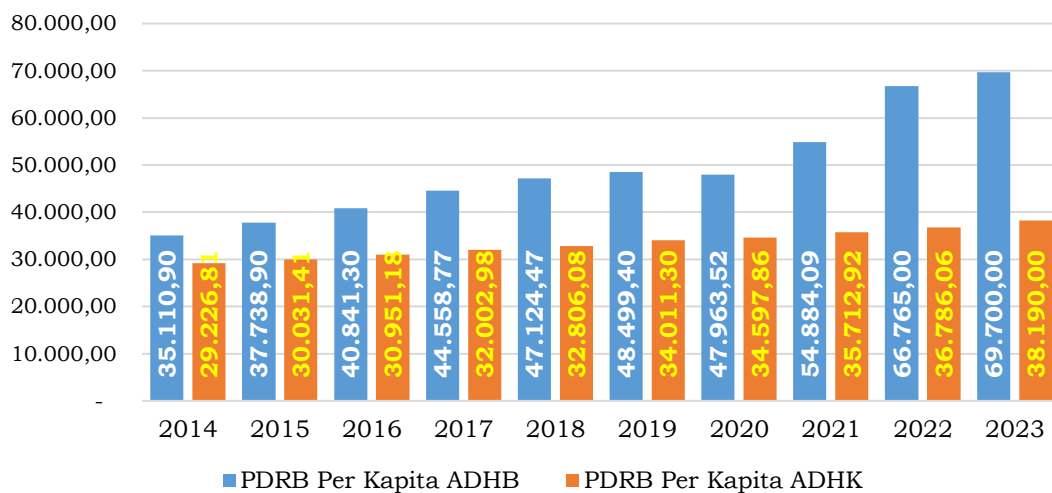


Tabel di atas menunjukkan kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bungo menurut Lapangan Usaha enam Tahun terakhir adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata kontribusi 22,93 persen dan yang terendah adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata kontribusi 0,06 persen, sedangkan untuk PDRB ADHB enam Tahun terakhir sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi tertinggi dengan rata-rata kontribusi 22,78 persen dan yang terendah sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata kontribusi 0,06 persen.

2. PDRB per Kapita

Untuk mengetahui tingkat perekonomian di Kabupaten Bungo dalam lingkup makro atau sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa adalah melalui PDRB perkapita. Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan PDRB per kapita.

Gambar 2.21
PDRB Perkapita Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023
(Ribu Rupiah)



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

PDRB Per Kapita ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) dan ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) di Kabupaten Bungo menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. PDRB Per Kapita ADHB meningkat dari 35.110,90 pada Tahun 2014 sebagai data awal

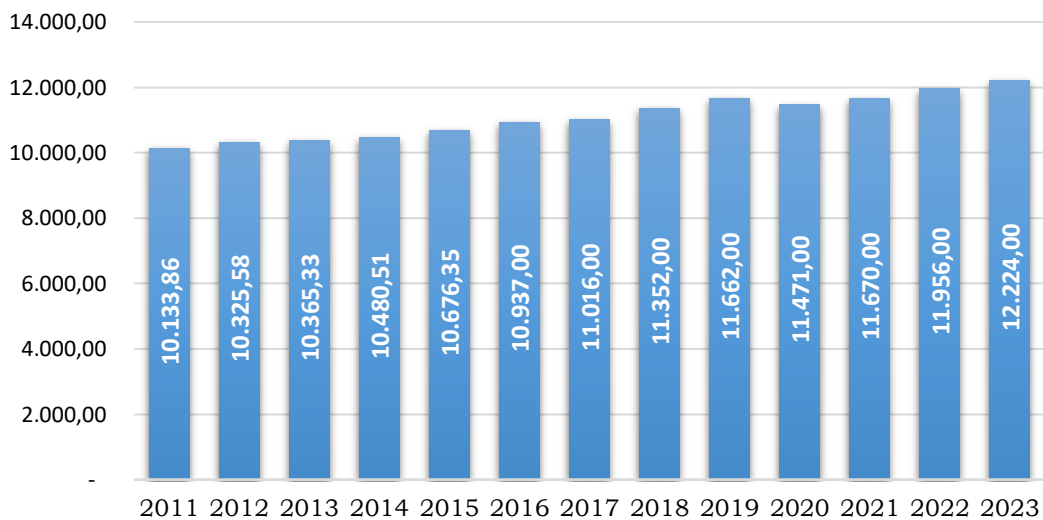


menjadi 69.700,00 pada Tahun 2023, hal ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Peningkatan nilai PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK mengindikasikan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi rata-rata penduduk di Kabupaten Bungo.

2. Indikator Pengeluaran per Kapita

Perkembangan daya beli penduduk Kabupaten Bungo menggambarkan kesejahteraan sosial penduduk secara agregat wilayah. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.22
Pengeluaran PerKapita Kabupaten Bungo
Tahun 2011-2023
(Ribu Rupiah/Orang/Tahun)



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

Data di atas menunjukkan adanya tren kenaikan pengeluaran per kapita yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan biaya hidup atau peningkatan daya beli dan konsumsi yang terus menerus. Peningkatan tahunannya relatif sederhana, dengan peningkatan terbesar muncul antara tahun 2022



dan 2023. Pengeluaran pada tahun 2023 secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya tekanan inflasi, peningkatan tingkat pendapatan, atau pola pengeluaran yang lebih tinggi.

3. Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan. Cakupan PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Adapun pertumbuhan implisit pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga selama kurun waktu lima Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27
Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir
Rumah Tangga Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023

No	Kelompok Konsumsi	Tahun (persen)					
		2018 <i>(data awal)</i>	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	2,64	5,27	2,12	5,49	8,48	3,93
2	Pakaian dan Alas Kaki	2,66	3,01	0,41	1,28	1,05	0,97
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,83	0,09	-0,68	1,16	2,74	1,62
4	Kesehatan & Pendidikan	3,47	4,04	-0,70	1,30	0,45	1,09
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,34	2,45	1,82	1,23	7,87	5,25
6	Hotel & Restoran	3,80	1,75	6,68	1,25	2,19	1,49
7	Lainnya	3,58	2,41	2,38	4,56	8,18	3,35
Total Konsumsi		3,34	3,44	1,16	3,04	5,71	3,17

Sumber data: PDRB Kabupaten Bungo, BPS Tahun 2024.
(* angka sementara, ** angka sangat sementara)



Pada tahun 2023 konsumsi rumah tangga paling tinggi pada konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya dan paling sedikit pada pakaian dan alas kaki, sementara pada tahun 2022 konsumsi rumah tangga paling tinggi pada makanan, minuman dan rokok dan paling sedikit pada pendidikan dan kesehatan. Dari tahun 2018-2023 total konsumsi tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2020.

4. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir, terdiri dari pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Bungo serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.28
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun					
	2018 <i>(data awal)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Total Konsumsi Pemerintah						
a. ADHB (Milyar Rp)	1.107,86	1.206,91	1.196,06	1.223,30	1.255,87	1.319,69
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	716,39	781,09	747,06	744,21	751,80	768,22
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	6,40	6,74	6,91	6,09	5,04	5,03
Pertumbuhan Total konsumsi pemerintah	5,09	9,03	-4,36	-0,38	1,02	2,18
Jumlah Penduduk (jiwa)	367.182	368.993	361.007	367.194	373.344	376.382

Sumber data: PDRB Kabupaten Bungo, BPS Tahun 2024.
(* angka sementara, ** angka sangat sementara)

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK. Pada Tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 1.107,86 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga



pada Tahun 2023 nilainya mencapai 1.319,69 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010 yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun yaitu sebesar 716,39 miliar Rupiah di Tahun 2018 hingga mencapai 768,22 miliar rupiah pada Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2018 sebesar 6,40 dan pada Tahun 2023 sebesar 5,03 persen. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2019 dengan angka sebesar 9,03 persen. Namun pertumbuhan mengalami perlambatan menjadi 2,18 persen pada Tahun 2023.

5. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Perkembangan tingkat kesejahteraan juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan, dimana semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Semakin besar persentase pengeluaran non-makanan, mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang semakin baik. Adapun rata-rata pengeluaran perkapita sebulan disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.29

Persentase Pengeluaran per Kapita Non-Pangan Sebulan
Menurut Komoditi di Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023

No	Kelompok Komoditi	Tahun					
		2018 <i>(data awal)</i>	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	23,39	23,18	24,91	23,92	23,37	22,78
2	Aneka Komoditi dan Jasa	8,98	10,46	9,89	9,53	9,51	9,98
3	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	4,15	4,49	4,78	4,19	4,05	4,03
4	Komoditas Tahan Lama	7,60	4,94	4,31	5,28	6,27	4,18
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	1,99	2,49	2,72	3,49	3,35	3,37
6	Keperluan Pesta dan Upacara	1,19	2,74	1,51	0,88	1,72	1,62
Jumlah		47,30	48,30	48,13	47,29	48,27	45,96

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa pengeluaran per kapita non-pangan selama kurun enam Tahun terakhir paling banyak pada kelompok komoditi perumahan dan fasilitas rumah tangga dengan rerata persentase pengeluaran sebesar 22,78 persen dan paling sedikit untuk pengeluaran keperluan pesta dan upacara dengan rerata persentase pengeluaran sebesar 1,62 persen, serta pengeluaran per kapita non-pangan terbanyak terjadi pada Tahun 2019.

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak aktifitas suatu daerah, dimana penduduk daerah yang bersangkutan itulah yang menjalankan segala aktifitas, seperti perpolitikan, perekonomian dan lain-lain. Selain menjalankan roda-roda pemerintahan, penduduk juga mengelola segala sumber daya alam yang menjadi kekayaan bagi daerah yang bersangkutan.

Komposisi penduduk menggambarkan kekuatan sumberdaya manusia suatu daerah dalam pembangunan. Semakin besar tenaga kerja maka akan semakin mendukung dalam pembangunan.



Meskipun demikian, bila bonus demografi tersebut tidak dikelola dengan baik maka angka usia produktif tersebut justru akan mengganggu stabilitas pembangunan.

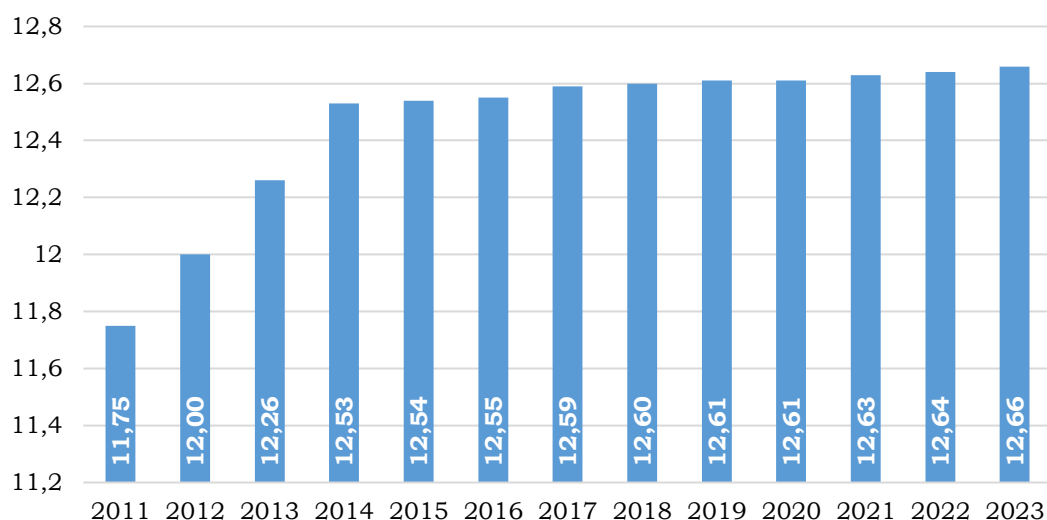
1. Indikator Pendidikan

Dalam hal pengukuran indeks pendidikan, pertumbuhannya ditentukan oleh beberapa variabel. Pada penghitungan metode baru, variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks pendidikan meliputi:

A. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 Tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Selama Tahun 2011-2023 harapan lama sekolah di Kabupaten Bungo terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 2.23
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023
(Tahun)



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

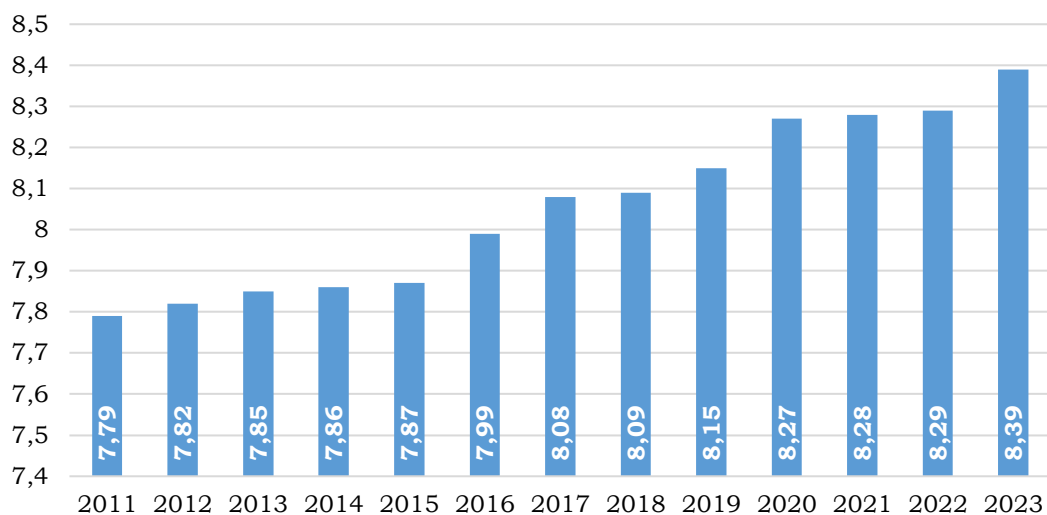


Tren peningkatan yang konsisten dalam Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Bungo dari 11,75 Tahun pada 2011 sebagai data awal menjadi 12,66 Tahun pada 2023. Peningkatan total sebesar 0,91 tahun selama periode 12 tahun menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam aspek pendidikan. HLS mencapai lebih dari 12 tahun sejak Tahun 2012, ini menandakan rata-rata penduduk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA atau sederajat, bahkan memiliki peluang untuk bersekolah setara dengan Diploma I. Peningkatan yang konsisten mengindikasikan adanya kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan efektif.

B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bungo selama periode Tahun 2011-2023 dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 2.24
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023
(Tahun)



Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Tren peningkatan yang konsisten Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bungo dari 7,79 tahun pada Tahun 2011 sebagai data awal menjadi 8,39 tahun pada Tahun 2023. Peningkatan terjadi secara



bertahap, dengan kenaikan rata-rata sekitar 0,05 tahun per tahun. Peningkatan yang stabil mengindikasikan efektivitas kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo. Meski terus mengalami peningkatan, namun RLS Kabupaten Bungo belum mencapai 9 tahun (setara dengan lulus SMP).

C. Ketersediaan Sekolah

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bungo, tentunya membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, salah satunya melalui penambahan jumlah sekolah. Dengan bertambahnya jumlah sekolah dan jumlah ruang kelas akan berpengaruh terhadap peningkatan daya tampung murid. Perkembangan pembangunan sekolah baru pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.30
Jumlah Sekolah di Kabupaten Bungo dari Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					
		2018 (Tahun Awal)	2019	2020	2021	2022	2023
1.	TK Negeri	3	3	3	3	3	3
2.	TK Swasta	61	50	65	65	81	94
3.	SDLB	1	1	1	1	1	1
4.	SD Negeri	225	226	227	227	227	227
5.	SD Swasta	9	12	13	13	14	13
6.	SMP Negeri	56	55	55	55	55	55
7.	SMP Swasta	6	6	8	8	8	9
8.	MTs Negeri	8	8	8	8	8	8
9.	MTs Swasta	28	29	29	30	30	31
10.	SMA Negeri	20	20	20	20	20	19
11.	SMA Swasta	3	3	3	3	3	2
12.	MA Negeri	3	3	3	3	3	4
13.	MA Swasta	17	18	18	18	18	19
14.	SMK Negeri	12	12	12	12	12	13
15.	SMK Swasta	9	9	9	9	9	6
16.	Perguruan Tinggi Swasta	5	6	6	6	6	6

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tahun 2024.



Dari tabel di atas menyajikan gambaran perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Bungo dari tahun 2018 hingga 2023. Selama periode ini, lanskap pendidikan di Kabupaten Bungo mengalami beberapa perubahan yang menarik. Salah satu tren yang paling mencolok adalah pertumbuhan pesat jumlah TK Swasta. Dari 61 sekolah pada tahun 2018, jumlahnya melonjak hingga 94 pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan minat yang kuat terhadap pendidikan anak usia dini di sektor swasta.

Sementara itu, sektor pendidikan negeri menunjukkan stabilitas yang konsisten. Jumlah SD Negeri, misalnya, bertahan di angka 227 sejak tahun 2019. Demikian pula dengan SMP dan SMA Negeri yang jumlahnya tidak berubah selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga ketersediaan akses pendidikan dasar dan menengah. Di sisi lain, beberapa jenis sekolah swasta mengalami fluktuasi. SD Swasta, contohnya, sempat mengalami kenaikan dari 9 menjadi 14 sekolah, namun kemudian turun menjadi 13 pada tahun 2023. SMK Swasta juga mengalami penurunan dari 9 menjadi 6 sekolah pada tahun terakhir.

Perkembangan menarik lainnya adalah kemunculan Perguruan Tinggi Swasta pada tahun 2022, yang menambah dimensi baru dalam ekosistem pendidikan di Kabupaten Bungo. Meskipun jumlahnya masih terbatas, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi di daerah tersebut. Madrasah Aliyah (MA) Swasta juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 17 menjadi 19 sekolah, mengindikasikan minat yang tumbuh terhadap pendidikan menengah berbasis agama.

2. Indikator Kesehatan

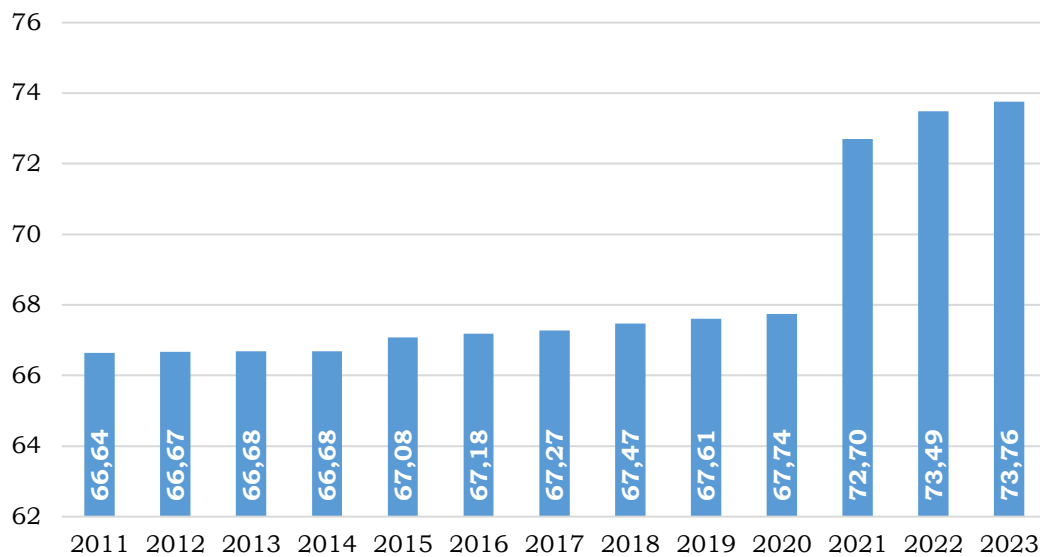
A. Umur Harapan Hidup (UHH)

Kesejahteraan sosial penduduk salah satunya tercermin dari nilai indeks kesehatan. Untuk variabel yang digunakan dalam penghitungan indeks kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH).



Data angka UHH Kabupaten Bungo dari Tahun 2011-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.25
Angka Umur Harapan Hidup (UHH)
Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023
(Tahun)



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.

Berdasarkan grafik di atas dapat diinformasikan bahwa capaian Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Bungo terus meningkat secara bertahap dari Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023. Nilai UHH selama 12 tahun telah meningkat dari 66,64 pada Tahun 2011 menjadi 73,76 pada Tahun 2023, hal ini menunjukkan peningkatan sekitar 10,68 persen.

B. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun fasilitas kesehatan kesehatan di Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.31
Fasilitas Kesehatan
di Kabupaten Bungo s.d Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	4
2	Rumah Sakit Khusus	1
3	Rumah Sakit Bersalin	1
4	Puskesmas Rawat Inap	6
5	Puskesmas non-Rawat Inap	13
6	Puskesmas Pembantu (Pustu)	61
7	Puskesmasdes	69
8	Posyandu	154
9	Klinik/Balai Kesehatan	19
10	Pondok Bersalin Desa	62

Sumber Data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Dari 3 rumah sakit umum di Kabupaten Bungo terhadap 1 rumah sakit umum milik pemerintah daerah dengan kategori rumah sakit tipe B. Selain itu, disetiap Kecamatan dalam Kabupaten Bungo terdapat 1 puskesmas kecuali Kecamatan Pelepat dan Pelepat Ilir terdapat 2 puskesmas, serta semua dusun telah memiliki Posyandu dan Posyandu berklasifikasi Purnama Mandiri sebanyak 178 Posyandu. Diharapkan dengan fasilitas yang merata dapat menjangkau semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

3. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Tenaga kerja merujuk pada seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Data tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.32
Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Bungo Tahun 2019-2023

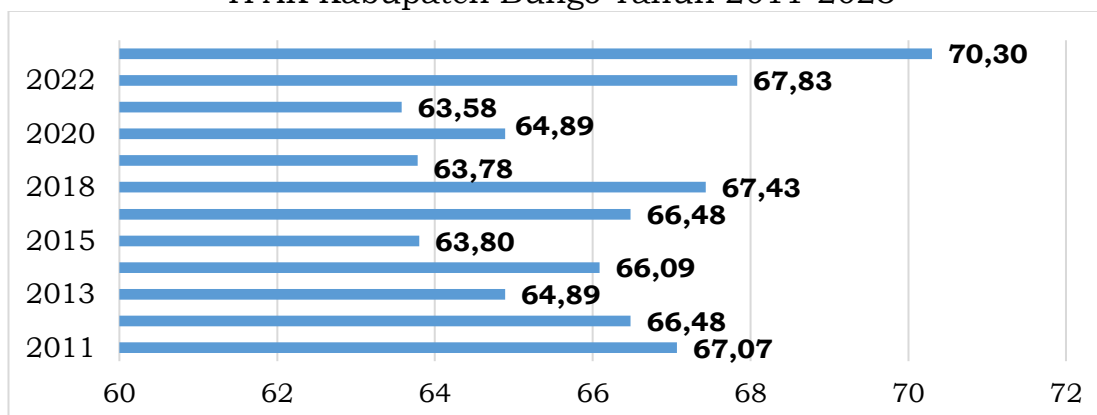
No	Tahun	Tingkat Pendidikan			
		SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	Perguruan Tinggi
1	2019 (data awal)	65.840	31.596	47.512	22.075
2	2020	68.341	33.796	47.617	18.763
3	2021	64.639	31.831	50.075	21.810
4	2022	77.947	39.797	51.692	14.195
5	2023	75.982	33.577	58.480	17.960
Jumlah		352.749	170.597	255.376	94.803

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Bungo kurun waktu empat Tahun terakhir masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD/MI. Jika dipersentasekan total tenaga kerja tingkat pendidikan SD/MI sebesar 40,38 persen, SMP/MTs sebesar 19,53 persen, SMA/SMK/MA sebesar 29,24 persen, dan Perguruan Tinggi sebesar 10,85 persen.

Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Adapun nilai TPAK di Kabupaten Bungo pada Tahun 2011-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.26
TPAK Kabupaten Bungo Tahun 2011-2023



Sumber data: BPS Kabupaten Bungo.



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa TPAK Kabupaten Bungo dari Tahun 2011 sebagai data awal hingga Tahun 2023 cenderung fluktuatif, hal ini menandakan adanya perubahan dinamis dalam jumlah angkatan kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan di Kabupaten Bungo.

4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 Tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 Tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 Tahun. Rasio ketergantungan memiliki dua fungsi sebagai berikut:

1. Indikator demografi artinya perhitungan rasio ketergantungan bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila *dependency ratio* tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula.
2. Indikator keadaan ekonomi artinya lewat perhitungan ini, bisa diketahui apakah suatu daerah sudah tergolong maju atau masih di tahap negara berkembang.

Dampak yang terjadi jika rasio ketergantungan di suatu daerah dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Rasio ketergantungan ada 3 jenis, yaitu (1) Rasio Ketergantungan Total/ *Dependency Ratio (DR)*, (2) Rasio Ketergantungan Usia Belum Produktif/ *Child Dependency Ratio (CDR)*, (3) Rasio Ketergantungan Usia Tidak Produktif/ *Aged Dependency Ratio (ADR)*. Adapun data rasio ketergantungan Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.33
Rasio Ketergantungan DR, CDR dan ADR
Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Usia (Tahun)			Rasio Ketergantungan		
	0 - 14	15 - 64	65 keatas	DR	CDR	ADR
2018 <i>(data awal)</i>	104.440	247.825	14.917	48,16	42,14	6,02
2019	104.992	253.870	15.484	47,46	41,36	6,10
2020	101.159	245.720	15.484	47,47	41,17	6,30
2021	101.437	249.115	16.642	47,40	40,72	6,68
2022	102.092	253.335	17.917	47,37	40,30	7,07
2023	97.916	259.352	19.114	45,12	37,75	7,37

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2023 (diolah).

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan pada tabel diatas untuk Tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk Rasio Ketergantungan Total (DR) pada Tahun 2023 menjelaskan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bungo menanggung 45-46 penduduk usia belum produktif/tidak produktif di Kabupaten Bungo.
2. Untuk Rasio Ketergantungan Usia Belum Produktif (CDR) pada Tahun 2023 menjelaskan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bungo menanggung 37-38 anak yang belum masuk usia produktif di Kabupaten Bungo.
3. Untuk Rasio Ketergantungan Usia Tidak Produktif (ADR) pada Tahun 2023 menjelaskan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 7-8 orang berusia tidak produktif di Kabupaten Bungo.

2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

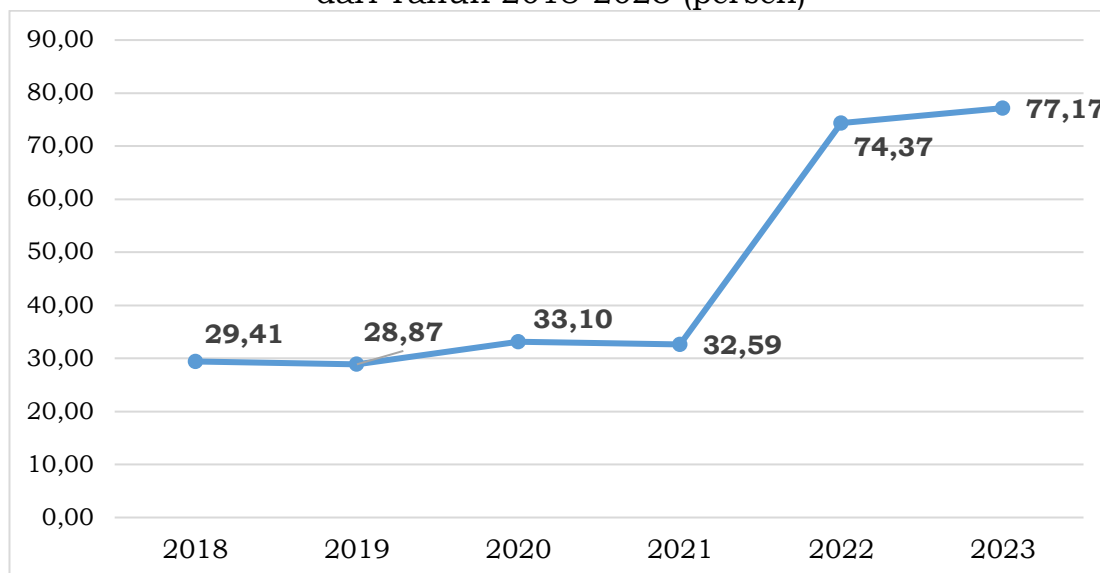
1. Indeks Infrastruktur Daerah

Sektor infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu pendorong aktivitas pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mempercepat pengembangan suatu wilayah, karena dengan infrastruktur yang handal aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan



terus meningkat dan berkembang, Adapun nilai indeks infrastruktur daerah Kabupaten Bungo dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.27
Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Bungo
dari Tahun 2018-2023 (persen)



Sumber data: Dokumen LKj Kabupaten Bungo.

Berdasarkan tabel di atas capaian indeks infrastruktur daerah Kabupaten Bungo dari Tahun 2018 sebagai data awal hingga Tahun 2023 cenderung naik, hal ini menjelaskan bahwa infrastruktur di Kabupaten Bungo setiap Tahunnya mengalami perbaikan. Komponen yang menjadi perhitungan indeks infrastruktur, yaitu (1) kualitas pelayanan publik bidang ke PU-an yang terdiri dari irigasi kondisi baik, akses air minum, drainase kondisi baik, gedung daerah kondisi baik, jalan kondisi mantap, jembatan kondisi baik, dan ketaatan terhadap RTRW; (2) kualitas sektor perhubungan yang terdiri dari pengendalian dna pengawasan lalu lintas, pengembangan teknik sarana dan pembangunan prasarana serta informasi perhubungan, pelayanan angkutan, koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan bandara dan administrasi; dan (3) pelayanan informasi publik yang terdiri dari informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media dan jaringan OPD yang terintegrasi.



2. Ketaatan terhadap RTRW

Penataan ruang merupakan bagian dari sistem perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna, berdaya guna dan mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Adapun landasan hukum dan pedoman pendukung tata ruang merujuk kepada:

- a. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- b. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; dan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Perlunya acuan dalam merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang daerah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk menghadapi perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik serta pesatnya pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu terakhir memberikan dampak baik secara nasional maupun regional.

Meningkatnya volume bencana alam, kemacetan arus transportasi, meluasnya kawasan kumuh, berkurangnya persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) diwilayah perkotaan serta perambahan hutan akan menguatkan pentingnya penerapan penataan ruang yang seimbang dan sesuai dengan daya dukung lingkungan demi kelangsungan ekosistem dan Sumber Daya Alam. Letak geografis yang strategis menjadikan Kabupaten Bungo memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup pesat. Oleh sebab itu, penataan ruang memegang peran yang sangat penting guna mengatasi tingkat pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Hal yang mungkin bisa timbul dari kondisi tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perencanaan yang matang dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pola penataan



ruang yang serasi, selaras dan seimbang serta tetap mendukung kelestarian lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Bungo telah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bungo sesuai amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bungo meliputi:

1. Pemantapan peran dan fungsi Perkotaan Muara Bungo sebagai Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) yang menjadi pusat orientasi pelayanan bagi Kawasan Barat Provinsi Jambi dan Pusat Pelayanan Primer Provinsi Jambi;
2. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah Kabupaten Bungo;
4. Perwujudan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
5. Pembukaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
6. Pengembangan kawasan budidaya; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Tabel 2.34
Persentase Rencana dan Realisasi Tata Ruang
dari Tahun 2018-2023

No	Tahun	Rencana Tata Ruang	Realisasi Yang Sesuai Tata Ruang	Persen
1	2018 <i>(data awal)</i>	91	39	42,86
2	2019	91	41	45,05
3	2020	91	42	46,15
4	2021	91	42	46,15
5	2022	91	43	47,25
6	2023	91	45	49,45

Sumber data: Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo Tahun 2024.



Terhadap regulasi yang telah dibuat, seyogyanya dapat dikawal untuk mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang, karena kesalahan dalam pemanfaatan ruang akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada masa mendatang. Kepatuhan terhadap regulasi yang telah dibuat harus menjadi salah satu persyaratan dalam melaksanakan pembangunan. Sampai dengan Tahun 2023, persentase kepatuhan terhadap dokumen RTRW adalah sebesar 49,45 persen.

3. Jumlah Orang dan Barang melalui Bandara/Terminal

A. Terminal Bus Muara Bungo

Terminal bus adalah prasarana untuk angkutan jalan raya guna untuk mengatur kedatangan pemberangkatan pangkalannya kendaraan umum serta memuat atau menurunkan penumpang atau barang. Terminal Bus Muara Bungo kategori terminal tipe A yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III, terminal ini berfungsi untuk mengangkut barang dan penumpang. Adapun banyaknya bus, truk barang dan penumpang yang berangkat melalui Terminal Tipe A Muara Bungo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.35
Banyaknya Bus dan Penumpang yang Berangkat melalui
Terminal Tipe A Muara Bungo dari Tahun 2018-2023

No	Tahun	Bus	Penumpang
1	2018 (data awal)	15.570	16.592
2	2019	18.699	13.454
3	2020	21.511	5.274
4	2021	21.511	5.274
5	2022	36.540	18.148
6	2023	26.825	610.416

Sumber data: Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa penumpang yang berangkat melalui terminal tipe A Muara Bungo dari Tahun 2018-2021 cenderung menurun, namun pada Tahun 2023 kembali meningkat.



B. Bandar Udara Muara Bungo

Bandar Udara (Bandara) Muara Bungo adalah bandara yang berlokasi di Dusun Sungai Buluh Kecamatan Rimbo Tengah atau sekitar 20 menit dari pusat Kota Muara Bungo. Bandara ini mulai beroperasi terhitung sejak tanggal 25 November 2012 termasuk kategori bandara domestik dan kelas bandara kelas III serta pengelola bandara UPT Ditjen Perhubungan Udara. Adapun jumlah lalu lintas penumpang dan barang melalui Bandara Muara Bungo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.36
Jumlah Lalu Lintas Penumpang dan Barang Melalui
Bandara Muara Bungo Tahun 2018-2023

Tahun	Penumpang (orang)		Bagasi (Kg)		Barang (Kg)	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
2018 <i>(data awal)</i>	47.080	51.053	399.382	360.140	25.070	5.322
2019	46.525	51.494	311.592	273.463	95.978	12.073
2020	9.200	8.673	55.490	41.571	70.717	389
2021	859	926	7.211	6.725	22	28
2022	11.007	12.298	99.777	98.002	728	693
2023	13.220	13.146	112.025	93.951	1.619	260
Jumlah	127.891	137.590	985.477	873.852	194.134	18.765

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Dari tabel di atas menjelaskan dari Tahun 2018-2023 jumlah penumpang, bagasi, dan barang yang datang dan berangkat melalui Bandara Muara Bungo cenderung fluktuatif. Pergerakan pesawat melalui Bandara Muara Bungo sebanyak 282 kali sepanjang Tahun 2023.

4. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perusahaan yang bergerak dalam bidang



keuangan. Adapun daftar bank di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.37
Daftar Bank di Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Jenis Bank	Nama Bank	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jumlah		
1	BUMN	Bank Negara Indonesia	1	1	1	3		
		Bank Rakyat Indonesia	1	9	4	14		
		Bank Mandiri	1	-	1	2		
		Bank Tabungan Negara	1	-	-	1		
2	BUMD	Bank 9 Jambi	1	-	1	2		
3	Bank Swasta	Bank Danamon	1	-	-	1		
		Bank Panin	1	-	-	1		
		Bank Sinarmas	1	-	-	1		
		Bank Muamalat Indonesia	1	-	-	1		
		Bank Batang Hari	1	-	-	1		
		Bank Mega	1	-	-	1		
		Bank Central Asia	1	-	-	1		
		Bank Tabungan Pensiunan Nasional	1	-	-	1		
		Bank Pundi	1	-	-	1		
		Bank Internasional Indonesia	1	-	-	1		
		Bank Sahabat Sampoerna	1	-	-	1		
		Total			16	10	7	33

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2023.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Kabupaten Bungo ada 4 Bank, yaitu (1) Bank Negara Indonesia (BNI), (2) Bank Rakyat Indonesia (BRI), (3) Bank Mandiri, dan (4) Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan untuk Bank



BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) hanya 1 Bank, yaitu Bank 9 Jambi. Untuk Bank Swasta di Kabupaten Bungo ada 11 Bank, yaitu (1) Bank Danamon, (2) Bank Panin, (3) Bank Sinarmas, (4) Bank Muamalat Indonesia, (5) Bank Batang Hari, (6) Bank Mega, (7) Bank Sentral Asia (BCA), (8) Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), (9) Bank Pundi, (10) Bank Internasional Indonesia (BII), dan (11) Bank Sahabat Sampoerna.

5. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak bertanggung membayarkan iuran/kontribusi/ premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan, yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Adapun daftar asuransi di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.38
Daftar Asuransi di Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Nama Asuransi	Tahun 2023
1	Abda Muara Bungo	1
2	Jasindo	1
3	Sinarmas	1
4	Bumiputera 1912	1
5	Bumiputera Muda 1967	1
6	Jamsostek Persero	1
7	Summit Oto Finance	1
8	Artha Prima Finance	1
9	BFI Finance	1
10	Bussan Auto Finance	1
11	BPJS Kesehatan	1
12	BPJS Kesejahteraan	1
13	Mega Central Finance	1
14	Jasa Raharja Putera	1
15	Kesehatan Indonesia Persero	1
16	Bhakti Finance	1
17	Jastan	1
Jumlah		17

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.



Dari tabel diatas menjelaskan jumlah asuransi di Kabupaten Bungo sebanyak 17 asuransi.

6. Jumlah Rumah Makan/Restoran

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Adapun daftar rumah makan/restoran di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.39
Daftar Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut
Kecamatan Tahun 2019-2023

No	Nama Kecamatan	Tahun				
		2019 <i>(data awal)</i>	2020	2021	2022	2023
1	Pelepat	8	8	15	15	6
2	Pelepat Ilir	12	12	20	20	10
3	Bathin II Babeko	8	8	18	18	8
4	Rimbo Tengah	21	21	30	30	20
5	Bungo Dani	25	25	20	20	22
6	Pasar Muara Bungo	55	55	80	80	50
7	Bathin III	16	16	15	15	11
8	Rantau Pandan	6	6	10	10	6
9	Muko-Muko Bathin VII	3	3	10	10	5
10	Bathin III Ulu	-	-	2	2	-
11	Tanah Sepenggal	10	10	20	20	10
12	Tanah Sepenggal Lintas	16	16	25	25	16
13	Tanah Tumbuh	8	8	8	8	8
14	Limbur Lubuk Mengkuang	2	2	1	1	1
15	Bathin II Pelayang	3	3	3	3	3
16	Jujuhan	6	6	10	10	4
17	Jujuhan Ilir	2	2	1	1	1
Jumlah		206	206	330	330	181

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Bungo pada Tahun 2022 meningkat sebanyak 124 rumah makan/restoran dari Tahun 2019. Namun pada



Tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 149 rumah makan/restoran.

7. Fasilitasi Penginapan/Hotel

Penginapan/hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.

Fasilitasi wilayah/infrastruktur terkait penginapan/hotel di Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.40
Nama Penginapan/Hotel, Alamat dan Kelas
di Kabupaten Bungo Tahun 2023

No	Nama Penginapan/Hotel	Alamat	Kelas
1	Hotel One	Jl. H.Hoesen Sa'ad No.07 Bungo Barat, Pasar Muara Bungo Telp. (0747) 21087	Melati 1
2	Hotel Swarnabhumi	Jl. Jend Sudirman No.168, Kel. Batang Bungo, Kec. Pasar Muara Bungo	Melati 1
3	Hotel Amaris	Jl. Sultan Thaha No.103 Bungo Timur, Pasar Muara Bungo Telp. (0747) 321556 Fax.321551	Bintang 2
4	Hotel Indra	Jl. Prof. Sri Soedewi, SH, Pasir Putih, Rimbo Tengah Telp. (0747) 21140	Melati 1
5	Hotel Nora	Jl. Sudirman RT.001 RW.003 Bungo Barat, Pasar Muara Bungo Telp. (0747) 21123	Melati 1
6	Hotel Ketayo	Jl. M.Yamin, SH No.440 Bungo Barat, Pasar Muara Bungo, Telp. (0747) 21329	Melati 1
7	Hotel Anda	Jl. Lintas Sumatera Batang Bungo, Pasar Muara Bungo Telp. (0747) 21226	Melati 1
8	Hotel Merlyn's Garden In	Jl. Kesuma No.5 Bungo Timur, Pasar Muara Bungo Telp. (0747) 21328	Melati 1
9	Penginapan Bunga	Jl. Lebai Hasan Sungai Pinang, Bungo Dani	Melati 1
10	Hotel Pelangi	Jl. Sudirman No.52 Batang Bungo, Pasar Muara Bungo Telp. (0747) 21777	Melati 1



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

No	Nama Penginapan/Hotel	Alamat	Kelas
11	Hotel Ibunda	Jl. Lebai Hasan No.82 Batang Bungo, Pasar Muara Bungo Telp.(0747) 21604	Melati 1
12	Hotel Bintang	Jl. Lebai Hasan Sungai Pinang, Bungo Dani Telp. (0747)22278	Melati 1
13	Hotel Ayudia Pala	Jl. M. Saidi No.661B Bungo Barat, Pasar Muara Bungo Telp.(0747) 322563	Melati 1
14	Hotel Semagi	Jl. Lintas Sumatera No.68 Batang Bungo, Pasar Muara Bungo, Telp.(0747) 322245/322246 Fax. 21133	Bintang 3
15	Hotel Bungo Plaza	Jl. Lintas Sumatera Bungo Barat, Pasar Muara Bungo Telp.(0747)323888	Bintang 3
16	Independence Hotel	Jl. M Saidi No.661 RT.001 RW.001 Bungo Barat, Pasar Muara Bungo Telp.(0747)321666,321900	Bintang 3
17	Assyifa Hotel	Jl.Lintas Sumatera KM.3 Sungai Kerjan, Bungo Dani	Melati 1
18	Hotel S. Marsya	Jl. Rangkayo Hitam No. 7, Cadika, Rimbo Tengah	Melati 1
19	Hotel Sepakat	Jl. Bachsan No. 64 Bungo Timur Pasar Muara Bungo	Melati 1
20	Mitra Hotel Bungo	Jl. RM. Thaher No. 10	Melati 1
21	Ratu Balqis Hotel	Jl. Lintas Sumatera Dusun Sirih Sekapur Perkembangan, Jujuhan	Melati 1
22	Lintas Sumatera Wisma	Jl. Lintas Sumatera KM.9 Ds. Air Gemuruh	Melati 1
23	Permata Hotel	Jl. Rangkayo Hitam, Cadika, Rimbo Tengah	Melati 1
24	Sentosa Hotel	Jl. Lintas Sumatera Bathin III Manggis	Melati 1
25	Bungo Homestay	Jl. Yusuf Alkaaf, Sungai Pinang, Bungo Dani Telp. 081366160172	Melati 1
26	Penginapan Mess QTA	JL. Lintas Sumatera Komplek Wiltop	Melati 1
27	Batang Bungo Hotel	Jl. Lintas Sumatera No.78-81 Telp. 08121898188	Melati 1
28	Hotel Fayadh	Jl. Diponegoro No.2	Melati 1
29	Penginapan Surya	Jl. Lebai Hasan RT.18/RW.03, Kel. Sungai Pinag, Kec. Bungo Dani	Melati 1
30	Wisma Dame	Jl. H. Suud RT.02/RW.05 Kel. Cadika, Kec. Rimbo Tengah	Melati 1
31	Hotel Prolibas Indonesia	Jl. Lintas Sumatera, Simpang Siskaper, Ds.Sirih Sekapur, Kec. Jujuhan	Melati 1



No	Nama Penginapan/Hotel	Alamat	Kelas
32	Hotel Rafa	Jl. Rangkayo Hitam No. 100 Kel. Cadika, Kec. Rimbo Tengah,	Melati 1
33	Lavender Hill Hotel	Jl. Diponegoro, Kel. candika, Kec.rimbo tengah	Melati 1
34	Wisma Alanza	Kec. Cadika, Kec. Rimbo Tengah	Melati 1
35	HSB2	Jl. Jend. Sudirman No.168, Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo	Melati 1
36	Bungo Guest House	Lrg. Merangin No.1, Kel. Bungo Timur, Kec. Pasar Muara Bungo	Melati 1
37	Hotel Bersaudara	Kel. Manggis, Kec. Bathin III	Melati 1

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2023.

Tabel di atas menjelaskan bahwa di Kabupaten Bungo terdapat sebanyak 37 penginapan/hotel yang terdiri dari:

- 3 penginapan/hotel kelas bintang 3.
- 1 penginapan/hotel kelas bintang 2.
- 33 penginapan/hotel kelas melati.

8. Pelayanan Air Bersih/Air Minum

Penyediaan air bersih merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakatnya, baik dengan pengelolaan berbasis bisnis, distribusi, maupun pemberdayaan masyarakat. Sarana akses air bersih bagi masyarakat saat ini sangat bervariasi dari air sumur gali, air sumur bor, PDAM dan mata air pegunungan. Adapun jumlah unit penyalur distribusi air PDAM Pancuran Telago di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.41
Unit Penyalur Distribusi air PDAM Pancuran Telago
di Kabupaten Bungo

No	Unit Penyalur
1	Sungai Pinang Muara Bungo
2	Manggis Muara Bungo
3	Unit Lubuk Landai
4	Unit Tanah Tumbuh



5	Unit Tanjung Agung
6	Unit Teluk Pandak
7	Unit Rantau Ikil
8	Unit Tebing Tinggi
9	Unit Pulau Batu
10	Unit Pulau Batu
11	Mobil Tangki

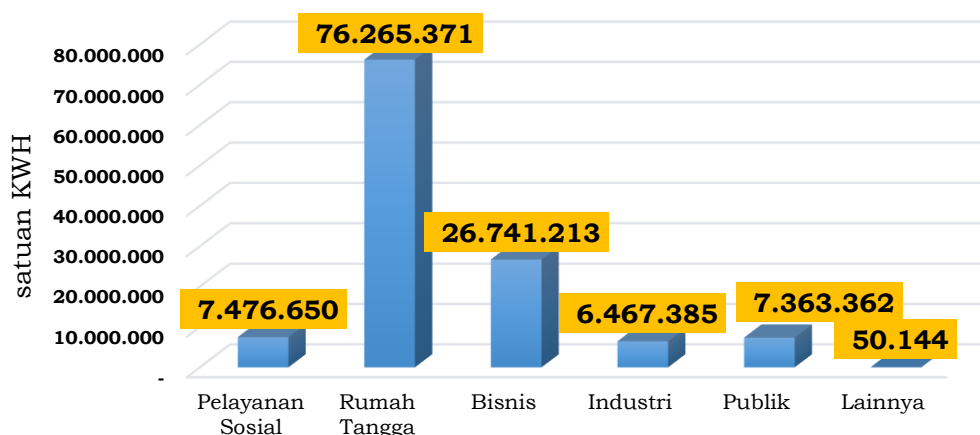
Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa ada sebanyak 11 unit penyalur air bersih/air minum di PDAM Pancuran Telago yang merupakan BUMD Pemerintah Kabupaten Bungo.

9. Kapasitas Tenaga Listrik

Kapasitas listrik terpasang merupakan total kapasitas dari seluruh mesin pembangkit listrik yang dioperasikan. Listrik yang dibangkitkan adalah jumlah listrik yang dibangkitkan oleh seluruh mesin pembangkit listrik dan dinyatakan dalam satuan dasar *Watt hours*. Soal pemakaian listrik rumah tangga juaranya karena dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, selain itu, penggunaan listrik sudah menjadi bagian dari kebutuhan primer. Adapun data tenaga listrik yang tersambung menurut jenis pemakaian di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ULP Muara Bungo disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.28
Tenaga Listrik yang Tersambung menurut Jenis Pemakaian di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ULP Muara Bungo Tahun 2023



Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.



Berdasarkan data di atas tenaga listrik yang tersambung paling banyak di PT. PLN adalah rumah tangga sebesar 76.265.371 Kwh atau 61,32 persen dari total tenaga listrik yang tersambung pada Tahun 2023.

10. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Sampai dengan Tahun 2023 realisasi rumah layak huni berhasil terpenuhi sebanyak 96,879 Unit rumah, adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.42
Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni
s.d. Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Layak Huni
1	Bathin II Babeko	3.401	3.149
2	Rimbo Tengah	8.718	8.454
3	Bungo Dani	8.516	8.240
4	Pasar Muara Bungo	8.170	7.870
5	Bathin III	6.866	6.506
6	Pelepat	8.950	7.785
7	Pelepat Ilir	16.321	15.890
8	Rantau pandan	3.023	2.586
9	Muko Muko Bathin VII	4.322	3.967
10	Bathin III Ulu	2.888	2.335
11	Tanah Sepenggal	6.646	6.165
12	Tanah Sepenggal Lintas	6.846	5.796
13	Tanah Tumbuh	4.300	3.731
14	Limbur Lubuk Mengkuang	5.150	4.482
15	Bathin II Pelayang	2.718	2.280
16	Jujuhan	4.732	4.404
17	Jujuhan Ilir	3.640	3.240
TOTAL		105.207	96.879

Sumber data: LKj Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa persentase rumah layak huni di Kabupaten Bungo sudah mencapai 96,879 persen. Dengan sebaran jumlah rumah terbanyak di Kecamatan Pelepat Ilir dan paling sedikit di Kecamatan Bathin II Pelayang.



11. Permukiman Layak Huni

Permukiman layak didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sampai dengan Tahun 2022 tercatat luas permukiman adalah seluas 917 Ha dengan luas kawasan kumuh seluas 114,78 Ha. Adapun rincian data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43
Luas Permukiman dan Luas Kawasan Kumuh
s.d Tahun 2023

No	Kelurahan	Luas Permukiman (Ha)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
1	Jaya Setia	174,00	42,22
2	Tanjung Gedang	277,00	0
3	Sungai Pinang	211,00	52,34
4	Bungo Taman Agung	255,00	20,00
Jumlah		917,00	114,78

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Tabel diatas menjelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2022 tercatat luas permukiman adalah seluas 917 Ha dengan luas kawasan kumuh seluas 114,78 Ha.

12. Persentase Penanganan Sampah

Ketika berbicara tentang sampah, berarti kita berbicara tentang “bagaimana” sebuah sistem pengelolaan dapat “fokus” pada pencegahan produksi limbah melalui teknik-teknik minimisasi limbah dan penggunaan kembali bahan limbah melalui daur ulang. Hal ini terkait langsung dengan masalah pengadaannya, di mana lokasi pengambilannya, pemasoknya siapa, perancangan ulang proses pembongkaran dan “*logistic reverse*” dapat mengurangi jumlah limbah yang diproduksi atau memfasilitasi daur ulang dan penggunaan ulang dengan lebih baik. Memelihara lingkungan secara progresif yaitu dengan membangun sistem limbah diubah menjadi energi secara efisien yang mampu memberikan energi listrik langsung kepada penduduk. Dengan cara mendaur ulang dan memilah sampah secara



efektif, akan mengurangi sampah yang dideliver ke tempat pembuangan akhir. Perhitungan volume sampah yang tertangani dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2.44
Data Persampahan Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023

No	Keterangan	Satuan	Tahun					
			2018 (Tahun Awal)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk Pelayanan	Jiwa	367.182	151.515	155.241	158.581	160.932	162.932
2	Produksi sampah (timbulan sampah per orang 0,003 m3)	m3/jiwa	146,87	454,55	465,72	475,74	482,80	489,80
3	Jumlah sampah yang ditangani	m3	73,83	374,58	380,18	431,18	431,18	431,18
4	Persentase volume sampah yang tertangani	persen	50,27	82,41	81,63	90,63	89,31	88,31

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa penanganan sampah di Kabupaten Bungo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada tahun 2018 persentase sampah yang tertangani sebesar 50,27 persen menjadi 90,63 persen pada tahun 2021, namun pada tahun 2023 menurun sebesar 1,00 persen dari tahun 2022.

2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan sebuah harapan bagi seluruh lapisan masyarakat, utamanya investor, pemerintah dan perbankan. Selain faktor-faktor yang umum dikaji, seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, infrastruktur dasar, terdapat pula faktor lainnya yang berpengaruh pada iklim investasi di daerah.



1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.

Perkembangan pembangunan Kabupaten Bungo yang cukup pesat ternyata berdampak pada peningkatan kejahatan dan pelanggaran. Meskipun demikian, Kepolisian Resort Bungo beserta pemerintah Kabupaten Bungo berupaya untuk menjaga kenyamanan kehidupan masyarakat dengan cara menekan angka kriminalitas yang terjadi.

Kurun waktu eman Tahun tindak kejahatan dan pelanggaran di Kabupaten Bungo yang dilaporkan cenderung menurun. Pada Tahun 2018 berjumlah 819 kasus, namun pada Tahun 2023 menurun menjadi 533 kasus. Adapun data rincian tindak kejahatan dan pelanggaran di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45
Penanganan Kriminalitas di Kabupaten Bungo
Tahun 2018-2023

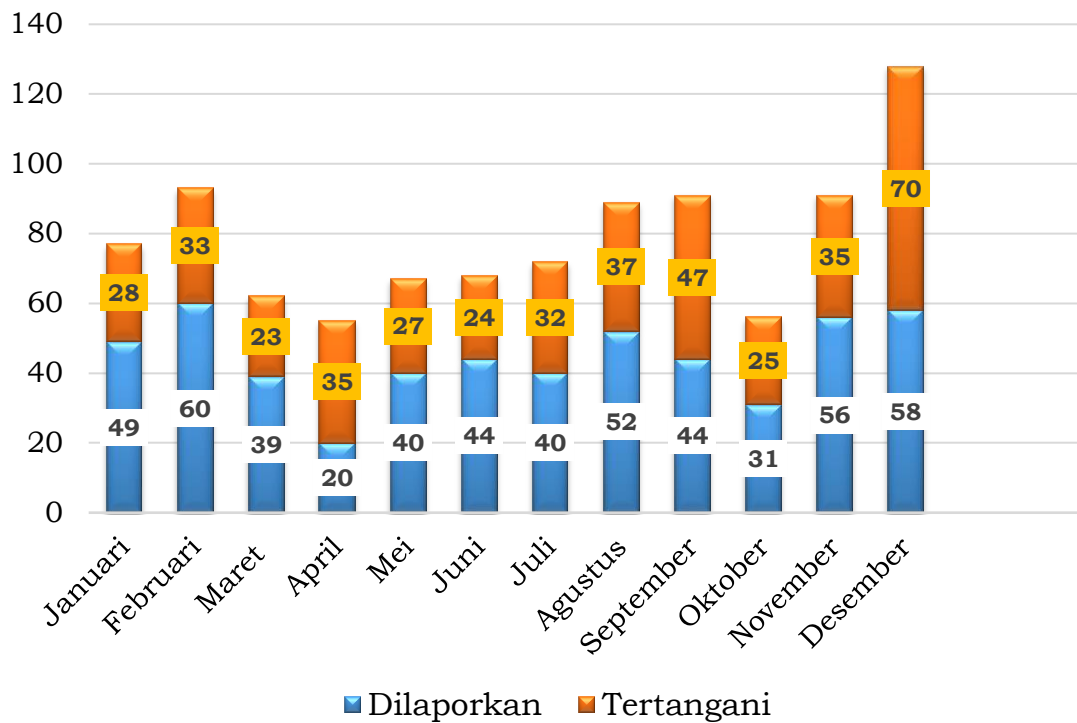
Bulan	Kejahatan dan Pelanggaran		
	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase
2018 <i>(data awal)</i>	819	563	68,74
2019	817	520	63,65
2020	362	265	73,20
2021	362	265	73,20
2022	373	300	80,43
2023	533	416	78,04

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa tindak kejahatan dan pelanggaran di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini, berdampak terhadap kenyamanan dan keamanan untuk menetap di Kabupaten Bungo.

Gambar 2.29

Penanganan Kriminalitas di Kabupaten Bungo Tahun 2023



Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024.

Dari angka penanganan kejahatan dan memperhitungkan jumlah penduduk tiap Tahunnya, maka didapatkan Angka Kriminalitas Kabupaten Bungo. Untuk mengukur *trend* kejahatan digunakan rumusan yang dikemukakan oleh *Larry Siegel*, yaitu dengan mengetahui angka kriminalitas atau *crime rate*, yakni jumlah kejahatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, atau nilai rata-rata kejahatan per 10.000 penduduk.

Tabel 2.46
Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk
di Kabupaten Bungo Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas
2018 (data awal)	819	367.182	22,31
2019	817	374.770	21,80
2020	362	362.363	9,99
2021	362	367.194	9,86
2022	373	373.344	9,99
2023	533	376.382	14,16

Sumber data: Bungo Dalam Angka, BPS Tahun 2024 (Data diolah).



Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2022 cenderung menurun. Hal ini, menjelaskan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Bungo membaik, namun pada Tahun 2023 angka kriminalitas naik menjadi 14,16.

2. Lama Proses Perizinan

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) salah satu kendala dalam berinvestasi adalah regulasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan perizinan pada tanggal 23 Mei 2022. Adapun SOP terkait pelayanan perizinan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.47
Proses Perizinan dan Non-Perizinan di Kabupaten Bungo

No	Nama SOP	Nomor SOP	Mutu Baku Waktu	Output
1	Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Rendah	503/01/SOP/DPMPTSP	1 jam 30 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Menengah Rendah	503/02/SOP/DPMPTSP	1 jam 45 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar
3	Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Menengah Tinggi	503/03/SOP/DPMPTSP	3 hari	Sertifikat Standar
4	Perizinan Berusaha Tingkat Resiko Tinggi	503/04/SOP/DPMPTSP	3 hari	Izin

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Daftar izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha adalah sebagai berikut:

- a. Perizinan Berusaha (*OSS RBA*), antara lain:
 - 1) Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Rendah.
 - 2) Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah.
 - 3) Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi.

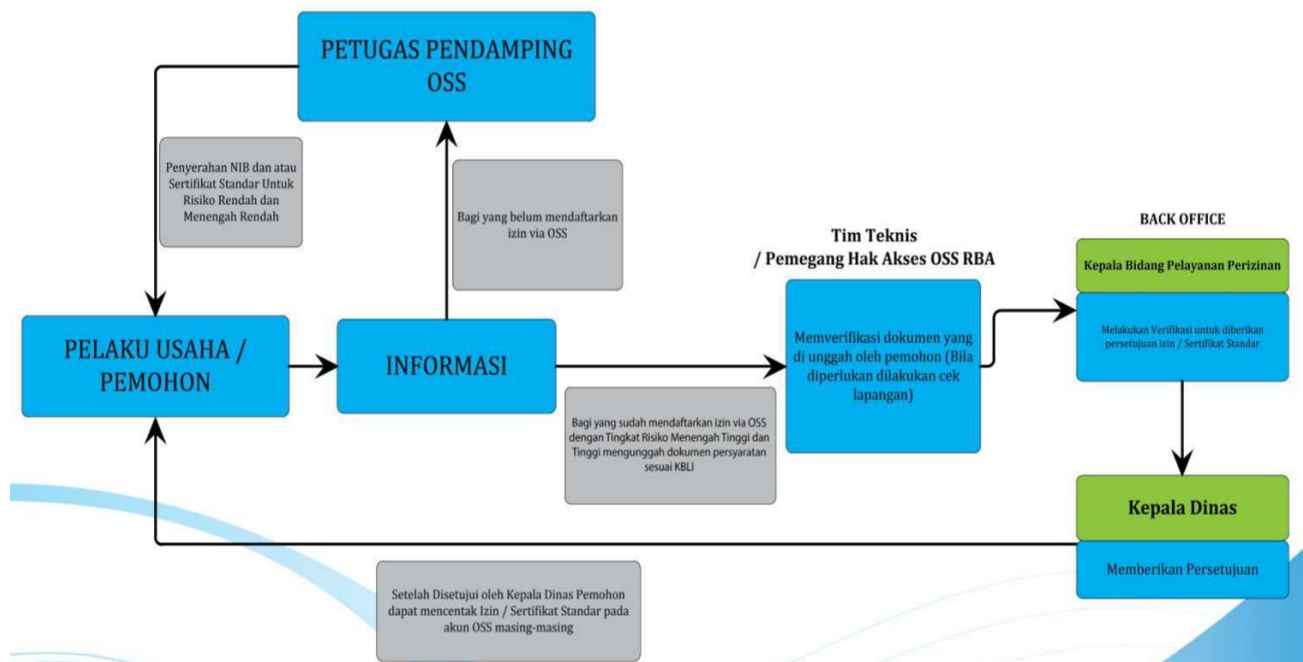


- 4) Kegiatan Usaha dengan Tingkat Risiko Tinggi.
 - 5) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
- b. Non Perizinan Berusaha (*SiCantik Cloud*), antara lain:
- 1) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
 - 2) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non-Formal.
 - 3) Izin Mendirikan Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD).
 - 4) Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD).
 - 5) Izin Menyenggarakan Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
 - 6) Izin Klinik Pemerintah (Non Usaha).
 - 7) Izin Praktik Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis.
 - 8) Izin Praktik Bidan.
 - 9) Izin Praktik Perawat.
 - 10) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut.
 - 11) Izin Praktik / Kerja Fisioterapis.
 - 12) Izin Praktik Apoteker.
 - 13) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.
 - 14) Izin Praktik / Kerja Tenaga Gizi.
 - 15) Izin Kerja Refraksionis Optisien / Optometris.
 - 16) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
 - 17) Izin Praktik Penata Anastesi.
 - 18) Izin Praktik / Kerja Terapis Wicara.
 - 19) Izin Praktik Elektromedis.
 - 20) Izin Kerja Perekam Medis.
 - 21) Izin Kerja Radiografer.
 - 22) Izin Kerja Tenaga Sanitarian / Kesling.
 - 23) Izin Praktek Psikolog Klinis.
 - 24) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.
 - 25) Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah.
 - 26) Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
 - 27) Izin Penyelenggaraan Reklame.

- 28) Persetujuan Lingkungan (Kegiatan Non Berusaha).
- 29) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- 30) Izin Penempatan Kios.
- 31) Izin Praktek Dokter Hewan / Dokter Hewan Spesialis.
- 32) Izin Praktek Paramedik Veteriner (Keswan, Inseminator, PKb dan ATR).
- 33) Izin Keramaian.
- 34) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Kegiatan Non Berusaha).

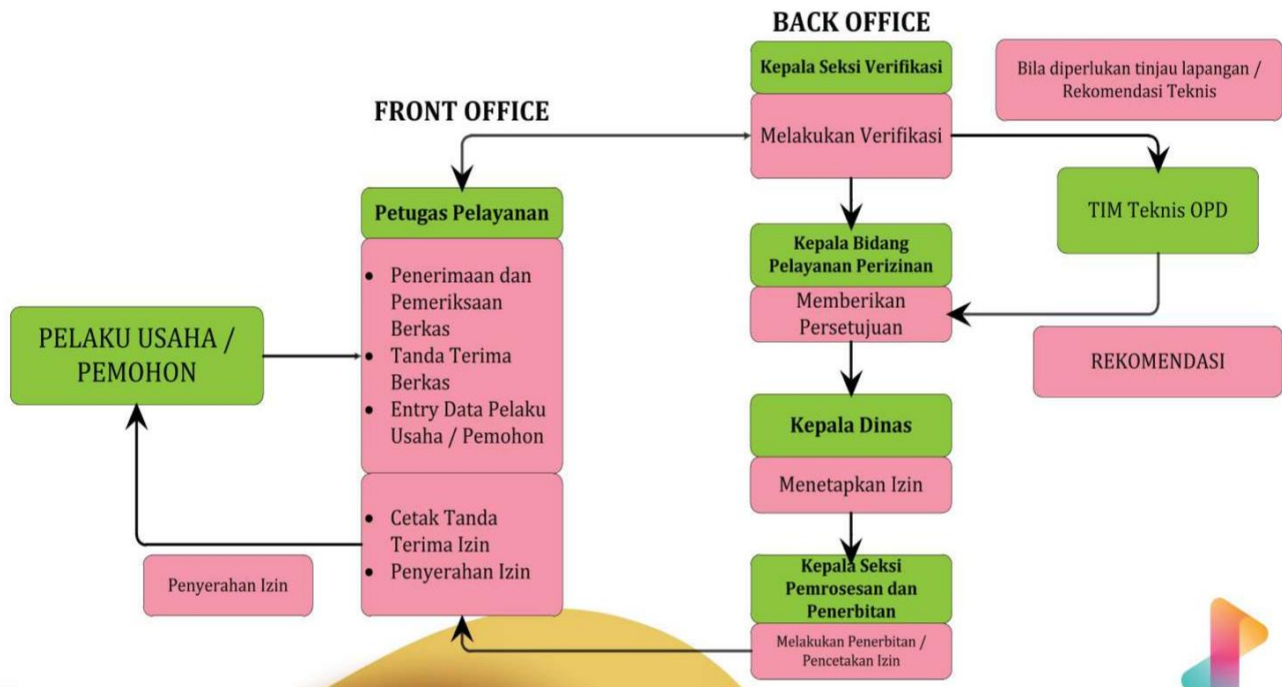
Adapun untuk Alur Perizinan Berusaha (*OSS RBA*) dan Non Perizinan Berusaha (*SiCantik Cloud*) dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 2.30
Alur Perizinan Berusaha melalui Sistem *OSS RBA*



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Gambar 2.31
Alur Non Perizinan Berusaha melalui Sistem *SiCantik Cloud*



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bungo Tahun 2024.

3. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bungo memungut pajak dan retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun jenis pajak dan retribusi di Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.48
Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Bungo

No	Jenis
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Makanan dan/atau Minuman b. Tenaga Listrik c. Jasa Perhotelan d. Jasa Parkir e. Jasa Kesenian dan Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Air Tanah (PAT)



6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
7	Pajak Sarang Burung Walet
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sumber Data : JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas ada 9 jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bungo.

Tabel 2.49
Jenis Retribusi Daerah di Kabupaten Bungo

No	Jenis
1	Retribusi Jasa Umum, meliputi: a. Pelayanan Kesehatan b. Pelayanan Kebersihan c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan d. Pelayanan Pasar e. Pengendalian Lalu Lintas
2	Retribusi Jasa Usaha, meliputi: a. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya b. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan c. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan d. Penyediaan Tempat Penginapan Atau Pesanggrahan Atau Vila e. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak f. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga g. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah h. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan
3	Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: a. Persetujuan Bangunan Gedung b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sumber Data : JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa retribusi daerah di Kabupaten Bungo dibagi kedalam 3 jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.



4. Jumlah Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim usaha adalah suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif, menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Bungo disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.50
Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha
Di Kabupaten Bungo dari Tahun 2018-2023

No	Jenis	Dasar Hukum
1	Pengelolaan Produk Unggulan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara	Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago Kabupaten Bungo	Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018
4	Penataan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi Melalui Kabel	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
5	Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
6	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019
7	Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020
8	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bungo Tahun 2020-2025	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020
9	Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020
10	Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021
11	Penataan, Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021
12	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Tempat Usaha	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021
13	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bungo Pada PT. Bank BPD Jambi	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021
14	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022
15	Penyelenggaraan Perkebunan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022
16	Penyelenggaraan Cadangan Pangan	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023

Sumber Data : JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2024.



Berdasarkan tabel di atas ada sebanyak 16 Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Bungo periode Tahun 2018-2023.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026

2.5.1 Sasaran RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026

Sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 merupakan kuantifikasi dari visi dan misi daerah untuk pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu sasaran pembangunan jangka panjang akan dijabarkan kedalam setiap misi dan target yang ingin dicapai pada akhir Tahun ke-20 (2026). Adapun deskripsi sasaran pembangunan jangka panjang dan target capaian akhir pada Tahun ke-20 beserta indikatornya dimuat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.51
Indikator, Target dan Capaian Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun ke-20 (2026)

No	Sasaran	Indikator	Target Capaian Akhir Tahun ke-20 (2026)
Misi I : Mewujudkan Kabupaten Bungo yang Maju dan Berdaya Saing			
1	Meningkatkan pengembangan ekonomi unggulan dan sumberdaya yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	7,50%
		Persentase sektor sekunder	15,00%
		Nilai Investasi Rupiah (Rupiah)	4,5 Triliun
2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemanfaatan IPTEK	Persentase Hasil Karya IPTEK yang di implementasikan	40,00%
		Jalan dalam kondisi mantap	80,00%
		Rasio Elektrifikasi	85,00%
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	40,00%
Misi 2: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bungo yang Berkualitas			
1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,00%



		Persentase Tenaga Kerja Terdidik	25,00%
2	Meningkatkan pengembangan inovasi berbasis IPTEK	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	25,00%
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Bungo yang Baik, Demokratis serta Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum dan HAM			
1	Meningkatkan kemandirian masyarakat, demokrasi dan keterbukaan informasi publik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	75,00%
		Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif (%)	85,00%
2	Meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan HAM	Indonesia Governance Index (IGI)	7,50%
Misi 4: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bungo yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya			
1	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat	Indeks Crime	1.950 Kasus
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan budaya	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya	60,00%
Misi 5: Mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Bungo yang Merata, Berkeadilan dan Berkualitas			
1	Meningkatkan pembangunan kawasan strategis dan daerah tertinggal yang berkelanjutan	Indeks Williamson	<0,360
2	Meningkatkan pembangunan pedesaan dan pengurangan kesenjangan daerah	Indeks Gini	<0,276
3	Meningkatkan pengentasan kemiskinan, pemenuhan pangan dan partisipasi perempuan	Angka Kemiskinan	<7,00%
		Skor PPH	80,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	60,00
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,00
4	Meningkatkan pengembangan SDA yang berwawasan lingkungan	Penurunan Emisi Karbon	275

Sumber data: Dokumen Laporan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2023.



2.5.2 Capaian Kinerja RPJPD Akhir Periode

Untuk pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga ke sasaran. Capaian absolut sasaran ini sendiri secara logika-apnori dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja input, output dan outcome. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Suatu indikator dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu Tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada Tahun-Tahun sebelumnya. Indikator kinerja input terdiri dari besarnya dana yang digunakan, indikator kinerja output berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan sedangkan indikator kinerja outcome berupa pemanfaatan dari output yang dapat diukur dalam jangka pendek (intermediate outcome) dan jangka panjang (long term outcome). Predikat kinerja diinterpretasikan dengan menggunakan hasil rata-rata capaian kinerja dengan menggunakan kriteria tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Secara keseluruhan sasaran dan uraian indikator pencapaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.53
Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Beserta Indikator dan Target
Capaian Akhir Tahun ke-20 (2026)

No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Persen
1	Meningkatkan pengembangan ekonomi unggulan dan sumberdaya yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	7,50%	4,73%	63,06
		Persentase sektor sekunder	15,00%	16,56%	110,4
		Nilai Investasi Rupiah (Rupiah)	4,5 Triliun	1,3 Triliun	28,89
2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemanfaatan IPTEK	Persentase Hasil Karya IPTEK yang di implementasikan	40,00%	100%	250
		Jalan dalam kondisi mantap	80,00%	86,44%	108,05
		Rasio Elektrifikasi	85,00%	100%	117,65
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	40,00%	70,18	175,45
3	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,00%	70,55%	94,07
		Persentase Tenaga Kerja Terdidik	25,00%	8,9%	64,84
4	Meningkatkan pengembangan inovasi berbasis IPTEK	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	25,00%	38%	152
5	Meningkatkan kemandirian masyarakat, demokrasi dan keterbukaan informasi publik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	75,00%	72,91%	97,21
		Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif (%)	85,00%	74,63%	87,8
6	Meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan HAM	Indonesia Governance Index (IGI)	7,50%	7,8%	104
7	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat	Indeks Crime	1.950 Kasus	500 Kasus	390



No	Sasaran	Indikator	Target	Capaian	Persen
8	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan budaya	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya	60,00%	100%	166,7
9	Meningkatkan pembangunan kawasan strategis dan daerah tertinggal yang berkelanjutan	Indeks Williamson	<0,360	0,360	100
10	Meningkatkan pembangunan pedesaan dan pengurangan kesenjangan daerah	Indeks Gini	<0,276	0,32	86,25
11	Meningkatkan pengentasan kemiskinan, pemenuhan pangan dan partisipasi perempuan	Angka Kemiskinan	<7,00%	5,38%	100
		Skor PPH	80,00	101,4	126,74
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	60,00	88,61	147,68
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,00	58,68	83,83
12	Meningkatkan pengembangan SDA yang berwawasan lingkungan	Penurunan Emisi Karbon	275	275	100

Sumber data: Dokumen Laporan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2023.

2.5.3 Rekomendasi Tindaklanjut Hasil Evaluasi RPJPD

Terhadap permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bungo, dapat direkomendasikan untuk lebih meningkatkan daya saing daerah yang mengerucut kepada peningkatan nilai investasi di daerah. Oleh sebab itu, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:



1. Peningkatan infrastruktur

Investasi yang kuat dalam infrastruktur seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi dapat menarik perhatian investor. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik cenderung lebih menarik untuk investasi jangka panjang.

2. Kemudahan berbisnis

Meningkatkan iklim investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kejelasan regulasi dapat membuat daerah lebih menarik bagi investor. Pemerintah daerah dapat memperkuat kerjasama dengan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

3. Pembangunan sumber daya manusia

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri akan meningkatkan daya tarik investasi. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan perusahaan untuk mengembangkan program-program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. Promosi dan pemasaran

Mengkomunikasikan potensi investasi daerah melalui kampanye promosi dan pemasaran yang efektif dapat menarik minat investor. Pemerintah daerah dapat mengadakan konferensi, pameran, dan kunjungan bisnis untuk memperkenalkan peluang investasi yang ada.

5. Kolaborasi dengan sektor swasta

Membangun kemitraan dengan perusahaan dan investor swasta dapat membantu meningkatkan investasi. Pemerintah daerah dapat menawarkan insentif investasi seperti pembebasan pajak atau subsidi untuk menarik minat investor.



6. Fokus pada sektor yang kompetitif

Identifikasi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif di daerah tersebut dan fokus pada pengembangan sektor-sektor tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan khusus seperti fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

7. Keberlanjutan lingkungan

Memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan dapat meningkatkan daya tarik investasi. Daerah yang memiliki praktik bisnis yang ramah lingkungan dan kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan dapat menarik investor yang peduli dengan isu lingkungan.

Penting untuk dicatat bahwa setiap daerah memiliki kekhasan dan tantangan yang berbeda, oleh karena itu, strategi yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan sumber daya yang tersedia.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Tren demografi, atau perubahan dalam struktur dan karakteristik populasi, dapat memiliki dampak signifikan pada kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik. Beberapa tren demografi yang seringkali mempengaruhi kebutuhan ini melibatkan pertumbuhan populasi, perubahan usia rata-rata, urbanisasi, dan diversifikasi demografi.

Proyeksi penduduk yang disajikan bukanlah merupakan suatu prediksi atau perkiraan. Proyeksi ini adalah penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Kabupaten Bungo jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi diproyeksikan selama lima belas Tahun ke depan dari Tahun



2023-2045. Adapun proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2023-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo

Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Orang)				
	2025	2030	2035	2040	2045
376.382	386.114	408.831	429.083	446.673	461.335

Sumber data: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2045 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Jambi Tahun 2023.

Sementara untuk proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bungo berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bungo

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	191.594	196.287	207.015	216.310	224.124	230.398
Perempuan	184.788	189.827	201.816	212.773	222.549	230.937
Rasio	104	103	103	102	101	100

Sumber data: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2045 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Jambi Tahun 2023.

Untuk proyeksi penduduk Kabupaten Bungo menurut kelompok umur dari Tahun 2023-2045 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.56
Proyeksi Penduduk Kabupaten Bungo
Menurut Kelompok Umur dari Tahun 2023-2045

Umur	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	32.719	33.330	32.938	32.491	32.087	31.821
5-9	32.456	32.032	33.285	32.904	32.460	32.060
10-14	32.741	32.809	32.069	33.326	32.945	32.507
15-19	32.417	32.534	32.854	32.117	33.384	33.004
20-24	32.349	32.303	32.496	32.822	32.091	33.358
25-29	31.766	31.942	31.885	32.082	32.415	31.702
30-34	31.018	30.947	31.318	31.266	31.473	31.815
35-39	29.971	30.528	30.580	30.946	30.904	31.117
40-44	27.543	28.486	30.339	30.404	30.773	30.735
45-49	24.596	25.844	28.373	30.233	30.326	30.708
50-54	20.637	22.210	25.586	28.117	29.986	30.105
55-59	16.412	17.718	21.518	24.825	27.320	29.163



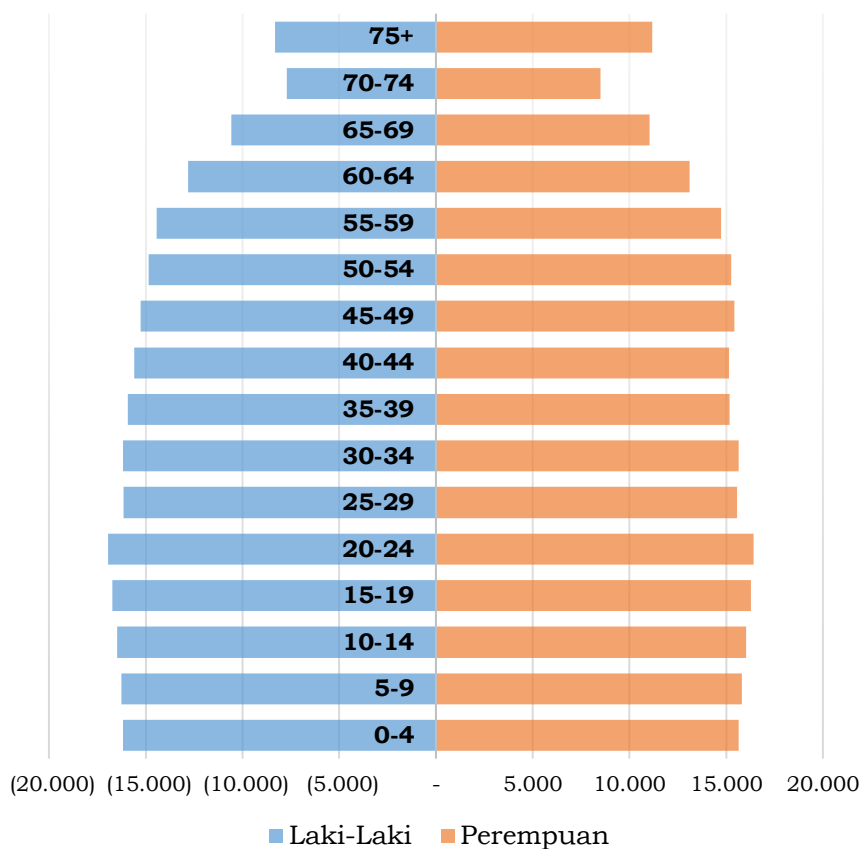
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

60-64	12.643	13.782	16.704	20.336	23.521	25.924
65-69	9.037	9.929	12.522	15.244	18.640	21.610
70-74	5.482	6.501	8.465	10.758	13.195	16.203
75+	4.595	5.219	7.899	11.212	15.153	19.503
Total	376.382	386.114	408.831	429.083	446.673	461.335

Sumber data: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2045 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Jambi Tahun 2023.

Piramida proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2045 menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.32
Piramida Penduduk Kabupaten Bungo Tahun 2045



Sumber data: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Jambi Tahun 2023.

Sementara proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bungo menurut kecamatan dari Tahun 2023-2045 disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.57
Proyeksi Penduduk Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan
Per 5 Tahunan dari Tahun 2025-2045

Umur	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Tanah Tumbuh	15.460	16.030	16.973	17.814	18.544	19.153
Rantau Pandan	10.840	11.273	11.936	12.527	13.041	13.469
Pasar Muara Bungo	21.290	22.339	23.653	24.825	25.842	26.691
Jujuhan	20.290	20.477	21.682	22.756	23.689	24.467
Tanah Sepenggal	25.160	25.969	27.497	28.859	30.042	31.028
Pelepat	37.160	37.748	39.969	41.949	43.669	45.102
Limbur Lubuk Mengkuang	17.280	17.799	18.846	19.779	20.590	21.266
Muko-Muko Bathin VII	15.780	16.340	17.302	18.159	18.903	19.524
Pelepat Ilir	52.430	54.296	57.490	60.338	62.812	64.873
Bathin II Babeko	15.310	15.410	16.316	17.125	17.827	18.412
Bathin III	28.390	28.234	29.895	31.376	32.662	33.734
Bungo Dani	28.300	29.165	30.880	32.410	33.739	34.846
Rimbo Tengah	35.338	35.370	37.451	39.306	40.917	42.260
Bathin III Ulu	10.020	10.253	10.856	11.394	11.861	12.251
Bathin II Pelayang	9.070	9.525	10.085	10.585	11.019	11.381
Jujuhan Ilir	10.250	10.859	11.498	12.068	12.562	12.975
Tanah Sepenggal Lintas	24.014	25.028	26.500	27.813	28.953	29.904
Total	376.382	386.114	408.831	429.083	446.673	461.335

Sumber data: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2045 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Jambi Tahun 2023.

Dari data di atas diproyeksikan jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Pelepat Ilir dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Bathin II Pelayang. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bungo dari Tahun 2025-2045 di atas dapat diketahui rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bungo adalah 92 jiwa/km².

Untuk proyeksi data usia produktif, penduduk usia lanjut dan angka ketergantungan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2025-2045 disajikan pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.58
Analisis Rasio Ketergantungan DR, CDR dan ADR
Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045

Tahun	Jumlah Penduduk Usia (Tahun)			Rasio Ketergantungan		
	0 - 14	15 - 64	65 keatas	DR	CDR	ADR
2025	98.171	266.294	21.649	45,00	36,87	8,13
2030	98.292	281.653	28.886	45,15	34,90	10,26
2035	98.721	293.148	37.214	46,37	33,68	12,69
2040	97.492	302.193	46.988	47,81	32,26	15,55
2045	96.388	307.631	57.316	49,96	31,33	18,63

Sumber data: Proyeksi Penduduk Kab/Kota Provinsi Jambi Tahun 2020-2045 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS Provinsi Jambi Tahun 2023 (diolah).

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata persentase jumlah usia produktif di Kabupaten Bungo dari Tahun 2025-2045 sebesar 68,05 persen, usia lanjut sebesar 9,01 persen. Selanjutnya rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) di Kabupaten Bungo rata-rata Tahun 2025-2045 sebesar 47,86. Hal ini menjelaskan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bungo menanggung 47-48 penduduk usia belum produktif/tidak produktif.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Analisis kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan untuk mengetahui kondisi dan pelayanan sarana dan prasarana wilayah, potensi dan kendala peningkatan pelayanan. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan melakukan analisa kebutuhan yang tepat, kita dapat mengidentifikasi prioritas dalam penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan. Hal ini akan membantu memaksimalkan potensi kinerja dan pelayanan bagi masyarakat.

Adapun proyeksi rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, kelistrikan, persampahan, kesehatan, dan pendidikan di Kabupaten Bungo menurut kecamatan dari Tahun 2025-2045 disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.59
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
di Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan Per 5 Tahunan
dari Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)
1	Tanah Tumbuh	16.030	4.008	16.973	4.243	17.814	4.454	18.544	4.636	19.153	4.788
2	Rantau Pandan	11.273	2.818	11.936	2.984	12.527	3.132	13.041	3.260	13.469	3.367
3	Pasar Muara Bungo	22.339	5.585	23.653	5.913	24.825	6.206	25.842	6.461	26.691	6.673
4	Jujuhan	20.477	5.119	21.682	5.421	22.756	5.689	23.689	5.922	24.467	6.117
5	Tanah Sepenggal	25.969	6.492	27.497	6.874	28.859	7.215	30.042	7.510	31.028	7.757
6	Pelepat	37.748	9.437	39.969	9.992	41.949	10.487	43.669	10.917	45.102	11.276
7	Limbur Lubuk Mengkuang	17.799	4.450	18.846	4.711	19.779	4.945	20.590	5.148	21.266	5.317
8	Muko-Muko Bathin VII	16.340	4.085	17.302	4.325	18.159	4.540	18.903	4.726	19.524	4.881
9	Pelepat Ilir	54.296	13.574	57.490	14.373	60.338	15.085	62.812	15.703	64.873	16.218
10	Bathin II Babeko	15.410	3.852	16.316	4.079	17.125	4.281	17.827	4.457	18.412	4.603
11	Bathin III	28.234	7.058	29.895	7.474	31.376	7.844	32.662	8.166	33.734	8.434
12	Bungo Dani	29.165	7.291	30.880	7.720	32.410	8.103	33.739	8.435	34.846	8.712
13	Rimbo Tengah	35.370	8.842	37.451	9.363	39.306	9.826	40.917	10.229	42.260	10.565
14	Bathin III Ulu	10.253	2.563	10.856	2.714	11.394	2.849	11.861	2.965	12.251	3.063
15	Bathin II Pelayang	9.525	2.381	10.085	2.521	10.585	2.646	11.019	2.755	11.381	2.845
16	Jujuhan Ilir	10.859	2.715	11.498	2.875	12.068	3.017	12.562	3.141	12.975	3.244
17	Tanah Sepenggal Lintas	25.028	6.257	26.500	6.625	27.813	6.953	28.953	7.238	29.904	7.476
Jumlah		386.114	96.529	408.831	102.208	429.083	107.271	446.673	111.668	461.335	115.334

Sumber data: Proyeksi BPS Kabupaten Bungo Tahun 2024.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

Tabel 2.60
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
di Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan Per 5 Tahunan
dari Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Bersih (Liter)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Bersih (Liter)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Bersih (Liter)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Bersih (Liter)	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Bersih (Liter)
1	Tanah Tumbuh	16.030	1.712.841,57	16.973	1.814.216,84	17.814	1.904.648,21	18.544	1.983.235,97	19.153	2.048.772,71
2	Rantau Pandan	11.273	1.202.503,32	11.936	1.273.549,42	12.527	1.336.914,18	13.041	1.391.971,32	13.469	1.437.878,86
3	Pasar Muara Bungo	22.339	2.392.212,40	23.653	2.534.123,89	24.825	2.660.745,92	25.842	2.770.807,83	26.691	2.862.608,39
4	Jujuhan	20.477	2.191.431,88	21.682	2.321.344,25	22.756	2.437.251,74	23.689	2.537.994,11	24.467	2.622.016,97
5	Tanah Sepanggal	25.969	2.784.481,98	27.497	2.949.882,30	28.859	3.097.482,79	30.042	3.225.795,03	31.028	3.332.828,86
6	Pelepat	37.748	4.064.209,34	39.969	4.306.655,76	41.949	4.523.106,46	43.669	4.711.344,63	45.102	4.868.418,51
7	Limbur Lubuk Mengkuang	17.799	1.902.987,05	18.846	2.015.689,28	19.779	2.116.231,63	20.590	2.203.611,36	21.266	2.276.483,69
8	Muko-Muko Bathin VII	16.340	1.746.183,46	17.302	1.849.543,86	18.159	1.941.747,16	18.903	2.021.875,61	19.524	2.088.697,78
9	Pelepat Ilir	54.296	5.879.472,29	57.490	6.232.277,72	60.338	6.547.445,86	62.812	6.821.680,70	64.873	7.050.617,55
10	Bathin II Babeko	15.410	1.646.179,45	16.316	1.743.587,08	17.125	1.830.477,07	17.827	1.905.985,67	18.412	1.968.953,48
11	Bathin III	28.234	3.029.732,07	29.895	3.209.848,45	31.376	3.370.595,06	32.662	3.510.345,99	33.734	3.626.929,05
12	Bungo Dani	29.165	3.130.631,31	30.880	3.316.808,91	32.410	3.482.970,72	33.739	3.627.434,01	34.846	3.747.951,37
13	Rimbo Tengah	35.370	3.804.953,49	37.451	4.031.740,30	39.306	4.234.192,52	40.917	4.410.243,11	42.260	4.557.137,44
14	Bathin III Ulu	10.253	1.093.334,34	10.856	1.157.906,20	11.394	1.215.494,45	11.861	1.265.530,68	12.251	1.307.250,47
15	Bathin II Pelayang	9.525	1.015.435,85	10.085	1.075.390,92	10.585	1.128.860,18	11.019	1.175.316,43	11.381	1.214.050,45
16	Jujuhan Ilir	10.859	1.158.206,30	11.498	1.226.624,79	12.068	1.287.645,07	12.562	1.340.664,36	12.975	1.384.872,18
17	Tanah Sepanggal Lintas	25.028	2.682.687,56	26.500	2.841.986,68	27.813	2.984.137,52	28.953	3.107.708,38	29.904	3.210.784,37
Jumlah		386.114	46.615.263,29	408.831	49.706.148,25	429.083	52.494.277,03	446.673	54.940.885,08	461.335	56.997.968,08

Sumber data: Proyeksi BPS Kabupaten Bungo Tahun 2024.



Tabel 2.61
Proyeksi Kebutuhan Kelistrikan
di Kabupaten Bungo Menurut Kecamatan Per 5 Tahunan
dari Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Tahun									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TMh	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TMh	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TMh	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TMh	Jumlah Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TMh
1	Tanah Tumbuh	16.030	0,02	16.973	0,02	17.814	0,02	18.544	0,03	19.153	0,03
2	Rantau Pandan	11.273	0,02	11.936	0,02	12.527	0,02	13.041	0,02	13.469	0,02
3	Pasar Muara Bungo	22.339	0,03	23.653	0,03	24.825	0,03	25.842	0,04	26.691	0,04
4	Jujuhan	20.477	0,03	21.682	0,03	22.756	0,03	23.689	0,03	24.467	0,03
5	Tanah Sepenggal	25.969	0,04	27.497	0,04	28.859	0,04	30.042	0,04	31.028	0,04
6	Pelepat	37.748	0,05	39.969	0,06	41.949	0,06	43.669	0,06	45.102	0,06
7	Limbur Lubuk Mengkuang	17.799	0,02	18.846	0,03	19.779	0,03	20.590	0,03	21.266	0,03
8	Muko-Muko Bathin VII	16.340	0,02	17.302	0,02	18.159	0,03	18.903	0,03	19.524	0,03
9	Pelepat Ilir	54.296	0,08	57.490	0,08	60.338	0,08	62.812	0,09	64.873	0,09
10	Bathin II Babeko	15.410	0,02	16.316	0,02	17.125	0,02	17.827	0,02	18.412	0,03
11	Bathin III	28.234	0,04	29.895	0,04	31.376	0,04	32.662	0,05	33.734	0,05
12	Bungo Dani	29.165	0,04	30.880	0,04	32.410	0,05	33.739	0,05	34.846	0,05
13	Rimbo Tengah	35.370	0,05	37.451	0,05	39.306	0,06	40.917	0,06	42.260	0,06
14	Bathin III Ulu	10.253	0,01	10.856	0,02	11.394	0,02	11.861	0,02	12.251	0,02
15	Bathin II Pelayang	9.525	0,01	10.085	0,01	10.585	0,01	11.019	0,02	11.381	0,02
16	Jujuhan Ilir	10.859	0,02	11.498	0,02	12.068	0,02	12.562	0,02	12.975	0,02
17	Tanah Sepenggal Lintas	25.028	0,04	26.500	0,04	27.813	0,04	28.953	0,04	29.904	0,04
Jumlah		386.114	0,54	408.831	0,57	429.083	0,60	446.673	0,63	461.335	0,65

Sumber data: Proyeksi BPS Kabupaten Bungo Tahun 2024.



Tabel 2.62
Proyeksi Produksi Sampah dan Kebutuhan Persampahan
di Kabupaten Bungo Per 5 Tahunan
dari Tahun 2025-2045

No	Uraian	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Produksi Sampah	21.900	22.465	23.787	24.965	25.989
2	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	2	2	2	3	3
3	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS3R)	7	12	17	22	27
4	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1	6	11	16	21

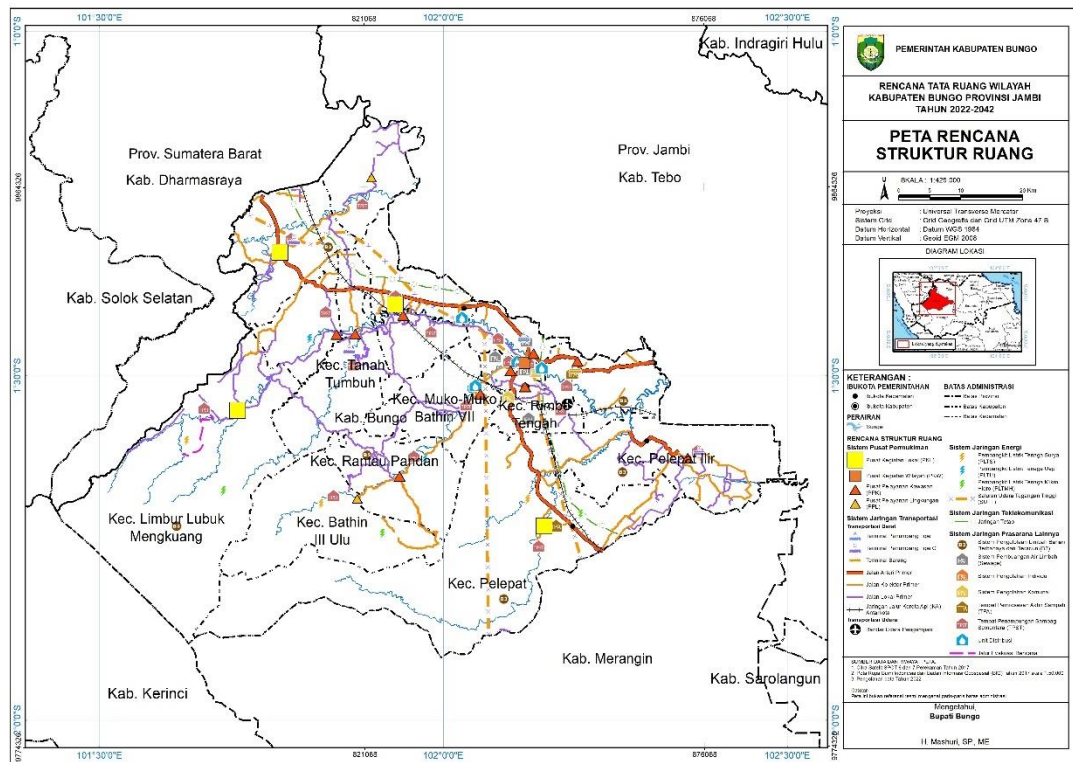
Sumber data: Proyeksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2024.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Gambar 2.33
Peta Struktur Ruang Wilayah Perencanaan Kabupaten Bungo



Sumber data: Materi Teknis (Matek) RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.

1. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Rencana sistem pusat kegiatan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. Sistem pusat kegiatan di wilayah kabupaten tidak terlepas dari kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan yang dimiliki pusat kegiatan termasuk juga potensi strategis dan aksesibilitas lokasi yang dimiliki dibandingkan dengan pusat kegiatan lainnya.

Dengan memperhatikan ketersediaan sarana, kemampuan lahan dan kebijakan-kebijakan terkait, struktur hirarki dan wilayah pelayanan di Kabupaten Bungo direkomendasikan sebagai berikut:



A. Pusat Pelayanan

Pusat pelayanan Kabupaten Bungo berada di Perkotaan Muara Bungo yang telah ditetapkan dalam RTRWN sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Secara administrasi perkotaan Muara Bungo berada di Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Bungo Dani, Kecamatan Bathin III dan Kecamatan Bathin II Babeko. Pusat Pelayanan di Kabupaten Bungo yaitu Perkotaan Muara Bungo tidak hanya berfungsi untuk pelayanan internal Kabupaten Bungo tetapi juga pelayanan untuk daerah sekitarnya.

B. Sub Pusat Pelayanan

Sub Pusat Pelayanan di Kabupaten Bungo dalam hierarki perkotaan adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Lokal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan ditetapkan dalam RTRW Provinsi. Berdasarkan perda RTRW Provinsi Jambi Nomor. 10 tahun 2013 terdapat 4 pusat kegiatan lokal di Kabupaten Bungo. Keempat PKL tersebut adalah Perkotaan Rantau Ikil, Perkotaan Tuo Limbur, Perkotaan Rantau Kelayang dan Perkotaan Embacang Gedang. Adapun spesifik fungsi sebagai berikut

- (1) Perkotaan Rantau Ikil yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala sub regional, perdagangan dan jasa skala sub regional, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat pendidikan skala sub regional, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, dan pusat peribadatan;
- (2) Perkotaan Tuo Limbur yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala sub regional, perdagangan dan jasa skala sub regional, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat pendidikan skala sub regional, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, dan pusat peribadatan;
- (3) Perkotaan Rantau Kelayang yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala lokal, pendidikan skala lokal, perdagangan dan jasa skala lokal dan kesehatan skala lokal dan pusat peribadatan;



- (4) Perkotaan Embacang Gedang yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala sub regional, perdagangan dan jasa skala sub regional, pusat kesehatan skala kabupaten, pusat pendidikan skala sub regional, olahraga, dan pusat peribadatan.

C. Pusat Pelayanan Kawasan

Pusat Pelayanan kawasan adalah perkotaan yang skala pelayanannya adalah skala kawasan (dalam 1 kecamatan). Pusat pelayanan kawasan akan berada di pusat-pusat desa yang ada di masing-masing berada kecamatan. dibawah ini adalah 10 pusat pelayanan kegiatan yang ada di Kabupaten Bungo.

- (1) Perkotaan Cadika di Kecamatan Rimbo Tengah yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
- (2) Perkotaan Talang Pantai di Kecamatan Bungo Dani yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
- (3) Perkotaan Sungai Binjai di Kecamatan Bathin III yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
- (4) Perkotaan Simpang Babeko di Kecamatan Bathin II Babeko yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
- (5) Perkotaan Pasar Lubuk Landai di Kecamatan Tanah Sepenggal yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;



- (6) Perkotaan Tanah Tumbuh di Kecamatan Tanah Tumbuh yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
- (7) Perkotaan Pelayang di Kecamatan Bathin II Pelayang yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
- (8) Perkotaan Tanjung Agung di Kecamatan Muko-muko Bathin VII yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
- (9) Perkotaan Rantau Pandan di Kecamatan Rantau Pandan yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan; dan
- (10) Perkotaan Purwosari di Kecamatan Pelepat Ilir yang berfungsi sebagai pemerintahan skala kecamatan, perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan skala kecamatan, kesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan.

D. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat pelayanan lingkungan adalah adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL di Kabupaten Bungo ada 2 yaitu PPL Pulau Batu di Kecamatan Jujuhan Ilir dan PPL Muara Buat di Kecamatan Bathin III Ulu. PPL Pulau Batu di Kecamatan Jujuhan Ilir yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian dan PPL Muara Buat di Kecamatan Bathin III Ulu yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata dan pertanian.



Tabel 2.63
Sistem Perkotaan di Kabupaten Bungo

No	Jenis Pusat Kegiatan	Nama Pusat Kegiatan	Administrasi	Fungsi
1	PKW	Perkotaan Muara Bungo	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Pasar Muara Bungo • Kec. Bungo Dani • Sebagian Kec Rimbo Tengah • Sebagian Kec. Bathin II Babeko • Sebgain Kec. Bathin III 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan skala regional • Pusat perdagangan dan jasa skala regional • Pusat pendidikan skala regional • Pusat kesehatan skala regional • Pusat rekreasi, olahraga dan wisata skala regional • Pusat peribadatan
2	PKL	Perkotaan Rantau Ikil	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Rantau Ikil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan skala sub regional • Perdagangan dan jasa skala sub regional • Pusat kesehatan skala kabupaten • Pusat pendidikan skala sub regional, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, • Pusat peribadatan
		Perkotaan Tuo Limbur	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Tuo Limbur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan skala sub regional • Perdagangan dan jasa skala sub regional • Pusat kesehatan skala kabupaten • Pusat pendidikan skala sub regional, • Pusat rekreasi, olahraga dan wisata, dan • Pusat peribadatan
		Perkotaan Rantau Kelayang	<ul style="list-style-type: none"> • Dusun Rantau Kelayang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan skala lokal, • Pendidikan skala lokal, • Perdagangan dan jasa skala lokal dan • Kesehatan skala lokal dan pusat peribadatan



No	Jenis Pusat Kegiatan	Nama Pusat Kegiatan	Administrasi	Fungsi
		Perkotaan Embacang Gedang	<ul style="list-style-type: none">Dusun Embacang Gedang	<ul style="list-style-type: none">Pusat pemerintahan skala sub regional,Perdagangan dan jasa skala sub regional,Pusat kesehatan skala sub regional,Pusat pendidikan skala sub regional, olahraga, dan pusat peribadatan
3	PPK	Perkotaan Cadika di Kecamatan Rimbo Tengah	<ul style="list-style-type: none">Dusun Cadika	<ul style="list-style-type: none">Pemerintahan skala kecamatan,Perdagangan dan jasa skala kecamatan,Pendidikan skala kecamatan,Kesehatan skala kecamatan,Pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
		Perkotaan Talang Pantai di Kecamatan Bungo Dani	<ul style="list-style-type: none">Dusun Talang Pantai	<ul style="list-style-type: none">pemerintahan skala kecamatanperdagangan dan jasa skala kecamatanpendidikan skala kecamatankesehatan skala kecamatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
		Perkotaan Sungai Binjai di Kecamatan Bathin III	<ul style="list-style-type: none">Dusun Sungai Binjai	<ul style="list-style-type: none">Pemerintahan skala kecamatan,Perdagangan dan jasa skala kecamatan,Pendidikan skala kecamatan,Kesehatan skala kecamatan,Pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;



No	Jenis Pusat Kegiatan	Nama Pusat Kegiatan	Administrasi	Fungsi
		Perkotaan Simpang Babeko di Kecamatan Bathin II Babeko	<ul style="list-style-type: none">Dusun Simpang Babeko	<ul style="list-style-type: none">Pemerintahan skala kecamatan,Perdagangan dan jasa skala kecamatan,Pendidikan skala kecamatanKesehatan skala kecamatanPusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
		Perkotaan Pasar Lubuk Landai di Kecamatan Tanah Sepenggal	<ul style="list-style-type: none">Dusun Pasar Lubuk	<ul style="list-style-type: none">Pemerintahan skala kecamatanPerdagangan dan jasa skala kecamatan,Pendidikan skala kecamatanKesehatan skala kecamatanPusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
		Perkotaan Tanah Tumbuh di Kecamatan Tanah Tumbuh	<ul style="list-style-type: none">Dusun Tanah Tumbuh	<ul style="list-style-type: none">Pemerintahan skala kecamatan,Perdagangan dan jasa skala kecamatan,Pendidikan skala kecamatanKesehatan skala kecamatanPusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
		Perkotaan Pelayang di Kecamatan Bathin II Pelayang	<ul style="list-style-type: none">Dusun Pelayang	<ul style="list-style-type: none">Pemerintahan skala kecamatanPerdagangan dan jasa skala kecamatan,Pendidikan skala kecamatanKesehatan skala kecamatanPusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;



No	Jenis Pusat Kegiatan	Nama Pusat Kegiatan	Administrasi	Fungsi
		Perkotaan Tanjung Agung di Kecamatan Muko-muko Bathin VII	<ul style="list-style-type: none">Dusun Tanjung Agung	<ul style="list-style-type: none">Pemerintahan skala kecamatan,Perdagangan dan jasa skala kecamatan,Pendidikan skala kecamatan,Kesehatan skala kecamatan,Pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan;
		Perkotaan Rantau Pandan di Kecamatan Rantau Pandan	<ul style="list-style-type: none">Dusun Rantau Pandan	<ul style="list-style-type: none">Pemerintahan skala kecamatan,perdagangan dan jasa skala kecamatan,pendidikan skala kecamatan,kesehatan skala kecamatan,pusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan
		Perkotaan Purwosari di Kecamatan Pelepat Ilir	<ul style="list-style-type: none">Dusun Purwosari	<ul style="list-style-type: none">Pemerintahan skala kecamatanPerdagangan dan jasa skala kecamatan,Pendidikan skala kecamatanKesehatan skala kecamatanPusat rekreasi, olahraga dan wisata dan peribadatan
4	PPL	PPL Pulau Batu di Kecamatan Jujuhan Ilir		Pusat kegiatan pertanian
		PPL Muara Buat di Kecamatan Bathin III Ulu		Pusat kegiatan pariwisata dan pertanian

Sumber data: Materi Teknis (Matek) RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.



2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana

A. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Bungo terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi udara, sistem jaringan transportasi sungai dan sistem jaringan transportasi kereta api. Pengembangan jaringan transportasi khususnya memperhatikan kebutuhan pergerakan/mobilitas baik barang maupun orang dan juga interaksi antar pusat kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

(1) Sistem Jaringan Jalan

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan pemukiman yang dikembangkan dalam ruang wilayah kabupaten, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi darat provinsi dan nasional. Sistem jaringan transportasi darat terdiri dari jaringan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengembangan jaringan jalan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek teknis maupun non teknis sehingga jaringan jalan yang dikembangkan bersifat efektif dan efisien. Pengembangan jaringan jalan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan antara lain :

- Penyebaran lokasi kawasan-kawasan kegiatan sektor-sektor perekonomian, sebagai pembangkit arus lalu lintas.
- Kecenderungan perkembangan wilayah terbangun dan permukiman

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui:

- Peningkatan fungsi jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur ruang;



- Peningkatan fungsi jaringan jalan dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan fungsi, status, maupun kelas jalan, serta kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:

- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Kota
- Jalan Desa

Rencana sistem transportasi darat yaitu jaringan jalan di Kabupaten Bungo adalah penjabaran rencana jaringan jalan yang ada di Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi khususnya rencana jaringan jalan nasional dan rencana jaringan jalan provinsi.

Sedangkan pembangunan jaringan jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum terhubung, untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem perkotaan di Kabupaten Bungo untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kabupaten yang optimal. Pengaturan hirarki fungsi dan status (kewenangan penyelenggaraan) untuk jaringan jalan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hubungan antar pusat kegiatan. Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas sistem jaringan jalan, transportasi jalan dan sistem jaringan angkutan umum.

a) Jaringan Jalan Nasional

- Rencana Pengembangan Jalan Arteri Primer,
 - Peningkatan Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:
 - ✓ Batas Provinsi Sumatera Barat/Provinsi Jambi – Batas Kabupaten Bungo;
 - ✓ Jalan Lintas Sumatera I (Muara Bungo);



- ✓ Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin – Batas Kota Bangko;
- ✓ Jalan Lintas Sumatera II (Muara Bungo);
- ✓ Batas Kota Muaro Bungo – Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin.
- Peningkatan Jalan Penghubung (*Feeder Road*) I Jambi – Bungo yang terdiri dari ruas jalan:
 - ✓ Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo);
 - ✓ Batas Kota Muara Bungo – Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo;
 - ✓ Jalan Akses Bandara yaitu Jalan Akses Bandara Muara Bungo.
- Peningkatan dan pembangunan Jalan kolektor primer satu (JKP-1) Nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi
 - ✓ Peningkatan Batas Kota Muara Bungo – Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin; dan
 - ✓ Peningkatan Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin – Batas Kota Bangko;
 - ✓ Pembangunan jalan lingkaran Perkotaan Bungo yang menghubungkan ruas jalan utama.

b) Jaringan Jalan Provinsi

Jalan strategis provinsi yang pembangunannya di prioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi, yaitu Jalan Akses Bandara Bungo

c) Jaringan Jalan Kabupaten

- jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan;
 - ✓ Pengembangan Jalan Simpang Sawmil – Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo;



- ✓ Pengembangan Jalan Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo – Simpang Logpon;
- ✓ Pengembangan Jalan Simpang Kuamang – Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Bungo;
- ✓ Pengembangan Jalan Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Bungo – Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo;
- ✓ Pengembangan Jalan Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo – Simpang Betung Bedarah;
- ✓ Pengembangan Jalan Muara Bungo – Peninjau;
- ✓ Pengembangan Jalan Peninjau – Tuo Limbur;
- ✓ Pengembangan Jalan Tuo Limbur – TKA (Batas Sumbar/Jambi);
- ✓ Pengembangan Jalan Peninjau – Junction;
- ✓ Pengembangan Jalan ruas Rantau Kelayang – Sekampil – Aur Cino – Senamat Ulu – Muara Buat – Apung Mudik – Pemunyan – Simp. Tanjung;
- ✓ Pengembangan Jalan Bungo – TKA Batas Sumbar (Jalan Lingkar Barat);
- jalan lokal primer;
 - ✓ Pengembangan Ruas jalan Muara Bungo – Tanjung Agung – Rantau Pandan;
 - ✓ Pengembangan Ruas jalan Peninjau – Simpang Lubuk Mengkuang – Limbur Lubuk Mengkuang;
 - ✓ Pengembangan Ruas jalan Senamat – Koto Jayo – Dusun Danau – Muara Kuamang – Unit I Kuamang Kuning;
 - ✓ Pengembangan Ruas jalan Muara Bungo – Pasir Putih – Trans Sungai Buluh – Dusun Danau – Muara Kuamang – Unit I Kuamang Kuning;
 - ✓ Pengembangan Ruas jalan Desa Baru Pusat Jalo – Bedaro – Simpang Desa Baru Pusat Jalo – Bukit Kemang – Tanah Tumbuh;
 - ✓ Pengembangan Ruas jalan Rantau Ikil – Aur Gading – Pulau Batu;



- ✓ Pengembangan Ruas jalan Talang Silungko – Simpang Jalan TKA – Batas Sumbar;
- ✓ Pengembangan Ruas jalan Rantau Keloyang – Rantau Asam sepanjang.
- terminal penumpang sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya, meliputi:
 - ✓ Pengembangan terminal penumpang tipe A yang merupakan kewenangan Pemerintah di Kecamatan Bathin III;
 - ✓ Pembangunan terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten di Pasar Muara Bungo, Di Kecamatan Tanah Tumbuh, Kecamatan Pelepat Ilir dan Kecamatan Jujuhan.
- terminal barang;
Pengembangan terminal barang di Kecamatan Bathin II Babeko

(2) Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a) pengembangan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan jalur Jawa - Sumatera; dengan jalur:
 - Muara Bungo – Jambi (PP);
 - Muara Bungo – Bangko - Sarolangun (PP);
 - Muara Bungo – Tebo (PP);
 - Muara Bungo – Muara Bulian (PP);
 - Muara Bungo – Kuala Tungkal (PP);
 - Muara Bungo – Muara Sabak (PP);
 - Muara Bungo – Muara Jambi (PP); dan
 - Muara Bungo – Sungai Penuh (PP).
- b) pengembangan angkutan perkotaan dengan jalur meliputi:
 - terminal tipe C – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Lintas Jambi – Tugu Batu – berputar – Jl. Jenderal Sudirman – SKB – Sungai Binjai PP;



- terminal tipe C – Jl. Jenderal Sudirman – BTN Lintas Asri – Jl. Hasanudin – Jl. RM. Thaher – Perumnas – Bandara PP;
- terminal tipe C – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Lebai Hasan – Jl. Sei Kerjan – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Hasanudin – Jl. RM. Thaher – Perumnas – Bandara PP;
- terminal tipe C – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. H. Hanafie – Jl. Dahlia – Jl. M. Yamin – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Sri Soedewi, SH – Jl. Diponegoro – Jl. Teuku Umar – Jl. RM. Thaher – Perumnas – Bandara PP; dan
- terminal tipe C – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. H. Hanafie – Jl. Dahlia – Jl. M. Yamin – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Sri Soedewi, SH – Jl. Rangkayo Hitam – Perumnas – Bandara PP.

c) pengembangan angkutan perdesaan dengan jalur meliputi:

- Muara Bungo – Tanah Tumbuh (PP);
- Muara Bungo – Limbur Lubuk Mengkuang (PP);
- Muara Bungo – Pelayang (PP);
- Muara Bungo – Lubuk Landai (PP);
- Muara Bungo – Rantau pandan (PP);
- Muara Bungo – Muara Buat (PP);
- Muara Bungo – Rantau Kelayang/Pelepat – Batas Bangko (PP);
- Muara Bungo – Kuamang Kuning/pelepat Ilir (PP);
- Muara Bungo – Jujuhan – Batas Sumatera Barat (PP); dan
- Muara Bungo – Jujuhan Ilir (PP).

d) pengembangan angkutan barang dengan jalur Jawa – Sumatera.

(3) Sistem Jaringan Kereta Api

Pengembangan jaringan Kereta Api di Kabupaten Bungo, merupakan penjabaran rencana jaringan Kereta Api di Pulau Sumatera (Trans Sumatera). Dalam pengembangan jaringan kereta api terdapat 2 jenis jaringan yaitu:



a) Jaringan Jalur KA umum

pembangunan jaringan angkutan kereta api provinsi menghubungkan

- ✓ Batas Provinsi Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo - Muara Tembesi – Muara Bulian – Kota Jambi
- ✓ Lubuk Linggau – Sarolangun – Bangko – Muara Bungo.

b) Jaringan Jalur KA Khusus

jaringan jalur KA yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut. pembangunan jaringan angkutan kereta api khusus menghubungkan

- ✓ Batas Provinsi Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Kota Jambi – Muara Sabak.
- ✓ Batas Provinsi Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Sarolangun.

c) Stasiun KA,

- stasiun penumpang
pembangunan stasiun kereta api yang berada di Perkotaan Muara Bungo
- stasiun barang;
pembangunan stasiun kereta api yang berada di Perkotaan Muara Bungo

(4) Sistem Jaringan Sungai/Danau/Penyeberangan

Dengan keberadaan 2 sungai besar yang membelas wilayah Kabupaten Bungo, maka potensi pengembangan sistem jaringan sungai sangat baik. Sistem jaringan angkutan sungai di Kabupaten Bungo jika potensi air mendukung dapat dikembangkan sistem jaringan angkutan sungai dengan alur Muara Bungo-Ujung Jabung. Untuk itu juga dibutuhkan pengembangan pelabuhan angkutan sungai yaitu pelabuhan Muara Bungo (Pelabuhan Baru Jaya Setia Ujung) di Kecamatan Pasar Muaro Bungo.



(5) Sistem Jaringan Transportasi Udara

Angkutan udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan moda transportasi pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Sistem jaringan transportasi udara terdiri dari Bandar udara sebagai simpul, rute penerbangan dan ruang udara. Untuk menunjang Kabupaten Bungo sebagai Pintu Gerbang provinsi Jambi di bagian barat, maka telah dibangun Bandar udara Muara Bungo dengan status eksisting adalah Bandar Udara Pengumpan. Untuk itu dalam 15-20 tahun mendatang Bandar Udara Muara Bungo direncanakan ditingkatkan menjadi Bandar Udara Pengumpul. Dengan rute domestik.

Untuk ruang udara penerbangan diatur mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan ini akan tercantum dalam ketentuan umum peraturan zonasi.

B. Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi terdiri dari 2 yaitu jaringan minyak dan gas bumi serta jaringan infrastruktur kelistrikan. Jaringan minyak dan gas di Kabupaten Bungo belum ada sehingga dibutuhkan pembangunan dan pengembangan sedangkan untuk jaringan listrik sudah ada sehingga yang dibutuhkan adalah pengembangan sehingga kebutuhan listrik wilayah Kabupaten Bungo dapat terpenuhi.

(1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kabupaten Bungo belum ada, tetapi dimasa mendatang kebutuhan jaringan infrastruktur khususnya gas bumi di perkotaan menjadi sangat dibutuhkan. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhan domestik di Kabupaten Bungo, perlu pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur gas khususnya di perkotaan.

(2) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Sistem jaringan energi merupakan sistem jaringan kelistrikan



jaringan tenaga listrik yang meliputi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi. Jaringan listrik yang mengalir Kabupaten Bungo adalah Jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi Lahat – Muara Bungo. Meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bungo, maka pembangunan pembangkit listrik sangat memungkinkan, dengan adanya pembangunan pembangkit listrik, maka peningkatan konsumsi listrik dapat diantisipasi. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya yang dikembangkan di Kabupaten Bungo adalah

- a) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Bathin II Pelayang dan Kecamatan Rantau Pandan.
- b) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Pelepat serta Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- c) pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Pelepat dan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem di Kabupaten Bungo meliputi

- a) pembangunan dan pengembangan interkoneksi jaringan listrik Sumatera Barat – Muara Bungo – Jambi – Muaro Jambi – Tanjung Jabung Barat – Tebo untuk transmisi SUTET.
- b) pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 275 kVA yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat – Provinsi Jambi- Provinsi Sumatera Selatan.
- c) pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 50 kVA yang menghubungkan seluruh kecamatan.
- d) pengembangan Gardu Induk Sungai Binjai di Kecamatan Bathin III;



C. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Di era digitalisasi saat ini dan trend perkembangan kedepannya, maka jaringan telekomunikasi akan menjadi faktor vital perkembangan wilayah. Dengan statusnya sebagai PKW dan pintu gerbang provinsi Jambi di bagian barat, maka kebutuhan telekomunikasi menjadi sebuah kebutuhan utama. Setiap aktivitas pendidikan, perdagangan dan jasa, pemerintahan dan kesehatan membutuhkan jaringan telekomunikasi. Informasi yang cepat, hemat, dan praktis menjadi alasan yang cukup mendasar dalam menuntut pelayanan jasa telekomunikasi yang meliputi jasa telepon, telex, telegram, dan internet.

Fasilitas telekomunikasi masih tergolong sedikit jumlahnya dan tingkat pelayanannya yang masih relatif rendah. Dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo, masih terdapat beberapa wilayah yang belum tercover jaringan telekomunikasi. Ada beberapa daerah yang telah terjangkau namun kualitasnya kurang baik untuk menunjang aktivitas telekomunikasi yang cepat, murah, dan praktis. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan jaringan telekomunikasi sehingga seluruh wilayah dapat terjangkau oleh jaringan telekomunikasi yang berkualitas dan merata.

(1) jaringan tetap

- a) Pengembangan Sentra Telepon Otomat (STO) Muara Bungo di Kecamatan Rimbo Tengah
- b) Pengembangan sistem jaringan kabel telepon antar Sentra Telepon Otomat (STO) dan jaringan di Perkotaan yang berstatus sebagai PKW dan PKL yaitu
 - ✓ Perkotaan Muara Bungo,
 - ✓ Perkotaan Rantau Ikil,
 - ✓ Perkotaan Tuo Limbur,
 - ✓ Perkotaan Rantau Kelayang,
 - ✓ Perkotaan Embacang Gedang.



(2) Jaringan Bergerak

jaringan bergerak seluler yaitu pengembangan infrastruktur telekomunikasi berupa satu tower bersama Base Transceiver Station (BTS).

D. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten, dapat meliputi:

(1) Wilayah Sungai, merupakan Wilayah Sungai Batang Hari lintas Provinsi Jambi

(2) Cekungan Air Tanah (CAT) berupa CAT Kabupaten Bungo meliputi:

- Kecamatan Pelepat;
- Kecamatan Pelepat Ilir;
- Kecamatan Bathin II Babeko;
- Kecamatan Rimbo Tengah;
- Kecamatan Bungo Dani;
- Kecamatan Pasar Muara Bungo;
- Kecamatan Bathin III;
- Kecamatan Rantau Pandan;
- Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- Kecamatan Tanah Sepenggal;
- Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
- Kecamatan Tanah Tumbuh;
- Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- Kecamatan Bathin II Pelayang;
- Kecamatan Jujuhan;
- Kecamatan Jujuhan Ilir; dan
- Kecamatan Bathin III Ulu.

(3) Jaringan irigasi berupa Daerah Irigasi (DI) meliputi:

- Daerah Irigasi (DI) kewenangan nasional berupa DI Batanghari dengan luas kurang lebih 18.936 (delapan belas



ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektar dengan luas untuk wilayah Kabupaten Bungo sebesar 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar;

- Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi di DI Sei Batang Uleh dengan luas kurang lebih 2.043 (dua ribu empat puluh tiga) hektar;
- DI kabupaten dengan luas kurang lebih 6.163 (enam ribu seratus enam puluh tiga ribu) hektar, meliputi:
 - ✓ D.I. Sei Semagai dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar terletak didusun Pelayang, Dusun Teluk Kecimbung dan Dusun Panjang di Kecamatan Bathin II Pelayang;
 - ✓ D.I. Sei Terantam Besar dengan luas kurang lebih 231 dua ratus tiga puluh satu) hektar terletak didusun Tanah Bekali dan Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal;
 - ✓ D.I. Sei Talang Cabuk dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar terletak didusun Teluk Pandak Kecamatan Tanah Sepenggal;
 - ✓ D.I. Sei Jentayo dengan luas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar terletak didusun sungai Puri dan Paku Aji Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
 - ✓ D.I. Sei Kembang dengan luas kurang lebih 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hektar terletak didusun Empelu Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
 - ✓ D.I. Sei Embacang Kecil dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar terletak didusun Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
 - ✓ D.I. Sei Teluk Pandak dengan luas kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) hektar didusun Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
 - ✓ D.I. Sei Berunai dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar didusun Aur Gading Kecamatan Jujuhan Ilir
 - ✓ D.I. Sei Teluk Panjang dengan luas kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hektar didusun Teluk Panjang dan Lubuk Benteng Kecamatan Bathin III;



- ✓ D.I. Sei Pulau Pekan dengan luas kurang lebih 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) hektar didusun Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani;
- ✓ D.I. Sei Lubuk Mayan dengan luas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar didusun Lubuk Mayan Kecamatan Rantau Pandan;
- ✓ D.I. Sei Andik dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar didusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- ✓ D.I. Sei Duren dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar didusun didusun Peninjau Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
- ✓ D.I. Sei. Betung Bedarah dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar didusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Senamat Ulu II dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar didusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Belakang Rumah dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar didusun Buat Kecamatan Bathin III Ulu
- ✓ D.I. Kerang dengan luas kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hektar didusun Lubuk Landai Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
- ✓ D.I. Tembang Arang dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar didusun Sungai Arang Kecamatan Bungo Dani;
- ✓ D.I. Bulim dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar didusun Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh;
- ✓ D.I. Sei Limau dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar didusun Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
- ✓ D.I. Sei Anak Pengian dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar dikampung Penual Kecamatan Jujuhan;



- ✓ D.I. Sei Babeko dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar didusun Babeko Kecamatan Bathin II Babeko;
- ✓ D.I. Sei Dusun Manggis dengan luas kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh) hektar didusun Sungai Binjai Kecamatan Bathin III;
- ✓ D.I. Sei Dusun Tebat dengan luas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar didusun Pulau Jelmu Kecamatan Jujuhan;
- ✓ D.I. Sei. Langkap dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar didusun Lubuk Kayu Aro Kecamatan Rantau Pandan;
- ✓ D.I. Sei Lubuk Kayu Aro dengan luas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar didusun Lubuk Kayu Aro Kecamatan Rantau Pandan;
- ✓ D.I. Sei Rantau Ikil dengan luas kurang lebih 108 (seratus delapan) hektar didusun Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan;
- ✓ D.I. Sei Senamat dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar didusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei Talang Pantai dengan luas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) hektar didusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani;
- ✓ D.I. Lebak Gedang dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar didusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani;
- ✓ D.I. Tembang Seberang dengan luas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar didusun Talang Pantai Kecamatan Bungo Dani;
- ✓ D.I. Jerinjing dengan luas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektar didusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal;
- ✓ D.I. Sunsang dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar didusun Telentam Kecamatan Tanah Sepenggal
- ✓ D.I. Mukut dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar didusun Tebing Tinggi Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;



- ✓ D.I. Sei. Buluh dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar didusun Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- ✓ D.I. Sei. Manggis dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar didusun Tanjung Agung Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- ✓ D.I. Sei. Taman Cucur dengan luas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar didusun Mangun Jayo Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
- ✓ D.I. Pangkah Hulu dengan luas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektar didusun Rantau Duku Kecamatan Rantau Pandan;
- ✓ D.I. Kumbo dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar di Dusun Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan;
- ✓ D.I. Sei. Bangar dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar di Dusun Baru Sipin Kecamatan Rantau Pandan;
- ✓ D.I. Lekai dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar di Dusun Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan;
- ✓ D.I. Sei. Gedang Senamat Ulu dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar didusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Senamat Ulu I dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar didusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Tegan dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar didusun Senamat Ulu Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Penyengat dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar didusun Karak Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Talang Kundo dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar didusun Karak Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Talang Paku dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar didusun Karak Kecamatan Bathin III Ulu;



- ✓ D.I. Sei. Alai dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar didusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Ketak dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar didusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Cino I dengan luas kurang lebih 30(tiga puluh) hektar didusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Cino II dengan luas kurang lebih 30(tiga puluh) hektar;
- ✓ D.I. Sei. Batang Buat dengan luas kurang lebih 60(enam puluh) hektar didusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Agam I dengan luas kurang lebih 56(lima puluh enam) hektar didusun Laman Panjang Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Mengkuang Kecil dengan luas kurang lebih 109 (seratus sembilan) hektar didusun Laman Panjang Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Simpaibung dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar didusun Laman Panjang Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Buli-Buli dengan luas kurang lebih 30(tiga puluh) hektar didusun Laman Panjang Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Telang dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar didusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Salo Kampung Baru dengan luas kurang lebih 20(dua puluh) hektar didusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Kumbuk Kecil dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar didusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Agam II dengan luas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar didusun Buat Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Letung I dengan luas kurang lebih 60(enam puluh) hektar didusun Buat Kecamatan Bathin III Ulu;



- ✓ D.I. Letung II dengan luas kurang lebih 30(tiga puluh) hektar didusun Buat Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Tebat dengan luas kurang lebih 60(enam puluh) hektar didusun Buat Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Gedang Buat dengan luas kurang lebih 90(sembilan puluh) hektar didusun Buat Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Duyung dengan luas kurang lebih 20(dua puluh) hektar didusun Muara Buat Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Lubuk Larangan dengan luas kurang lebih 30(tiga puluh) hektar didusun Timbolasi Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Singo Lubuk Pauh dengan luas kurang lebih 40(empat puluh) hektar didusun Timbolasi Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Lubuk Larangan Seberang dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar didusun Timbolasi Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Kolam Hidup, Petai, Kundo, Penyengat dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar didusun Apung Ilir Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. Sei. Apung Mudik dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar didusun Apung Mudik Kecamatan Bathin III Ulu ;
- ✓ D.I. Sei. Perabung dengan luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar didusun Laman Panjang Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ D.I. KK Unit XIV-1 dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar didusun Mulya Jaya Kecamatan Pelepat;
- ✓ D.I. KK Unit XIV-2 dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar didusun Mulya Jaya Kecamatan Pelepat;
- ✓ D.I. Jelutung dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar di dusun Mulya Jaya Kecamatan Pelepat;
- ✓ D.I. Tembesu dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar didusun Mulya Jaya Kecamatan Pelepat;



- ✓ D.I. KK Unit IX dengan luas kurang lebih 5(lima) hektar didusun Gapura Suci Kecamatan Pelepat;
 - ✓ D.I. Aburan dengan luas kurang lebih 5(lima) hektar didusun Gapura Suci Kecamatan Pelepat;
 - ✓ D.I. Ketapang dengan luas kurang lebih 5(lima) hektar didusun Gapura Suci Kecamatan Pelepat;
 - ✓ D.I. Nusa Indah dengan luas kurang lebih 5(lima) hektar didusun Gapura Suci Kecamatan Pelepat;
 - ✓ D.I. KK Unit XV-1 dengan luas kurang lebih 50(lima puluh) hektar didusun Cilodang Kecamatan Pelepat;
 - ✓ D.I. KK Unit XV-2 dengan luas kurang lebih 40(empat puluh) hektar didusun Cilodang Kecamatan Pelepat;
 - ✓ D.I. KK Unit III dengan luas kurang lebih 10(sepuluh) hektar didusun Sumber Harapan Kecamatan Pelepat Ilir;
 - ✓ D.I. KK Unit X-1 dengan luas kurang lebih 5(lima) hektar didusun Mulya Bakti Kecamatan Pelepat Ilir;
 - ✓ D.I. KK Unit X-2 dengan luas kurang lebih 5(lima) hektar didusun Mulya Bakti Kecamatan Pelepat Ilir;
 - ✓ D.I. KK Unit VIII dengan luas kurang lebih 3(tiga) hektar didusun Lingga Kuamang Kecamatan Pelepat Ilir;
 - ✓ D.I. Rumbio dengan luas kurang lebih 10(sepuluh) hektar didusun Koto Jayo Kecamatan Pelepat Ilir;
 - ✓ D.I. Lubuk dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar didusun Lubuk Kecamatan Pelepat Ilir;
 - ✓ D.I. Danau dengan luas kurang lebih 20(dua puluh) hektar didusun Danau Kecamatan Pelepat Ilir;
 - ✓ D.I. Saluk dengan luas kurang lebih 20(dua puluh) hektar didusun Danau Kecamatan Pelepat Ilir; dan
 - ✓ D.I. Sei. Raman dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar didusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang.
- (4) Jaringan air baku untuk air bersih; dan/atau
- Sumber Sungai Batang Bungo melalui pengelolaan:
 - ✓ IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Sungai Pinang untuk melayani Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan



Bungo Dani, Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Bathin III; dan

✓ IPA (Instalasi Pengelolaan Air) unit Tanjung Agung untuk melayani Kecamatan Muko-Muko Bathin VII.

• Sumber Sungai Batang Tebo melalui pengelolaan:

✓ IPA (Instalasi Pengelolaan Air) unit Lubuk Landai untuk melayani Kecamatan Tanah Sepenggal;

✓ IPA (Instalasi Pengelolaan Air) unit Tanah Tumbuh untuk melayani Kecamatan Tanah Tumbuh;

✓ IPA (Instalasi Pengelolaan Air) unit Embacang Gedang untuk melayani Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;

✓ IPA (Instalasi Pengelolaan Air) unit Candi untuk melayani Kecamatan Tanah Sepenggal; dan

✓ IPA (Instalasi Pengelolaan Air) SKB untuk melayani Kecamatan Bathin III, Kecamatan Bathin II Babeko dan Kecamatan Pasar Muara Bungo.

(5) Sistem pengendalian daya rusak air .

• Embung di Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Pelepat, Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Pelepat Ilir; dan

• Pengembangan pembangunan embung di Kecamatan Pelepat Ilir dan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.

E. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya yang berada di wilayah kabupaten, yaitu:

(1) Sistem Jaringan Persampahan meliputi:

• Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berada di Kecamatan Bathin II Babeko;

• Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional dengan sistem *sanitary landfill* dan penerapan pengelolaan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) direncanakan berada di Kecamatan Pelepat; dan



- pengembangan Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) di seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) meliputi:
- Pemanfaatan SPAM Muara Bungo yang melayani Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kecamatan Rimbo Tengah, Kecamatan Bungo Dani, dan Kecamatan Bathin III;
 - pemanfaatan SPAM Embacang Gedang yang melayani Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
 - pemanfaatan SPAM Purwo Sari melayani Kecamatan Pelepat Ilir.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan limbah
- Sistem pengelolaan air limbah setempat (*on site*) meliputi:
 - ✓ pengelolaan limbah domestik terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo; dan
 - ✓ pengelolaan limbah non-domestik terdapat di Kecamatan Rimbo Tengah dan Kecamatan Pasar Muara Bungo.
 - Sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off site*) meliputi:
 - ✓ pengelolaan limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal terdapat di Perkotaan Muara Bungo, Bungo Dani, Rimbo Tengah, Bathin III dan
 - ✓ pengelolaan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) terdapat di Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Pelepat, Kecamatan Pelepat Ilir, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kecamatan Rantau Pandan dan Kecamatan Babeko
- (4) Sistem jaringan drainase, meliputi
- jaringan drainase primer terdiri atas Sungai Batang Bungo dan Sungai Batang Tebo
 - jaringan drainase sekunder terdiri atas jaringan utama dan kawasan lingkungan permukiman yang terdapat di sepanjang jalan utama perkotaan dan perdesaan.
- (5) Jalur dan ruang evakuasi bencana



- jalur evakuasi bencana letusan gunung api Kerinci adalah Sungai Penuh – Pungut Mudik – Pasir Jaya – Sungai Kuning – Limbur Lubuk Mengkuang
- jalur evakuasi bencana longsor meliputi:
 - ✓ ruas jalan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - ✓ ruas jalan Kecamatan Pelepat;
 - ✓ ruas jalan Kecamatan Tanah Tumbuh; dan
 - ✓ ruas jalan Kecamatan Bathin III Ulu.
- jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
 - ✓ ruas jalan Kecamatan Pasar Muara Bungo;
 - ✓ ruas jalan Kecamatan Bathin III;
 - ✓ ruas jalan Kecamatan Bathin III Ulu;
 - ✓ ruas jalan Kecamatan Rantau Pandan; dan
 - ✓ ruas jalan Kecamatan Pelepat Ilir.
- ruang evakuasi bencana letusan gunung api Kerinci meliputi:
 - ✓ sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - ✓ kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang; dan
 - ✓ sarana telekomunikasi di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- ruang evakuasi bencana longsor berada di kantor desa dan bangunan sekolah meliputi:
 - ✓ kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - ✓ kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Pelepat;
 - ✓ kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Tanah Tumbuh; dan
 - ✓ kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Bathin III Ulu.
- ruang evakuasi bencana banjir berada di kantor desa dan bangunan sekolah meliputi:
 - ✓ pengembangan kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Pasar Muara Bungo;



- ✓ kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Bathin III;
- ✓ kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Bathin III Ulu;
- ✓ kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Rantau Pandan; dan
- ✓ kantor desa dan bangunan sekolah di Kecamatan Pelepat Ilir.

2.7.2 Rencana Pola Ruang

Pola Ruang merupakan rencana alokasi penggunaan ruang di Kabupaten Bungo dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang menjadi dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten Bungo serta menjadi dasar pengalokasi ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi dan pelestarian lingkungan.

1. Kawasan Lindung

Kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Bungo seluas Kurang Lebih 68.808 Ha, yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya kurang lebih seluas 22.110 Ha, kawasan perlindungan setempat kurang lebih seluas 9.354 Ha, dan kawasan konservasi kurang lebih seluas 37.344 Ha,

Tabel 2.64
Kawasan Lindung di Pola Ruang Kabupaten Bungo

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
I	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	22.110
	Kawasan Hutan Lindung	22.110
II	Kawasan Perlindungan Setempat	9.354
	Sempadan Sungai	9.185
	Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk	169
	Ruang Terbuka Hijau	2.915



No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
III	Kawasan Konservasi	37.344
	Kawasan Pelestarian Alam	
	a. Taman Nasional	37.339
	b. Taman Wisata Alam	5
IV	Kawasan Cagar Budaya	-

Sumber data: Materi Teknis (Matek) RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Bungo terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan pertanian, dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.65
Kawasan Budidaya di Pola Ruang Kabupaten Bungo

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
I	Kawasan Hutan Produksi	90.229
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	85.515
	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi	4.714
II	Kawasan Hutan Rakyat	1.469
III	Kawasan Peruntukan Pertanian	265.816
	Kawasan Tanaman Pangan	5.131
	Kawasan Hortikultura	3.562
	Kawasan Perkebunan	257.122
IV	Kawasan Pertambangan dan Energi	11.962
	Kawasan Pertambangan Mineral	4.859
	Kawasan Pertambangan Batu Bara	7.105
V	Kawasan Peruntukan Permukiman	27.990
	Kawasan Permukiman Perkotaan	14.577
	Kawasan Permukiman Perdesaan	13.413
VI	Kawasan Cagar Budaya	-

Sumber Data: Materi Teknis (Matek) RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.



2.7.3 Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya. Kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Bungo meliputi:

- a) Kawasan Strategis Nasional yang penetapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
- b) Kawasan Strategis Provinsi yang penetapannya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 10 tahun 2013
- c) Kawasan Strategis Kabupaten yang penentuannya didasarkan pada hasil analisis serta perumusan dan kesepakatan stakeholders daerah

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di wilayah Kabupaten Bungo dan telah ditetapkan di Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah KSN Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tepatnya di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kecamatan Bathin III Ulu, Kecamatan Tanah Tumbuh dan Kecamatan Pelepat. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Merupakan asset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hamper punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;



Arahan untuk TNKS adalah Rehabilitasi/Revitalisasi, kawasan strategis provinsi di Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi 2013-2033 adalah perkotaan Muara Bungo-Muara Tebo. Perkotaan Muara Bungo-Muara Tebo merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi. Penetapan Perkotaan Muara Bungo sebagai kawasan strategis provinsi karena merupakan kawasan yang pertumbuhannya paling cepat dan memiliki pengaruh terhadap perkembangan kawasan sekitarnya. Selain pertimbangan Muara Bungo sebagai pusat perdagangan dan jasa untuk wilayah Provinsi Jambi bagian barat, Kawasan Muara Bungo juga merupakan kawasan andalan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Kawasan Andalan Muara Bungo dan sekitarnya dengan sektor utama adalah perkebunan, pertanian, kehutanan, panas bumi, minyak dan gas bumi.

Dengan memperhatikan dasar perumusan kawasan strategis, khususnya kriteria kawasan, maka dilakukan identifikasi terhadap wilayah kabupaten Bungo yang dinilai memiliki potensi untuk menjadi kawasan strategis. Berdasarkan hasil identifikasi ada beberapa kawasan yang dinilai memiliki potensi untuk dijadikan kawasan strategis kabupaten telah ditetapkan dalam perda RTRW dan ada kawasan yang memiliki kriteria sebagai kawasan strategis tetapi belum di akomodir dalam Perda RTRW

A. Kawasan Strategis yang telah ada di Perda RTRW

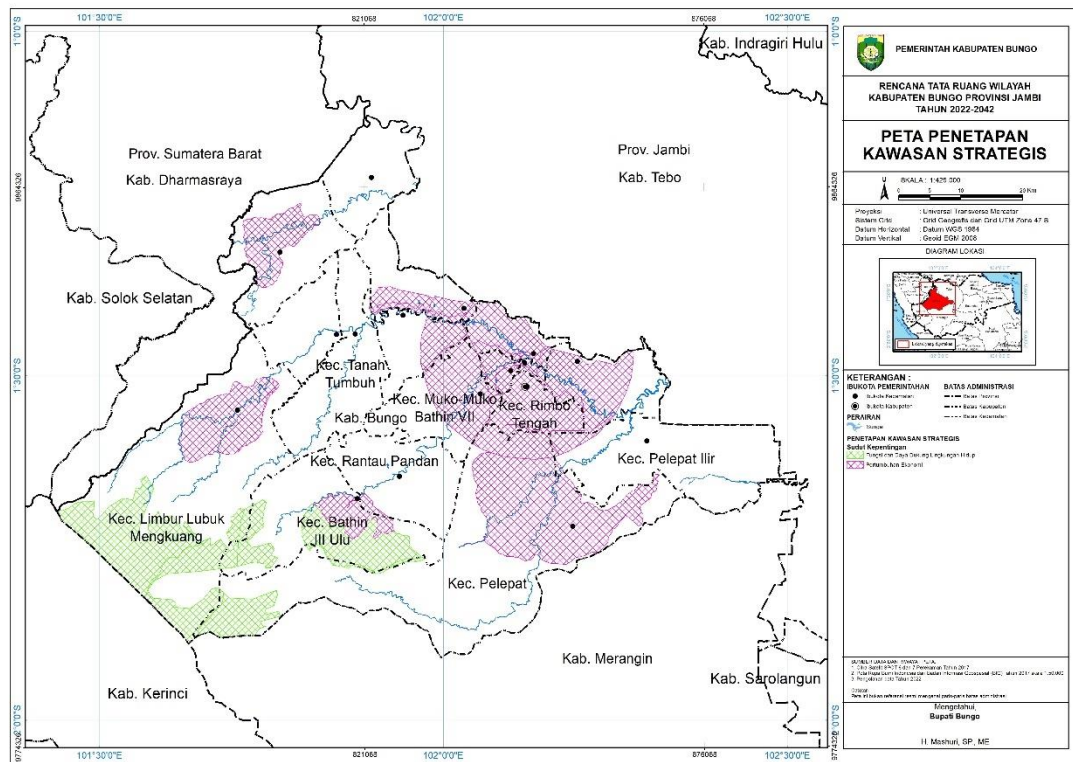
- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
 - Kota Terpadu Mandiri Bathin III Ulu di Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Rantau Pandan; dan
 - Kawasan Perkotaan Rantau Ikil, Tuo Limbur, Perkotaan Rantau Kelayang, dan Perkotaan Embacang Gedang.
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
 - Hutan Lindung Bukit Panjang-Bukit Bayur seluas 13.529,40 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh sembilan

koma empat puluh) hektar (SK Menhut Nomor SK.739/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009)

B. Kawasan Strategis potensial untuk di Revisi RTRW

- 1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan sekitar bandar Udara Muara Bungo.

Gambar 2.34
Peta Kawasan Strategis Wilayah Perencanaan Kabupaten Bungo



Sumber Data: Materi Teknis (Matek) RTRW Kabupaten Bungo Tahun 2022-2042.

2.7.4 Daya Dukung Lingkungan

1. Perubahan Penutupan Lahan

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada kebutuhan sumberdaya alam yang semakin meningkat terutama kebutuhan sumberdaya lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar tersebut maka akan terjadi pergeseran pemanfaatan sumberdaya lahan. Kabupaten Bungo masih mengandalkan sub sektor perkebunan dalam pembangunan perekonomian terutama komoditi perkebunan karet dan kelapa sawit, sehingga kebutuhan lahan untuk pengembangan komoditi tersebut semakin meningkat.



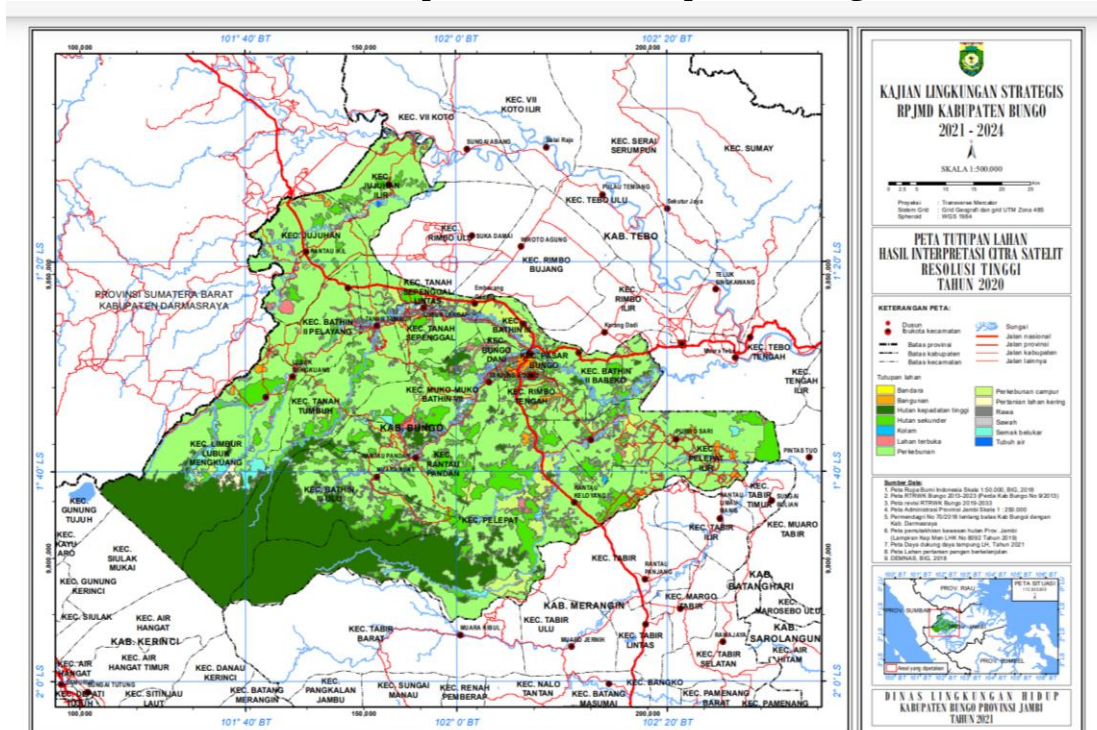
Berdasarkan peta perubahan penutupan lahan dari tahun 2006-2018 lahan tanaman pangan, perkebunan dan pertambangan mengalami pertumbuhan dari tahun ketahun. Pada lahan tanaman pangan pada tahun 2006 tercatat seluas 7.549 hektar meningkat menjadi 13.325 hektar. Sub sektor perkebunan meningkat pada tahun 2006 seluas 32.729 hektar menjadi 58.550 hektar, dan sektor pertambangan meningkat dari tahun 2006 seluas 2.687 hektar menjadi 4.513 hektar pada tahun 2018. Peningkatan luas lahan sub sektor perkebunan paling meningkat. Sementara tutupan lahan hutan semakin menurun dari tahun 2006-2018 baik tutupan hutan lahan kering primer dan hutan sekunder. Tercatat hutan lahan kering primer luas penutupan lahan pada tahun 2006 seluas 64.834 hektar turun menjadi 63.777 hektar pada tahun 2018, begitu juga dengan hutan sekunder mengalami penurunan penutupan. Penurunan penutupan lahan hutan ini disebabkan adanya illegal logging, perambahan, kebakaran hutan, perubahan fungsi ke sektor non kehutanan.

Perubahan penutupan lahan hutan dapat berdampak buruk pada ekosistem lingkungan yaitu pada fungsi ekologi hutan, seperti penyerap air, pengendali banjir, emisi carbon, habitat satwa, keanekaragaman hayati, dan fungsi sosial dan ekonomi bagi pembangunan Kabupaten Bungo. Penurunan tutupan lahan ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan di Kabupaten Bungo semakin menurun.

Tabel 2.66
Perubahan penutupan lahan Kabupaten Bungo dari
Tahun 2006-2018

NO	Tutupan lahan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Lahan terbuka	34.822	35.567	24.856	20.218	20.494	21.721
2	Perkebunan	32.729	37.515	44.646	58.119	58.407	58.550
3	Pertambangan	2.687	2.687	3.179	3.575	3.836	4.513
4	Hutan lahan kering primer	64.834	64.425	64.288	63.820	63.777	63.777
5	Transmigrasi	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894	10.894
6	Tubuh air	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359	1.359
7	Pertanian Campuran	277.038	274.008	276.971	262.600	261.581	259.869
8	Hutan Sekunder	35.405	33.313	33.573	35.120	33.647	33.308
9	Lahan tanaman pangan	7.549	7.549	7.549	11.612	13.321	13.325
	Jumlah	467.316	467.316	467.316	467.316	467.316	467.316

Gambar 2.35
Peta Penutupan Lahan Kabupaten Bungo



Sumber Data: KLHS RPJMD Tahun 2021-2024.

2. Daya Tampung DAS

Kabupaten Bungo termasuk dalam DAS Batanghari dan terdiri dari Sb DAS Tebo, Sub DAS Bungo, Sub DAS Jujuhan, Sub DAS Tabir. Daerah aliran sungai merupakan daerah yang sangat berfungsi penting bagi kehidupan masyarakat dan ekosistemnya. Kualitas daerah aliran sungai sangat ditentukan oleh factor biofisik dan sosial ekonomi masyarakat. Sub DAS Tebo-Bungo merupakan sub das yang luas di Kabupaten Bungo. Berdasarkan luas DAS yang terdapat pada Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Luas DAS pada Wilayah Kabupaten Bungo

No	Nama DAS	Wilayah Kecamatan	Luas (Ha)
1	DAS Tabir	Kec. Pelepat Ilir dan Pelepat	24.334
2	DAS Batanghari Ulu	Kec. Jujuhan Ilir	3.635
3	DAS Jujuhan	Kec. Jujuhan, Jujuhan Ilir, dan Limbur Lubuk Mengkuang	43.757
4	DAS Tebo-Bungo	Kecamatan Lainnya	396.366
5	DAS Tebo-Bungo (luar wilayah kabupaten)		39.938
6	DAS Jujuhan (luar wilayah kabupaten)		117.345

Sumber data: KLHS RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045.



SUB DAS Tebo-Bungo merupakan Sub DAS yang paling luas di Kabupaten Bungo dengan luas 396.366 hektar dengan volume 1.981.830 M3, dengan daya evaporasi sebanyak 297.274,50 dan kemampuan infiltrasi sebesar 396.366 m3 sehingga daya tampung yaitu 1.288.189,50 m3. Daya tampung DAS akan mengalami penurunan apabila terjadi erosi dan sedimentasi yang terus menerus sehingga akan menyebabkan semakin terjadinya pendangkalan sungai. Perlindungan vegetasi hutan pada wilayah hulu dan sempadan sungai sangat penting dilakukan. Upaya konservasi tanah dan air pada wilayah DAS sangat penting dalam pengelolaan DAS di wilayah bungo. Pada tabel berikut diuraikan daya tampung DAS pada wilayah Kabupaten Bungo.

Tabel 2.68
Daya Tampung DAS pada Wilayah Kabupaten Bungo

No	Nama DAS	Luas Ha	CH max	volume (m3)	Evaporasi	Infiltrasi	Air Netto Masuk Sungai (m3)
1	DAS Batanghari	3.635	50	18,175	2,726.25	3,635.00	11,813.75
2	DAS Bungo	396.366	50	1,981,830	297,274.50	396,366.00	1,288,189.50
3	DAS Bungo luar	39.938	50	199,690	29,953.50	39,938.00	129,798.50
4	DAS Jujuhan	43.757	50	218,785	32,817.75	43,757.00	142,210.25
5	DAS Jujuhan luar	117.345	50	586,725	88,008.75	117,345.00	381,371.25
6	DAS Tabir	24.334	50	121,670	18,250.50	24,334.00	79,085.50

Sumber data: KLHS RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045.

3. Daya Dukung Sumber Daya Alam

Berdasarkan analisis daya dukungan sumberdaya alam berupa pangan, air, serat, energi dan sumber genetik di Kabupaten Bungo baik untuk daya dukung untuk pangan, air bersih, penyediaan serat, energi dan sumber genetik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Luas (Ha) areal di Kabupaten Bungo berdasarkan Daya Dukung Sumber Daya Alam

No	Daya Dukung	P1	P2	P3	P4	P5
1	Sangat Rendah	536	379	286	161	249
2	Rendah	232	263	601	254	2
3	Sedang	286	536	170	650	702
4	Tinggi	299	335	235	465	459
5	Sangat Tinggi	368	208	429	191	309
Jumlah		1.721	1.721	1.721	1.721	1.721

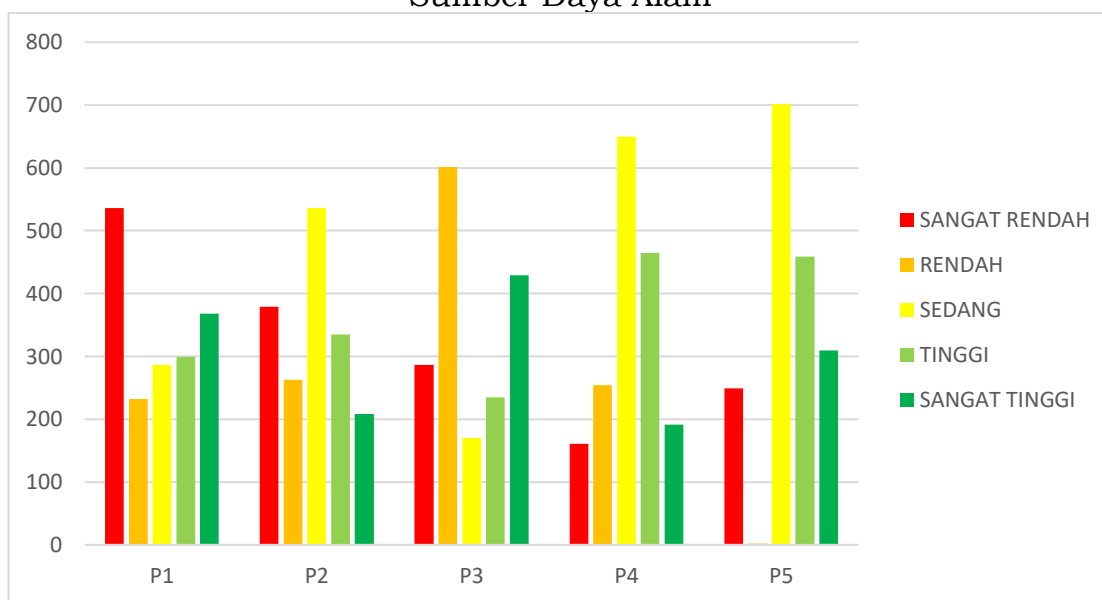
Sumber data: Olahan Tim Perumus KLHS.



Keterangan:

- P1 = Jasa Penyediaan Pangan
- P2 = Jasa Penyediaan Air Bersih
- P3 = Jasa Penyediaan Serat
- P4 = Jasa Penyediaan Energi
- P5 = Jasa Penyediaan Sumber Daya Genetik

Gambar 2.36
Luas (Ha) areal di Kabupaten Bungo berdasarkan Daya Dukung Sumber Daya Alam



Sumber data: Olahan Tim Perumus KLHS.

4. Daya Dukung Jasa Lingkungan.

Analisis daya dukung jasa lingkungan untuk jasa pengaturan iklim, pengaturan tata air, pengaturan pengendalian bencana, pengaturan pemurnian air, pengaturan limbah, pengaturan kualitas udara, penyerbukan alam dan jasa pengaturan hama dan penyakit di kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Luas (Ha) Areal Di Kabupaten Bungo Berdasarkan Daya Dukung Jasa Lingkungan

No	Daya Dukung	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
1	Sangat Rendah	529	172	261	228	202	243	252	271
2	Rendah	373	77	477	23	520	657	269	270
3	Sedang	396	601	549	988	540	440	735	602
4	Tinggi	268	398	390	185	353	172	445	461
5	Sangat Tinggi	155	473	44	297	106	209	20	117
Jumlah		1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721	1.721

Sumber data: Olahan Tim Perumus KLHS.

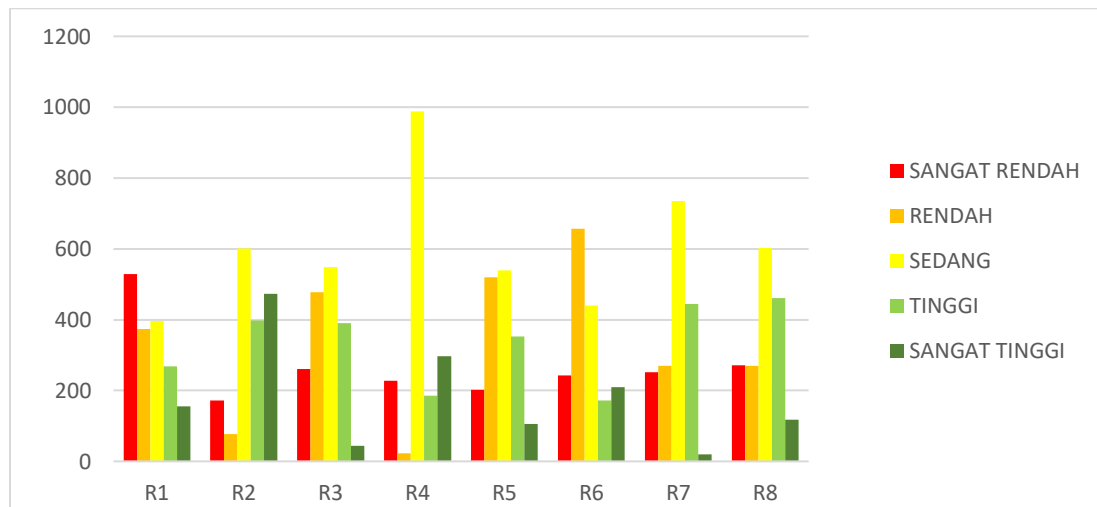


Keterangan:

- R1 = Jasa Pengaturan Iklim
- R2 = Jasa Pengaturan Tata Aliran Air Dan Banjir
- R3 = Jasa Pengaturan Pengendalian Bencana Alam
- R4 = Jasa Pengaturan Pemurnian Air
- R5 = Jasa Pengaturan Penguraian Limbah
- R6 = Jasa Pengaturan Kualitas Udara
- R7 = Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami,
- R8 = Jasa Pengaturan Pengendalian Hama Penyakit

Gambar 2.37

Luas (Ha) Areal Di Kabupaten Bungo Berdasarkan Luas (Ha) Areal Di Kabupaten Bungo Berdasarkan Daya Dukung Jasa Lingkungan



Sumber data: Olahan Tim Perumus KLHS.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Analisis isu strategis adalah suatu kerangka analisis yang digunakan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Kerangka ini membantu dalam menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa datang. Isu strategis bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis juga mencerminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi atau komunitas yang dilayani.



Penyusunan analisis isu strategis daerah juga harus memperhatikan isu yang terjadi secara nasional. Berdasarkan RPJPN 2025-2045, tiga isu utama dalam penyusunan RPJPN adalah sebagai berikut :

1. Indonesia telah berada dalam kondisi Middle Income Trap (jebakan pendapatan menengah) selama 30 tahun. Pembangunan ekonomi Indonesia masih mengandalkan sektor ekstraktif dengan tingkat produktivitas dan kompleksitas yang rendah serta cenderung menurun, hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi ekonomi.
2. Pembangunan sosial masih tertinggal yang tercermin dari beberapa aspek seperti penurunan angka kemiskinan yang melambat, perlindungan sosial yang masih terfragmentasi, kesenjangan partisipasi dan kualitas pendidikan, serta rendahnya status dan kapasitas sistem kesehatan. Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi sosial.
3. Birokrasi pemerintah dan institusi publik belum efektif, kondisi hiper regulasi yang disertai rendahnya kualitas regulasi, serta pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan yang menjadi cerminan kondisi tata kelola belum optimal. Hal ini menunjukkan urgensi dilakukannya transformasi tata kelola, serta diperlukan dukungan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Selain RPJPN, dalam penyusunan isu strategis juga memperhatikan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Bungo periode sebelumnya. Pada RPJPD 2005-2025 terdapat 12 sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Kedua belas sasaran tersebut dan capaiannya adalah:

1) Sasaran 1:

Meningkatkan pengembangan ekonomi unggulan dan sumberdaya yang berdaya saing



Untuk mencapai target pada Sasaran 1 dicapai melalui 3 indikator dengan realisasi mencapai 67,45 persen.

2) Sasaran 2:

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pemanfaatan IPTEK

Untuk mencapai target pada Sasaran 2 dicapai melalui 4 indikator dengan realisasi mencapai 125,28 persen.

3) Sasaran 3:

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Untuk mencapai target pada Sasaran 3 dicapai melalui 2 indikator dengan realisasi mencapai 64,84 persen.

4) Sasaran 4:

Meningkatkan pengembangan inovasi berbasis IPTEK

Untuk mencapai target pada Sasaran 4 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 152 persen.

5) Sasaran 5:

Meningkatkan kemandirian masyarakat, demokrasi dan keterbukaan informasi publik

Untuk mencapai target pada Sasaran 5 dicapai melalui 2 indikator dengan realisasi mencapai 92,51 persen.

6) Sasaran 6:

Meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan HAM

Untuk mencapai target pada Sasaran 6 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 104 persen.

7) Sasaran 7:

Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat



Untuk mencapai target pada Sasaran 7 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 390 persen.

8) Sasaran 8:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan budaya

Untuk mencapai target pada Sasaran 8 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 166,7 persen.

9) Sasaran 9:

Meningkatkan pembangunan kawasan strategis dan daerah tertinggal yang berkelanjutan

Untuk mencapai target pada Sasaran 9 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 100 persen.

10) Sasaran 10:

Meningkatkan pembangunan pedesaan dan pengurangan kesenjangan daerah

Untuk mencapai target pada Sasaran 10 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 86,25 persen.

11) Sasaran 11:

Meningkatkan pengentasan kemiskinan, pemenuhan pangan dan partisipasi perempuan

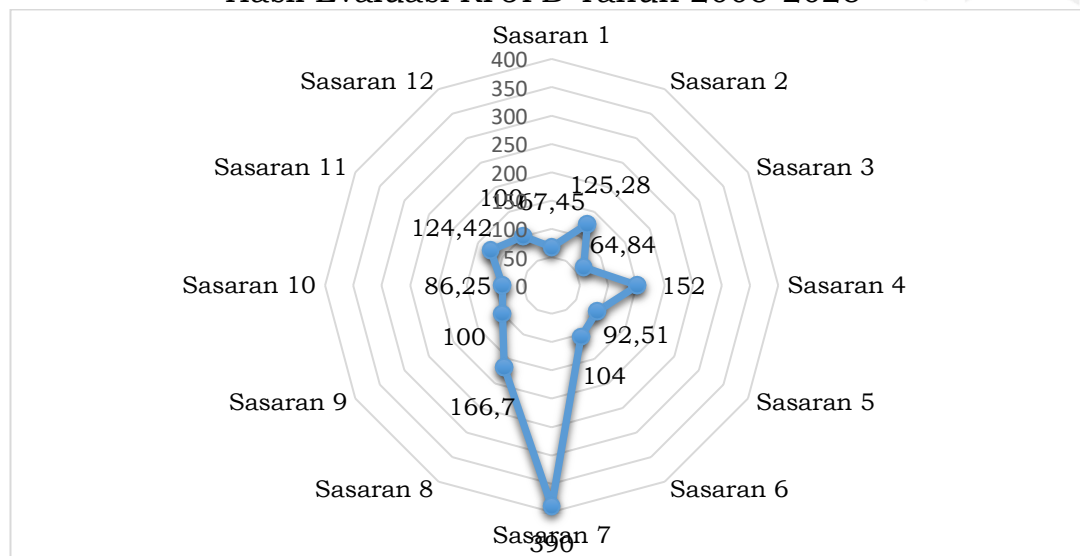
Untuk mencapai target pada Sasaran 11 dicapai melalui 4 indikator dengan realisasi mencapai 124,42 persen.

12) Sasaran 12:

Meningkatkan pengembangan SDA yang berwawasan lingkungan

Untuk mencapai target pada Sasaran 12 dicapai melalui 1 indikator dengan realisasi mencapai 100 persen.

Gambar 3.1
Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025



Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2005-2025

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ada empat sasaran pembangunan yang belum mencapai target. Keempat sasaran tersebut adalah Sasaran 1, Meningkatkan pengembangan ekonomi unggulan dan sumberdaya yang berdaya saing; Sasaran 3, Meningkatkan sumberdaya manusia; Sasaran 5, Meningkatkan kemandirian masyarakat, demokrasi dan keterbukaan informasi publik; dan Sasaran 10, meningkatkan pembangunan pedesaan dan pengurangan kesenjangan daerah. Keempat sasaran ini menjadi bagian dari isu strategis pada RPJPD 2025-2045.

Dalam dokumen lainnya, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045, dinyatakan bahwa Rekomendasi Sasaran Pokok pembangunan berikutnya antara lain :

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi maju, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal.
2. Terwujudnya ketahanan sosial dan pendidikan berkualitas berbasis kekuatan dan kearifan budaya
3. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, adil, berwibawa dan Terpercaya, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
4. Terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas dengan tingkat resiliensi yang tinggi, dan



5. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bungo yang beriman dan bertaqwa

Sedangkan untuk Arah Kebijakan Strategis yang direkomendasikan adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan pertumbuhan penduduk berbudaya dan berkualitas
2. Mengupayakan secara maksimal pelestarian ekosistem hutan dan sumber air.
3. Mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan.
4. Mengoptimalkan pencapaian ketahanan dan keamanan pangan.
5. Mengintegrasikan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang adil, merata dan berkelanjutan.
6. Mengembangkan perencanaan pembangunan yang komprehensif, fleksibel dan partisipatif.

Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis dengan memperhatikan dokumen-dokumen pendukung dengan hasil sebagai berikut :

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan atau pada akhirnya dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan diberbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Bungo ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik.



Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2025-2045 harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bungo, diantaranya adalah:

1. PDRB masih didominasi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian. Hal ini juga disebabkan Daya saing produk unggulan Kabupaten Bungo secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas, kualitas, nilai tambah maupun skala ekonomi produk unggulan tersebut. Selain itu juga belum dimanfaatkannya potensi pengembangan sektor jasa sebagai sumber PDRB.
2. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur (listrik, air bersih, transportasi serta pemukiman dan fasilitas umum] baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Saat ini kondisi infrastruktur belum merata dimana jalan dalam kondisi baik baru mencapai 63,38%; Jembatan dalam kondisi baik mencapai 79,39% dan Irigasi yang mencapai 70,18%. Infrastruktur bandara juga perlu penambahan dimana saat ini layanan sisi darat baru mencapai 54,77%.
3. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, yang tercermin dari tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. IPM Kabupaten Bungo tahun 2022 masih berada dibawah IPM Provinsi Jambi dan Nasional. Selisih IPM Kabupaten Bungo dengan IPM Provinsi Jambi sebesar 1,59 poin, sedangkan selisih dengan IPM Nasional sebesar 2,36 poin. Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi IPM Kabupaten Bungo masih menempati peringkat kelima
4. Masih banyak penduduk miskin yang tergambarkan melalui angka kemiskinan daerah yaitu 5,36%. Meski nilai tersebut jauh dibawah angka kemiskinan nasional dengan nilai 9,54%.
5. Kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh eksploitasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi serta belum optimalnya penerapan hukum yang menyangkut illegal mining dan illegal logging.



6. Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai angka 5,50% menunjukkan rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja dan menyiapkan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif merupakan tantangan yang harus dihadapi di era industry 4.0 ini
7. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kinerja birokrasi dan budaya kerja/etos kerja. Hal ini disebabkan belum terpetakannya potensi SDM serta tidak terlaksananya sistem reward dan punishment.
8. Pelayanan berbasis elektronik menjadi tantangan untuk dikembangkan dengan kendala saat ini berupa regulasi dan sarana serta prasarana pendukung.
9. Kepastian hukum yang belum optimal dikarenakan budaya hukum masyarakat yang rendah dan juga penegakan hukum belum optimal.

3.2 Isu-isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Bungo dua puluh tahun mendatang, yaitu:

I. Pilar Sosial

1. Penurunan jumlah penduduk miskin.
2. Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang didukung dengan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia yang memadai.
3. Penambahan jumlah penduduk.
4. Komposisi struktur usia penduduk saat ini terbanyak pada usia produktif dan pada 20 tahun kedepan menjadi usia lansia
5. Pelestarian budaya daerah pada pemuda
6. Ketersediaan air layak minum dan sarana sanitasi
7. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



II. Pilar Ekonomi

1. Diversifikasi PDRB. Mendorong pengembangan sektor ekonomi yang beragam untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu dan menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
2. Perkuatan basis ekonomi kerakyatan yang mendasarkan pada optimalisasi segenap potensi lokal.
3. Alih fungsi lahan dari lahan pangan ke lahan Perkebunan.
4. Pengelolaan sumber daya alam yang optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. Peningkatan infrastruktur yang memadai untuk memacu pengembangan wilayah.
6. Kabupaten Bungo sebagai gerbang provinsi bagian barat.
7. Penetapan Bungo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRW Provinsi Jambi.
8. Pengolahan limbah domestik dan penetapan Bungo sebagai Pusat Pengelolaan Limbah B3.
9. Imbal Jasa Lingkungan sebagai salah satu skenario mendapatkan Pendapatan Daerah, Pendapatan Masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
10. Belum adanya Kawasan Terpadu di Bungo.
11. Penataan wilayah perkotaan yang berfokus pada sektor jasa.
12. Mendorong industri penunjang sektor jasa dan manufaktur yang dikembangkan di wilayah non perkotaan. Termasuk hilirisasi industri yang saat ini sudah ada.
13. Rasio elektrifikasi yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk.

III. Pilar Hukum dan Tata Kelola

1. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai *good governance* dan mengedepankan *governance* di semua aspek.
2. Peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik



3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
4. Tata batas dusun dan tata batas daerah yang belum mendapatkan kesepakatan
5. Pelayanan administrasi kependudukan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat
6. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional

Berdasarkan perhitungan, kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHK Kabupaten Bungo menurut Lapangan Usaha lima tahun terakhir adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata kontribusi 22,918 persen dan yang terendah adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata kontribusi 0,04 persen, sedangkan untuk PDRB ADHB lima tahun terakhir sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi tertinggi dengan rata-rata kontribusi 22,194 persen dan yang terendah sektor Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata-rata kontribusi 0,046 persen.

Sektor Pertambangan dan Penggalian yang memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB bukanlah sektor yang memerlukan banyak tenaga kerja. Di sisi lain, dengan keuntungan lokasi geografisnya, Kabupaten Bungo idealnya memberdayakan potensi sektor jasa untuk menggerakkan perekonomiannya. Ada beberapa sektor jasa yang dapat dikembangkan, diantaranya Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, Jasa Transportasi, Jasa Perdagangan, dan Jasa Lingkungan.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2006- 2010 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Kabupaten Bungo yang sejahtera. Masih relatif banyak masyarakat Bungo yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi harus terus menerus dilakukan yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat Bungo (inclusive growth). Hal ini untuk mempercepat



penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga Bungo dalam menghadapi berbagai goncangan.

Pengurangan jumlah kemiskinan tidak dapat sepenuhnya hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan yang inklusif memerlukan intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.

Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya alam menyusut. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur.

Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang tingkat kesehatan yang memadai. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi



lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas masyarakat Bungo menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bungo dalam dua puluh tahun ke depan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antar wilayah dalam lingkup administrasi pemerintahan Kabupaten Bungo.

Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Bungo perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan penatalaksanaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun, kesadaran masyarakat Kabupaten Bungo untuk mentaati fungsi hukum dalam menuntun perilaku berkehidupan masyarakat sehari-hari masih harus ditingkatkan.

Rencana pembangunan Kabupaten Bungo selama 20 tahun kedepan (tahun 2025-2045) sebagai rencana komprehensif yang meliputi berbagai aspek Pembangunan di Kabupaten Bungo, sebagai berikut:

1. Kelestarian Lingkungan Hidup yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pembangunan ini menggambarkan pentingnya keseimbangan antara pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah. Konsep ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana kemajuan ekonomi dan sosial harus dicapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.



2. Pengembangan ekonomi yang dinamis antar sektor dan antar wilayah. Hal ini menggambarkan sebuah strategi pembangunan ekonomi yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh sektor dan wilayah.
3. Tata kelola pemerintahan. Pembangunan ini berfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan fondasi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, meminimalkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan.
4. Infrastruktur pelayanan dasar. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses ke layanan dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang layak dan produktif. Ini merupakan aspek kunci dari pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Industri perkebunan berkelanjutan. Pembangunan ini menggambarkan pendekatan modern dalam sektor perkebunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan menjamin kelangsungan industri perkebunan jangka Panjang, melindungi lingkungan dan sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja Perkebunan, dan memenuhi permintaan konsumen akan produk berkelanjutan.
6. Pembangunan ekonomi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan ini menggambarkan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kapasitas lingkungan.
7. Penguatan sumber daya manusia berbasis digitalisasi. Hal ini menggambarkan strategi pengembangan SDM yang memanfaatkan teknologi digital. Pembangunan sumber daya manusia berbasis digitalisasi bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, kompeten secara digital, dan siap menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin tergantung pada teknologi.



BAB IV

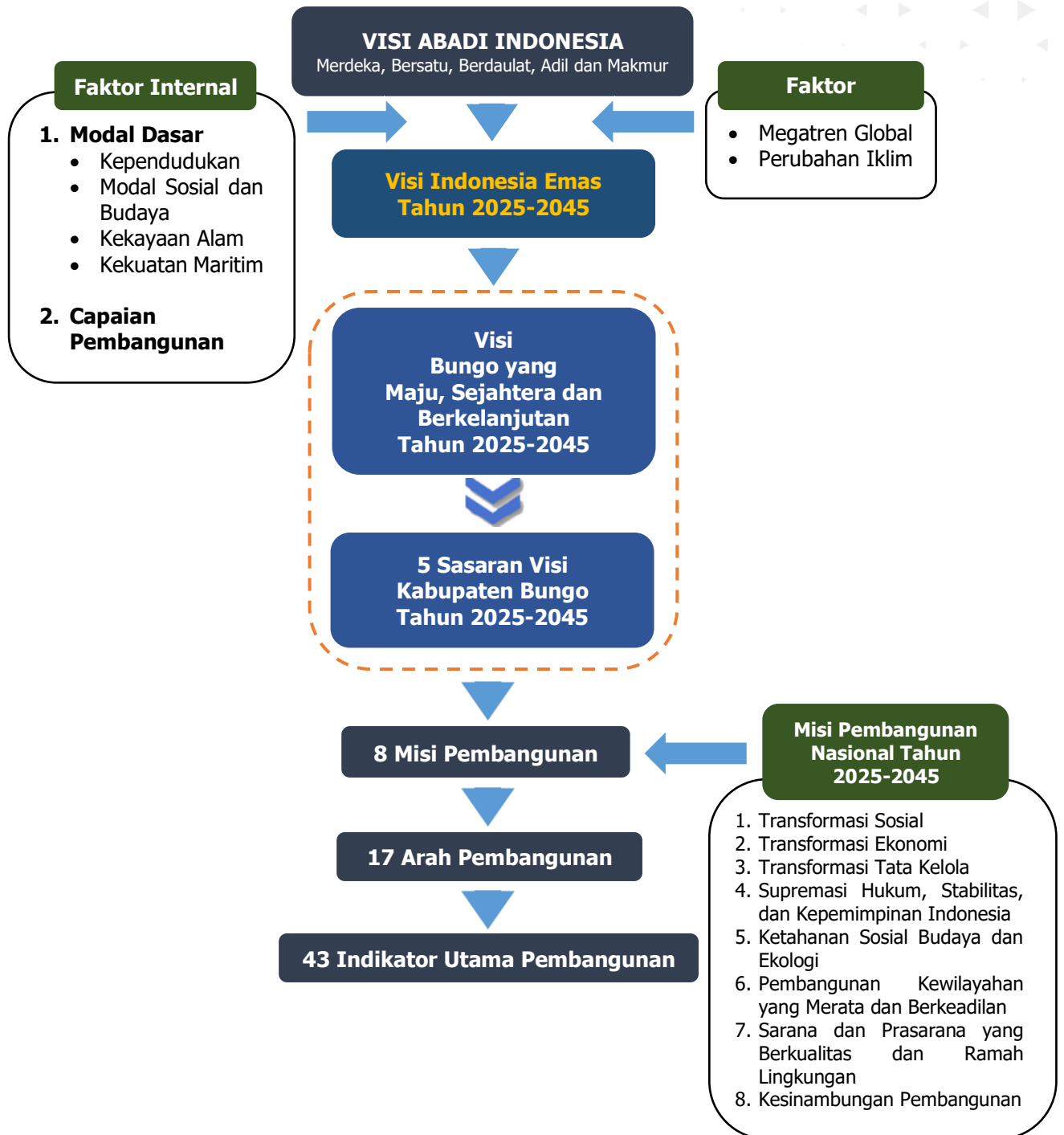
VISI DAN MISI DAERAH

Pembangunan jangka panjang Kabupaten Bungo tercermin dalam visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang. Visi dan misi pembangunan akan dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja RPJPD sebelumnya dan berbagai pertimbangan lain dari sumber dalam dan luar pemerintah Kabupaten Bungo. Khususnya dalam perencanaan jangka panjang, hal ini sangat penting untuk mempertimbangkan perspektif luar untuk menghindari rencana pembangunan yang berpandangan sempit. Dalam konteks pembangunan daerah, tujuan pembangunan nasional menjadi dasar dalam penyusunan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah dengan tetap memperhatikan potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Sebagai salah satu kabupaten yang berada di dalam kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jambi, maka perumusan dokumen perencanaan juga harus melihat agenda atau arah kebijakan pembangunan pada level Nasional dan Provinsi Jambi, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan selaras dan efisien.

Terlepas dari adanya perencanaan jangka panjang yang disusun setiap 20 tahun, landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sebuah cita cita luhur yang ditetapkan sebagai Visi abadi yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mengacu pada terminologi visi tersebut serta pedoman penyusunan dokumen RPJPD, maka Kabupaten Bungo menyusun visi, misi hingga arah kebijakan pembangunan yang jika digambarkan kedalam kerangka besar pembangunan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Kerangka Besar Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2045

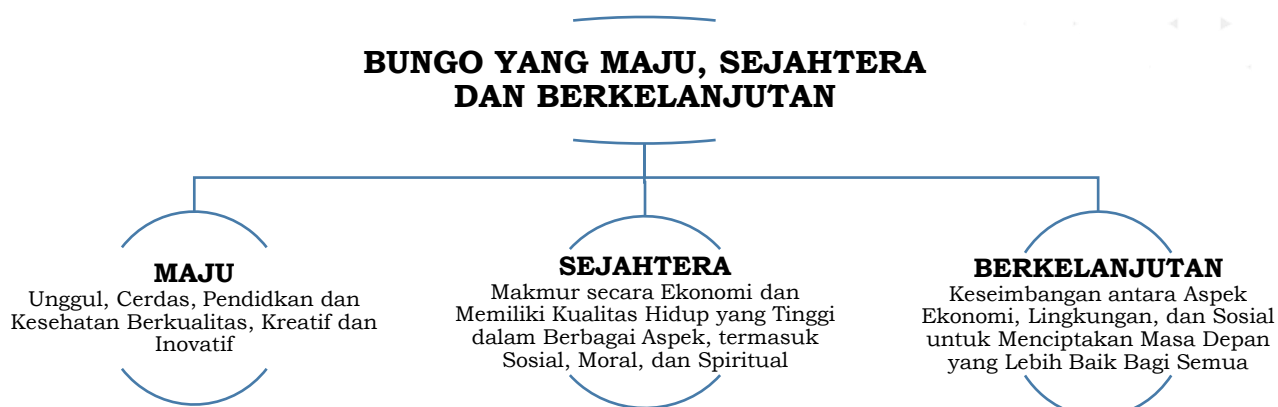


4.1 Visi Daerah

Didasarkan pada kondisi daerah saat ini, tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun ke depan, dan dengan memperhatikan modal dasar yang dimiliki dengan segala kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan serta faktor-faktor strategis yang ada, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 adalah:



Gambar 4.2
Visi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045



Secara filosofis, visi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045, yaitu Bungo yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan mengandung makna sebagaimana disajikan dalam pokok-pokok visi pembangunan sebagai berikut:

1. Bungo yang Maju

MAJU adalah gambaran daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat, ditandai dengan penciptaan lapangan kerja yang luas serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh transformasi tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, kemajuan fisik Kabupaten Bungo juga tercermin dari infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan, yang dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan sinergi antara ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan infrastruktur yang berkelanjutan, Kabupaten Bungo dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat, menjadikannya daerah yang maju dan kompetitif

2. Bungo yang Sejahtera

SEJAHTERA adalah gambaran daerah yang mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya melalui



transformasi sosial yang berfokus pada penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik serta upaya nyata dalam pengurangan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat dicapai dengan memastikan setiap individu mendapatkan akses yang setara terhadap kebutuhan dasar, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Stabilitas politik dan demokrasi yang kuat juga menjadi landasan penting bagi terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat hidup dalam suasana yang harmonis dan berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, Kabupaten Bungo mengedepankan pembangunan yang adil dan merata, di mana manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya ketimpangan, memastikan kesejahteraan menyentuh semua golongan, baik di perkotaan maupun pedesaan.

3. Bungo yang Berkelanjutan

BERKELANJUTAN adalah gambaran daerah yang menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan ketahanan sosial budaya, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi generasi saat ini tetapi juga bagi generasi mendatang. Dengan memantapkan ketahanan sosial budaya, Kabupaten Bungo berkomitmen untuk melindungi warisan budaya lokal, memperkuat identitas masyarakat, serta menjaga harmoni sosial. Dalam hal lingkungan hidup, Kabupaten Bungo aktif menjaga kelestarian alam, mengelola sumber daya alam secara bijak, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bungo dilakukan dengan pendekatan yang seimbang, di mana kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap lingkungan. Setiap proyek pembangunan dirancang untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem, mempromosikan penggunaan energi yang lebih bersih, serta menjaga kualitas udara, tanah, dan air. Dengan prinsip pembangunan yang berkesinambungan, Kabupaten Bungo memastikan bahwa



pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan, melainkan memperkuat ketahanan sosial dan ekologi daerah untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam rangka menjaga keselarasan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bungo dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Nasional, maka perlu untuk dilakukan harmonisasi visi pembangunan beserta sasaran visi pembangunan yang terkandung pada masing-masing visi. Berikut merupakan matriks keselarasan visi pembangunan jangka panjang masing-masing level pemerintahan.

Tabel 4.1
Keselaran Visi Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo

Visi RPJPN Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Bungo yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

4.2 Sasaran Visi Daerah

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan sasaran visi daerah yang merupakan penjabaran konkret sebagai representasi kondisi atas tercapainya visi pembangunan jangka panjang. Sasaran visi daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
3. Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Bungo Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
4. Peningkatan daya saing Sumber daya manusia
5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

Kelima sasaran visi daerah dirumuskan untuk melihat dan mengukur ketercapaian visi daerah Kabupaten Bungo. Untuk menjamin konsistensi antara rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, maka diperlukan penyelarasan



sasaran visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jambi, dan RPJPD Kabupaten Bungo agar visi yang dirumuskan responsif terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Adapun target dan indikator dari sasaran visi yang telah ditetapkan dan keselarasan sasaran visi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.2
Sasaran, Indikator dan Target Visi Daerah Kabupaten Bungo

No	Sasaran Visi	Indikator Visi	Kondisi Awal	Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	69,70	80,00 - 81,43	222,86 - 292,86	296,90 - 362,86	362,90 - 432,86	540,00 - 560,00
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,96	5,50 - 6,06	6,90 - 7,25	7,26 - 8,44	8,54 - 9,63	10,50 - 11,69
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,29	5,00 - 5,20	3,75	2,5	1,5	0,50 - 0,57
		Rasio gini (Indeks)	0,28	0,27 - 0,28	0,27 - 0,28	0,26 - 0,27	0,26 - 0,27	0,25 - 0,27
		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	8,49	8,69	8,69 - 8,75	8,75 - 8,81	8,81 - 8,87	8,00 - 9,00
		Pertumbuhan Ekonomi	4,66	4,68 - 4,78	4,78 - 5,02	5,02 - 5,26	5,26 - 5,50	5,50 - 6,50
3	Kepemimpinan daerah untuk mencapai Bungo Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	2,98	2,98	2,98 - 3,32	3,32 - 3,66	3,66 - 4,00	4,00 - 4,50
		Indeks Inovasi Daerah	48,30 (Inovatif)	48,30 (Inovatif)	52,25 (Inovatif)	56,20 (Inovatif)	60,03 (Sangat Inovatif)	60,10 (Sangat Inovatif)
4	Peningkatan daya saing Sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,06	71,50 - 71,96	71,96 - 73,98	73,98 - 75,99	75,99 - 78,00	78,00 - 80,00
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Intensitas emisi GRK (Ton CO2e)	NA	68.267	72.480	76.694	80.907	85.120
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,67	74,75	75,81	76,87	77,92	78,98



Tabel 4.3

Keselarasan Sasaran Visi Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Bungo

No	RPJPN				RPJPD Provinsi Jambi				RPJPD Kabupaten Bungo			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per Kapita setara negara maju	GNI Per Capita (USD)	5.500	23.00-30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	86,18-86,65	555,68-652,01	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	80,00-81,43	540,00-560,00
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	9,98-10,12	13,22-13,35		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,50-6,06	10,50-11,69
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5 – 0,8	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,30-6,80	0,07-0,57	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,00-5,20	0,50-0,57
		Rasio Gini (Indeks)	0,379-0,382	0,377 - 0,320		Rasio gini (Indeks)	0,337-0,341	0,275-0,326		Rasio gini (Indeks)	0,27-0,28	0,27-0,25
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,42	1,7		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	8,69	8,00-9,00
						Pertumbuhan Ekonomi	4,81-5,11	5,55-7,00		Pertumbuhan Ekonomi	4,68-4,78	5,50-6,50



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045



No	RPJPN				RPJPD Provinsi Jambi				RPJPD Kabupaten Bungo			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
3	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunis Internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah			Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Bungo Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Daerah	2,98	4,00-4,50
						Indeks Inovasi Daerah				Indeks Inovasi Daerah	48.30 (Inovatif)	60,10 (Sangat Inovatif)
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing Sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,55	0,71	Peningkatan daya saing Sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,50-71,96	78,00-80,00
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	78,50	97,88	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Intensitas emisi GRK (Ton CO2e)	68.267	85.120
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	73,71	80,88		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,75	78,98

4.3 Misi Daerah

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban agar tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bungo tersebut, Misi pembangunan Kabupaten Bungo disusun berdasarkan pada sasaran visi pembangunan. Penerjemahan dilakukan dengan melihat substansi setiap sasaran pembangunan dan karakteristik substansi visi tersebut yang dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek meliputi Transformasi Kabupaten Bungo, Landasan Transformasi dan Kerangka Implementasi Transformasi. Hasil penerjemahan dengan pertimbangan tersebut menghasilkan 8 butir misi pembangunan sebagai berikut:

Gambar 4.3
Kerangka Transformasi Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045





Penjelasan Misi pembangunan Bungo dirumuskan sebagaimana berikut:

Misi 1 : Transformasi Sosial

Untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.

Misi 2 : Transformasi Ekonomi

Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMD), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Misi 3 : Transformasi Tata Kelola

Untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Misi 4 : Memantapkan Stabilitas Daerah dan Demokrasi Substansial

Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan daerah, serta ketangguhan diplomasi daerah di tingkat nasional.

Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup

Memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan lingkungan hidup, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.



Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Adil dan Merata

Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan daerah, serta ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup.

Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas serta Ramah Lingkungan

Merupakan faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.

Misi 8 : Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan

Untuk mengawal pencapaian Bungo Yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Sama halnya pada perumusan visi pembangunan yang harus selaras dengan visi pembangunan pada nasional dan provinsi, pada perumusan misi pembangunan juga harus dilakukan penyelarasan. Proses penyelarasan misi pembangunan jangka panjang dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Berikut merupakan matriks keselarasan misi pembangunan antar level pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keselarasan Agenda Misi Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi,
dan Kabupaten Bungo

No	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045
	Agenda	Misi	Misi	Misi
1	Transformasi Indonesia	1. Mewujudkan transformasi sosial	1. Mewujudkan transformasi sosial	1. Transformasi sosial
		2. Mewujudkan transformasi ekonomi	2. Mewujudkan transformasi ekonomi	2. Transformasi ekonomi
		3. Mewujudkan transformasi tata kelola	3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah	3. Transformasi tata kelola



2	Landasan Transformasi	4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah	4. Memantapkan ketenteram dan ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	4. Memantapkan stabilitas daerah dan demokrasi substansial
		5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup
3	Kerangka Implementasi	6. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	6. Mewujudkan pembangunan daerah yang adil dan merata
		7. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	7. Mewujudkan transformasi penyediaan sarana prasarana daerah	7. Mewujudkan sarana dan prasarana berkualitas serta ramah lingkungan
		8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan	8. Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan

4.4 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi

Visi merupakan gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai, sementara pokok-pokok visi adalah elemen-elemen utama yang membentuk visi tersebut. Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi dan cara mencapainya dengan kata lain misi menjelaskan mengapa organisasi ada dan apa yang dilakukannya. Keterkaitan antara pokok-pokok visi dan misi memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam rangka menjalankan misi akan secara langsung mendukung pencapaian visi, hal ini menciptakan keselarasan dan fokus dalam seluruh operasi organisasi.

Adapun keterkaitan antara pokok-pokok visi dengan misi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.5
Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dan Misi

NO	POKOK- POKOK VISI	MISI
1	Maju	Transformasi Ekonomi
		Transformasi Tata Kelola
		Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas serta Ramah Lingkungan
2	Sejahtera	Transformasi Sosial
		Memantapkan Stabilitas Daerah dan Demokrasi Substansial
		Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Adil dan Merata
3	Berkelanjutan	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup
		Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang tahun 2025-2045 adalah untuk menciptakan Kabupaten Bungo yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seirama dengan RPJPD Provinsi Jambi 2025-2045 sebagai bagian dari pencapaian tujuan Pembangunan Nasional 2025-2045 yang mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil serta sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5.1 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Hal ini agar perencanaan yang disusun terstruktur dan bertahap dalam mencapai visi jangka panjang dan tetap fleksibel terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam mencapai pembangunan jangka panjang Kabupaten Bungo, maka ditetapkan arah kebijakan kedalam 4 tema pembangunan per periode (lima tahun) selama Tahun 2025-2045 yang bertujuan memberikan fokus yang jelas untuk setiap periode pembangunan, memudahkan perumusan kebijakan dan program yang lebih spesifik dan memungkinkan evaluasi yang lebih terstruktur di setiap akhir periode.

Tema pembangunan tersebut saling terkait dan berkesinambungan, yaitu setiap tema periode memiliki hubungan yang logis dengan periode sebelum dan sesudahnya dan memastikan



pembangunan yang berkelanjutan dan terarah. Adapun tema pembangunan dan pentahapannya adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045
Per Periode



1. Periode Tahap **Pertama Tahun 2025-2029: PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI**. Berfokus pada membangun dasar yang kuat untuk semua aspek pembangunan sosial, ekonomi, tata kelola, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan
2. Periode Tahap **Kedua Tahun 2030-2034: AKSELERASI TRANSFORMASI**. Berfokus pada mempercepat implementasi kebijakan dan memperluas dampak transformasi yang dimulai pada periode pertama
3. Periode Tahap **Ketiga Tahun 2035-2039: EKSPANSI NASIONAL**. Berfokus pada memperluas jangkauan transformasi sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah ke tingkat nasional
4. Priode Tahap **Empat Tahun 2040-2045: PERWUJUDAN KABUPATEN BUNGO YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN**. Berfokus pada menyempurnakan capaian transformasi daerah untuk mencapai visi Kabupaten Bungo yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan

Adapun penjabarkan dengan arah kebijakan periodik RPJPD Kabupaten Bungo per periode untuk mencapai Kabupaten Bungo yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan dapat terwujud, sebagai berikut:



Tabel 5.1
Arah Kebijakan Daerah Per Periode

MISI	PERIODE PERTAMA TAHUN 2025-2029 <i>(Perkuatan Fondasi Transformasi)</i>	PERIODE KEDUA TAHUN 2030-2034 <i>(Akselerasi Transformasi)</i>	PERIODE TIGA TAHUN 2035-2039 <i>(Ekspansi Nasional)</i>	PERIODE KEEMPAT TAHUN 2040-2045 <i>(Perwujudan Kabupaten Bungo Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan)</i>
Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan kelembagaan sosial dan masyarakat2. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan.3. Pemberdayaan kelompok rentan dan masyarakat adat.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.2. Pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan kesehatan.3. Program pemberdayaan sosial berbasis digital.	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk jejaring sosial tingkat nasional.2. Meningkatkan daya saing SDM dengan pendidikan berstandar nasional.3. Mendorong partisipasi Kabupaten Bungo dalam program nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Menjadikan Kabupaten Bungo sebagai model transformasi sosial berkelanjutan.2. Meningkatkan kesetaraan sosial dan keadilan bagi seluruh masyarakat.3. Memperkuat jejaring sosial dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.
Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM dan BUMDes2. Menyediakan akses permodalan dan teknologi.3. Penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan ekonomi kreatif dan digital.2. Promosi investasi dan kemitraan dengan swasta.3. Diversifikasi ekonomi dengan fokus pada produk unggulan lokal	<ol style="list-style-type: none">1. Mengintegrasikan sektor ekonomi daerah ke dalam rantai nilai nasional.2. Mempromosikan ekspor produk unggulan lokal.3. Membangun kluster ekonomi daerah yang kompetitif secara nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan.2. Memperluas akses pasar global bagi produk unggulan daerah.3. Memastikan ekonomi daerah inklusif dan adaptif terhadap perubahan global



MISI	PERIODE PERTAMA TAHUN 2025-2029 <i>(Perkuatan Fondasi Transformasi)</i>	PERIODE KEDUA TAHUN 2030-2034 <i>(Akselerasi Transformasi)</i>	PERIODE TIGA TAHUN 2035-2039 <i>(Ekspansi Nasional)</i>	PERIODE KEEMPAT TAHUN 2040-2045 <i>(Perwujudan Kabupaten Bungo Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan)</i>
Transformasi Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik. 2. Peningkatan kapasitas aparatur daerah. 3. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi e-government untuk pelayanan publik. 2. Mempercepat reformasi birokrasi menuju sistem yang efisien. 3. Penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem tata kelola berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menjadikan Kabupaten Bungo sebagai contoh tata kelola daerah yang baik di tingkat nasional. 3. Pengembangan kebijakan tata kelola inklusif dan inovatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Kabupaten Bungo sebagai pusat inovasi tata kelola daerah. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola daerah. 3. Mewujudkan tata kelola berbasis data yang akurat dan transparan
Memantapkan Stabilitas Daerah dan Demokrasi Substansial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat. 2. Membangun forum dialog antara pemerintah dan masyarakat. 3. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses partisipasi politik yang inklusif. 2. Meningkatkan peran lembaga pengawasan daerah. 3. Memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Kabupaten Bungo sebagai model demokrasi substansial di tingkat nasional. 2. Penguatan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. 3. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga nasional untuk menjaga stabilitas daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai stabilitas daerah yang tangguh dan demokrasi substantif. 2. Menjaga keadilan dan keamanan daerah sebagai prioritas utama. 3. Memperkuat hubungan antar masyarakat dan pemerintah daerah



MISI	PERIODE PERTAMA TAHUN 2025-2029 <i>(Perkuatan Fondasi Transformasi)</i>	PERIODE KEDUA TAHUN 2030-2034 <i>(Akselerasi Transformasi)</i>	PERIODE TIGA TAHUN 2035-2039 <i>(Ekspansi Nasional)</i>	PERIODE KEEMPAT TAHUN 2040-2045 <i>(Perwujudan Kabupaten Bungo Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan)</i>
Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian budaya lokal dan peningkatan nilai kearifan lokal. 2. Penegakan hukum terkait lingkungan hidup. 3. Edukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan program budaya dalam pendidikan. 2. Program konservasi lingkungan dengan partisipasi masyarakat. 3. Mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan secara nasional. 2. Memperkuat peran Kabupaten Bungo dalam program nasional pelestarian lingkungan. 3. Mengintegrasikan budaya lokal ke dalam program nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang kokoh. 2. Memastikan perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama. 3. Meningkatkan kesadaran dan praktik berkelanjutan di masyarakat
Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Adil dan Merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki akses infrastruktur di daerah terpencil. 2. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat. 3. Distribusi bantuan sosial secara merata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akselerasi program infrastruktur di daerah-daerah terisolasi. 2. Memperluas jangkauan program pengentasan kemiskinan. 3. Memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang setara di seluruh daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan program-program kesejahteraan sosial di tingkat nasional. 2. Memperluas akses layanan dasar di seluruh daerah, terutama terpencil. 3. Mengoptimalkan distribusi infrastruktur di seluruh wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai kesejahteraan sosial yang merata di seluruh wilayah. 2. Menghapus ketimpangan wilayah dalam akses terhadap pembangunan. 3. Memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan layanan publik.



MISI	PERIODE PERTAMA TAHUN 2025-2029 <i>(Perkuatan Fondasi Transformasi)</i>	PERIODE KEDUA TAHUN 2030-2034 <i>(Akselerasi Transformasi)</i>	PERIODE TIGA TAHUN 2035-2039 <i>(Ekspansi Nasional)</i>	PERIODE KEEMPAT TAHUN 2040-2045 <i>(Perwujudan Kabupaten Bungo Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan)</i>
Mewujudkan Sarana dan Prasarana Berkualitas serta Ramah Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik. 2. Memastikan pembangunan infrastruktur memperhatikan aspek lingkungan. 3. Penyusunan kebijakan transportasi berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur ramah lingkungan, seperti transportasi publik. 2. Pengelolaan air bersih dan limbah yang lebih baik. 3. Pembangunan sistem energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun infrastruktur daerah berstandar nasional dan ramah lingkungan. 2. Pengelolaan transportasi publik berkelanjutan. 3. Mengembangkan jaringan energi terbarukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan infrastruktur berkelanjutan yang efisien dan ramah lingkungan. 2. Memastikan aksesibilitas infrastruktur di seluruh wilayah. 3. Menjadi daerah model dalam pembangunan infrastruktur hijau
Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang ramah lingkungan. 2. Pengembangan kebijakan energi terbarukan. 3. Penegakan standar lingkungan pada pembangunan fisik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kebijakan ekonomi hijau. 2. Membangun kemitraan dengan lembaga nasional dan internasional untuk pengembangan berkelanjutan. 3. Penguatan regulasi lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat nasional. 2. Mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan program nasional. 3. Menyusun kebijakan pembangunan berbasis lingkungan yang kompetitif di tingkat nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Kabupaten Bungo sebagai model pembangunan berkelanjutan. 2. Mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 3. Memastikan semua kebijakan pembangunan mengedepankan keberlanjutan dan keadilan.



5.2 Sasaran Pokok Daerah

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bungo merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya visi dan misi RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045 serta pencapaian visi Indonesia Emas. Sasaran pokok menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode 20 (dua puluh) tahun dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan, serta sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bungo dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Adapun sasaran pokok daerah Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya sistem Kesehatan Andal untuk Semua
2. Meningkatnya Pemerataan Pendidikan Berkualitas
3. Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif, Inklusif, dan Adil
4. Meningkatnya riset dan teknologi lokal untuk produktivitas ekonomi
5. Meningkatnya ekonomi hijau dengan sumber daya berkelanjutan dan emisi rendah
6. Meningkatnya digitalisasi sektor publik untuk efisiensi dan transparansi
7. Meningkatnya sinergi ekonomi lokal untuk daya saing daerah
8. Meningkatnya kemajuan kota dan desa untuk pertumbuhan ekonomi
9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik dan investasi
10. Meningkatnya penegakan hukum yang adil, keamanan dan demokrasi substansial
11. Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah melalui pengelolaan fiskal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
12. Meningkatnya kolaborasi regional untuk keamanan, stabilitas, dan pembangunan kompetitif
13. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kearifal lokal
14. Meningkatnya kesetaraan gender, taraf hidup keluarga, dan masyarakat yang inklusif



15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan sumber daya alam dan penanganan polusi
16. Meningkatnya ketahanan energi terbarukan, pengelolaan air yang efektif, dan kemandirian pangan melalui inovasi
17. Meningkatnya sistem tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah yang merupakan penjabaran dari 8 (delapan) Misi Pembangunan. Arah pembangunan Kabupaten Bungo selama 20 (dua puluh) tahun kedepan meliputi:

1. Kesehatan untuk Semua
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Tinggi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
7. Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif
8. Transformasi Digital
9. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh serta Demokrasi Berkeadilan
10. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
11. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
13. Lingkungan Hidup Berkualitas
14. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
15. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
16. Berketahanan Energi dan Air dan Pangan
17. Daya Saing Daerah Tinggi



Untuk menjamin keselarasan arah pembangunan Kabupaten Bungo terhadap arah pembangunan provinsi dan nasional, maka dilakukan penyelarasan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Bungo, RPJPD Provinsi Jambi, dan RPJPN

No	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
1	Sosial	IE1. Kesehatan untuk semua	Pemerataan akses dan kualitas kesehatan	Kesehatan untuk semua
		IE2. Pendidikan berkualitas yang merata	Pemerataan akses dan kualitas pendidikan	Pendidikan berkualitas yang merata
		IE3. Perlindungan Sosial yang adaptif	Perlindungan Sosial dan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan	Perlindungan Sosial yang adaptif
2	Ekonomi	IE4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
		IE5. Penerapan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau
		IE6. Transformasi digital	Transformasi digital	Transformasi digital
		IE7. Integrasi ekonomi domestik dan global	Integrasi ekonomi daerah dan global	Integrasi ekonomi domestik dan global
		IE8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3	Tata kelola	IE9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Tata kelola pemerintahan daerah yang tangguh, berintegritas dan adaptif	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE10. Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial	Ketentraman dan ketertiban umum, Kerukunan hidup serta budaya toleransi masyarakat	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial
		IE11. Stabilitas ekonomi makro	Stabilitas ekonomi makro daerah	Stabilitas ekonomi makro
		IE12. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan	Ketimpangan antar wilayah dan pendapatan berkurang	Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan
5	Ketahanan Sosial dan Ekologi	IE13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju



No	RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
		IE14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, masyarakat inklusif
		IE15. Lingkungan Hidup berkualitas	Lingkungan Hidup berkualitas	Lingkungan Hidup berkualitas
		IE16. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
		IE17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Untuk menunjukkan keterkaitan antara Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan Misi, Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok
Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045

MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK
Misi 1: Transformasi Sosial	1. Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya sistem Kesehatan Andal untuk Semua
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan Berkualitas
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif, Inklusif, dan Adil
Misi 2: Transformasi Ekonomi	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya riset dan teknologi lokal untuk produktivitas ekonomi
	5. Penerapan Ekonomi Hijau	Meningkatnya ekonomi hijau dengan sumber daya berkelanjutan dan emisi rendah
	6. Transformasi Digital	Meningkatnya digitalisasi sektor publik untuk efisiensi dan transparansi
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Meningkatnya sinergi ekonomi lokal untuk daya saing daerah
	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kemajuan kota dan desa untuk pertumbuhan ekonomi



MISI	ARAH PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK
Misi 3: Transformasi Tata Kelola	9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Meningkatnya tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik dan investasi
Misi 4: Memantapkan Stabilitas Daerah dan Demokrasi Substansial	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, keamanan dan demokrasi substansial
	11. Stabilitas Ekonomi Makro	Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah melalui pengelolaan fiskal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Meningkatnya kolaborasi regional untuk keamanan, stabilitas, dan pembangunan kompetitif
Misi 5: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kearifal lokal
	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kesetaraan gender, taraf hidup keluarga, dan masyarakat yang inklusif
	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan sumber daya alam dan penanganan polusi
	16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya ketahanan energi terbarukan, pengelolaan air yang efektif, dan kemandirian pangan melalui inovasi
	17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya sistem tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi Kabupaten Bungo sebagaimana arahan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pelaksanaan arah kebijakan jangka panjang Kabupaten Bungo sebagai berikut:



Tabel 5.4
Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
Meningkatnya sistem Kesehatan Andal untuk Semua	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.				
	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.				
	Mewujudkan kapasitas infrastruktur kesehatan berskala nasional dan global seiring dengan terwujudnya kemandirian kesehatan masyarakat.				
	Penyediaan layanan konsultasi medis jarak jauh				
	Distribusi tenaga kesehatan yang merata				
	Pengembangan unit layanan kesehatan bergerak untuk menjangkau masyarakat di daerah yang sulit diakses				
	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan				
	Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian				
	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.				
	Peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat				
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.				
	Dukungan kebijakan untuk upaya perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan				
	Mendorong pendekatan lintas sektor seperti kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan untuk mengendalikan risiko penyakit menular.				
Memperluas kemitraan dengan sektor swasta untuk penyediaan layanan kesehatan, inovasi teknologi, dan pendanaan					



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.				
	Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri				
	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.				
	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.				
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.				
	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.				
	Mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui kampanye edukasi mengenai pentingnya pencegahan penyakit dan pola hidup sehat.				
	Menyediakan program pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan				
	Mendorong kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi atau bencana dengan memperkuat rantai pasok obat, peralatan medis, dan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan.				
Meningkatnya Pemerataan Pendidikan Berkualitas	Peningkatan layanan melalui digitalisasi perpustakaan				
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial				
	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif				
	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah				
	Pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan				
	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern.				
	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.				
	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.				
	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.				
	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.				
	Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan				
	Peningkatan kolaborasi dan komunitas belajar guru				
	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).				
	Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat				
	Mewujudkan SDM yang sejahtera, adaptif, berahlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing				
	Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran				
	Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujud masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter				
	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.				
	Penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas				
	Penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)				
	Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Penguatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).				
	Penguatan pendidikan sosial dan emosional serta pelibatan peran orang tua dan keluarga dalam pendidikan				
Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif, Inklusif, dan Adil	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien				
	Mendukung perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.				
	Mendorong percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan				
Meningkatnya riset dan teknologi lokal untuk produktivitas ekonomi	Penguatan Teknologi Tepat Guna melalui riset, inovasi dan SDM terampil guna mengoptimalkan pengembangan ekonomi berkelanjutan				
	Penerapan Teknologi Tepat Guna				
	Mengembangkan kebijakan perancangan Ekosistem inovasi				
	Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja				
	Penguatan infrastruktur teknologi dan digital				
	Penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah				
	Penguatan pelatihan re-skilling dan up-skilling serta integrasi soft skills dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi				
	Mendorong perguruan tinggi dan lembaga riset untuk membangun ekosistem inovasi yang kuat di daerah, terutama untuk pengembangan teknologi lokal				
	Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi				
Perluasan akses pembiayaan usaha pertanian					



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.				
	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.				
	Pengembangan inkubator bisnis dan akselerator yang mendukung start-up berbasis teknologi yang fokus pada solusi lokal seperti teknologi pertanian, pengolahan hasil perikanan dan pariwisata				
	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).				
	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.				
	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.				
	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.				
	Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna.				
	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.				
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Mendorong penggunaan teknologi pertanian presisi (precision agriculture), sistem informasi geospasial, dan aplikasi berbasis data untuk meningkatkan hasil produksi dan efisiensi.				
	Modernisasi sarana produksi perikanan.				
	Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian				
	Pembangunan hilirisasi sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan, regulasi serta pembiayaan ekonomi berkelanjutan sebagai instrumen pendanaan inovatif				
	Penguatan kelembagaan pertanian berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial.				
	Peningkatan diversifikasi produk KUKM berkualitas ekspor				
	Mendorong BUMDus, Koperasi dan UKM menghasilkan produk yang masuk rantai pasok ekspor				
	Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM				
	Peningkatan produktivitas BUMD dan BUMDus				
	KUKM tangguh, mandiri, dan berdaya saing				
	Pengembangan hub ekonomi kreatif dan digital yang didukung rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan				
	Fasilitasi pelaku inovasi lokal untuk melindungi hak cipta, paten dan merek dagang				
	Penyederhanaan regulasi untuk mempermudah investasi				
	Pemenuhan Rencana Induk IPTEK dan Inovasi Daerah				
	Peningkatan produk bernilai tambah tinggi berbasis seni budaya Bungo, serta peningkatan partisipasi pada rantai pasok nasional dan global.				
	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.				
	Peningkatan keragaman wisata				
	Peningkatan keterpaduan pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya				
	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Penguatan Kelembagaan, Destinasi dan Promosi pariwisata yang berdaya saing berbasis Teknologi Infomasi				
	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.				
	Pengembangan destinasi wisata berbasis teknologi				
	Hilirisasi sumberdaya alam unggulan				
	Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri				
	Penguatan ekosistem Industrialisasi berkelanjutan				
	Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan				
	Penguatan kompleksitas Produk Industri				
	Penyiapan sarana prasarana perhubungan				
	Percepatan peningkatan produktivitas				
	Peningkatan daya saing produk hilirisasi				
	Akselerasi Industri produk jadi				
	Penguatan Daya Saing Indutri				
	Peningkatan daya saing industri berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual				
	Peningkatan produktivitas yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi				
	Penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi				
	Perluasan pemasaran produk hilirisasi				
	Perluasan skala ekspansi industri				
	Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas				
	Mendorong penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau dan digital)				
	Fasilitasi mobilitas pekerja termasuk untuk mengisi pasar kerja global				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
Meningkatnya ekonomi hijau dengan sumber daya berkelanjutan dan emisi rendah	Membangun ekosistem kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, dan akademisi untuk menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar.				
	Mendorong partisipasi komunitas lokal dalam program inovasi, seperti hackathon, forum inovasi, atau kompetisi ide bisnis untuk menciptakan solusi dari akar rumput.				
	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.				
	Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial				
	Instrumen kebijakan ekonomi hijau yang komprehensif				
	Mendorong Pengintegrasian Prinsip Keberlanjutan dalam Perencanaan Pembangunan				
	Penguatan standar dan penerapan sertifikasi seperti ISPO (untuk sawit), PROPER (penilaian kinerja lingkungan perusahaan), dan sertifikasi hijau lainnya untuk memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan.				
	Mendorong penggunaan sumber energi terbarukan				
	Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik serta penyiapan infrastruktur pendukungnya				
	Optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan				
	Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas				
	Mengurangi konsumsi energi melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien di sektor industri, transportasi, dan perumahan				
	Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas				
	Optimalisasi teknik pengelolaan persetujuan perhutanan sosial melalui pengembangan komoditi unggulan				
Penerapan Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan					



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Pengembangan Sumber Daya Alam mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan sistem				
	Peningkatan pendapatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)				
	Pelestarian dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan				
	Mendorong implementasi praktik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik, agroforestri, dan teknik konservasi tanah dan air, untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan meningkatkan keanekaragaman hayati				
	Mendorong program reforestasi dan agroforestri, serta menguatkan mekanisme Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.				
	Mendorong proses produksi yang lebih bersih, ramah lingkungan, dan hemat energi melalui teknologi hijau dan inovasi.				
	Mendorong inovasi teknologi yang dapat mengurangi dampak lingkungan				
	Mempertimbangkan faktor risiko lingkungan dan sosial dalam keputusan investasi untuk mengurangi paparan risiko finansial terkait perubahan iklim.				
	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan				
	Menggalakkan gerakan zero waste dan memperkuat sistem daur ulang untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir				
Meningkatnya digitalisasi sektor publik untuk efisiensi dan transparansi	Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah				
	Mendorong pembangunan pusat data (data center) di tingkat kabupaten untuk mengelola, menyimpan, dan melindungi data pemerintah dan layanan publik.				
	Memperbarui dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi di kantor-kantor pemerintah daerah, sekolah, dan fasilitas kesehatan.				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.				
	Mendorong pengembangan sistem informasi terpadu untuk pengelolaan data administratif, data penduduk, dan data sektor publik lainnya agar lebih efisien dan akurat.				
	Menyediakan aplikasi atau platform digital untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan, seperti informasi kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan sosial				
	Mengadopsi konsep Smart City atau Smart Regency yang mencakup berbagai aspek, seperti transportasi pintar, energi pintar, lingkungan hidup, dan keamanan publik yang berbasis teknologi				
	Akuntabel berbasis digital				
	Digitalisasi di semua sektor				
	Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan platform e-commerce dan digital marketing guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing				
	Meningkatkan inklusi keuangan dengan mendorong penggunaan layanan fintech (financial technology), seperti e-wallet dan pembayaran digital di kalangan masyarakat				
	Menerapkan regulasi yang jelas terkait perlindungan data pribadi dan tata kelola data di tingkat kabupaten untuk memastikan keamanan informasi yang dikelola				
	Mendorong upaya sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman siber terhadap infrastruktur digital kabupaten.				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Mendorong kolaborasi dengan perusahaan teknologi dan startup untuk mengembangkan solusi inovatif yang mendukung digitalisasi layanan publik.				
	Mengoptimalkan pengumpulan data dari berbagai sektor (penduduk, ekonomi, kesehatan, pendidikan) untuk mendukung analisis dan perencanaan yang lebih baik				
	Mengembangkan dasbor digital bagi pemimpin daerah untuk memantau indikator kinerja utama (KPI) dalam berbagai sektor secara real-time.				
Meningkatnya sinergi ekonomi lokal untuk daya saing daerah	Mengembangkan klaster industri berdasarkan potensi unggulan daerah (seperti pertanian, perikanan, kerajinan, atau pariwisata) untuk meningkatkan daya saing produk lokal				
	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi bioproduct, dan pembangkitan energi listrik).				
	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)				
	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.				
	Mendorong Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Muara Bulian-Muara Tebo-Muara Bungo				
	Mendorong pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan				
	Mendorong Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Muara Bungo-Jambi				
	Mendorong Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Mendorong Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah				
	Efisiensi jaringan penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global				
	Menyediakan informasi pasar internasional yang relevan bagi pelaku usaha lokal, termasuk permintaan produk, regulasi ekspor, dan preferensi konsumen di berbagai negara				
	Mengidentifikasi dan mengembangkan produk lokal yang memiliki potensi ekspor, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi standar internasional, termasuk sertifikasi kualitas dan keamanan produk.				
	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)				
	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.				
	Mendorong investor asing untuk berinvestasi di kabupaten melalui promosi potensi investasi daerah dan penyederhanaan perizinan.				
	Meningkatkan kerjasama ekonomi antar kabupaten dan provinsi dalam bentuk sinergi produk unggulan, pengembangan rantai pasok, dan promosi bersama di pasar domestik dan internasional.				
	Membuat branding daerah yang kuat untuk produk unggulan kabupaten yang memiliki keunikan atau ciri khas lokal, sehingga lebih dikenal di pasar global				
	Mengadakan kampanye promosi untuk memperkenalkan produk lokal di pasar domestik dan global melalui media digital dan pameran.				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
Meningkatnya kemajuan kota dan desa untuk pertumbuhan ekonomi	Penataan batas dan pemetaan potensi desa dan kelurahan				
	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada perkotaan Muara Bungo				
	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.				
	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada perkotaan Muara Bungo.				
	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada perkotaan Muara Bungo.				
	City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, terutama pada kawasan perkotaan.				
	Penguatan pengelolaan jalan kabupaten				
	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.				
	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.				
	Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan bisnis				
	Penyiapan sarana prasarana perhubungan				
	Perwujudan PKN dan kawasan strategis				
	Penyediaan angkutan massal				
	Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan bisnis				
	Peningkatan sarana prasarana perhubungan				
	Pemenuhan kebutuhan listrik publik, industri dan transportasi				
	Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang				
	Peningkatan angkutan massal				
	Membuka ruang kreatif dan inkubator bisnis di kota untuk mendukung startup dan usaha ekonomi kreatif seperti desain, seni, teknologi, dan kuliner.				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Mengembangkan atraksi wisata perkotaan seperti festival budaya, kawasan heritage, dan taman kota untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional				
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.				
	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.				
	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.				
	Melakukan penataan ulang kawasan kumuh dan mengembangkan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan.				
	Mengadopsi pendekatan pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan konservasi air.				
	Mendorong perkotaan sebagai pusat layanan jasa (pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, dan pemerintahan) dan perdesaan sebagai wilayah pertanian dalam arti luas, pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani, kelestarian lingkungan hidup yang didukung imbal jasa lingkungan, serta pengembangan wilayah ekonomi baru				
	Mengembangkan paket wisata yang menghubungkan atraksi di perkotaan dengan destinasi wisata di perdesaan, menciptakan pengalaman yang beragam bagi wisatawan				
	Meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas penunjang pariwisata, termasuk transportasi, akomodasi, dan pusat informasi wisata di perkotaan dan perdesaan.				
Meningkatnya tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik dan investasi	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi publik, termasuk perizinan, pajak, layanan kesehatan, dan administrasi lainnya				
	Pemenuhan dan penguatan infrastruktur dan SDM TIK				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Menerapkan sistem pengaduan dan pelaporan online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan penyimpangan atau keluhan terkait layanan publik, serta memantau tindak lanjut dari laporan tersebut.				
	Mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam proses perizinan dan pengawasan, yang memungkinkan prioritas pada pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan simplifikasi untuk kegiatan berisiko rendah.				
	Mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi dengan mengembangkan sistem whistleblowing yang aman, pendidikan anti-korupsi bagi aparatur sipil negara (ASN), serta audit internal yang rutin				
	Memperkuat kode etik bagi ASN dan menegakkan sanksi tegas bagi pelanggaran integritas atau praktik korupsi				
	Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat				
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.				
	Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam berbagai bidang, termasuk penggunaan teknologi digital, manajemen proyek, serta pelayanan publik				
	Terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, proporsional dan berkompeten				
	Terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif				
	Terwujudnya kelembagaan yang kredibel dan SDM ASN yang sejahtera				
	Penyelenggaraan Diklat yang kolaboratif				
	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pelayanan publik				
	Penyelenggaraan Diklat yang Adaptif dan kompetitif				
	Penyelenggaraan diklat indispensabilitas dan rialitas				
	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas				
	Pengembangan pemanfaatan TIK di seluruh sektor				
	Percepatan penerapan teknologi pelayanan data kependudukan				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Optimalisasi pemanfaatan TIK di seluruh sektor				
	Terwujudnya integrasi data kependudukan				
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.				
	Menguatkan kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan LSM untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya dalam implementasi kebijakan yang lebih efektif.				
	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.				
	Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan				
	Mendorong inovasi daerah dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi baru dan model bisnis yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang				
	Regulasi berbasis teknologi informatif				
	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif				
	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.				
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital				
	Menerapkan sistem evaluasi kinerja yang berfokus pada hasil (outcome-based evaluation), sehingga kebijakan dan program pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.				
	Memperkuat fungsi audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan penggunaan anggaran yang efisien.				
Meningkatnya penegakan hukum yang adil, keamanan dan demokrasi substansial	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas				
	Membangun sinergi antara kepolisian, Satpol PP, dan lembaga lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan TNI.				
	Mendorong proposional jumlah personel keamanan seperti polisi, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan kebutuhan wilayah				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Mengembangkan aplikasi pelaporan atau pengaduan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan tindak kriminal dengan cepat.				
	Melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan melalui pelatihan dan sosialisasi tentang tindakan pencegahan kejahatan.				
	Membentuk komunitas atau kelompok pemuda yang dapat dilibatkan sebagai agen perubahan dalam menjaga keamanan di wilayah masing-masing.				
	Meningkatkan penerangan di jalan umum dan area yang gelap untuk mengurangi potensi terjadinya tindak kriminal				
Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah melalui pengelolaan fiskal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Mengurangi ketergantungan pada sektor tunggal dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial lain seperti pariwisata, industri kreatif, pertanian berkelanjutan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).				
	Mengidentifikasi dan memprioritaskan sektor unggulan kabupaten (misalnya, pertanian, perikanan, atau pariwisata) untuk dikembangkan melalui kebijakan dan program yang mendukung.				
	Memperluas basis pajak dan retribusi daerah dengan mengintegrasikan data pajak dan melakukan digitalisasi proses pajak.				
	Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pembayaran pajak dan meningkatkan transparansi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.				
	Mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset daerah seperti tanah dan bangunan untuk kegiatan ekonomi yang produktif.				
	Mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan investasi melalui layanan satu pintu (One Stop Service) dan penerapan sistem Online Single Submission (OSS).				
	Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor				
	Peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non pemerintah				
	peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah antara lain pinjaman daerah, Kerjasama Pemerintah dg Badan Usaha (KPBUD), CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.				
	Penguatan pengendalian inflasi daerah dan stabilitas harga				
	Penetapan upah Kabupaten berbasis produktivitas dan berkeadilan				
	Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar				
Meningkatnya kolaborasi regional untuk keamanan, stabilitas, dan pembangunan kompetitif	Penguatan kerjasama antar-wilayah dengan kabupaten atau provinsi di sekitar Bungo dalam bentuk kerja sama ekonomi, budaya, dan keamanan yang dapat memperkuat posisi Bungo secara strategis di kawasan.				
	Mendorong program kesadaran bela negara dan pelatihan pertahanan bagi warga, khususnya pemuda, untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar				
	Mendorong program simulasi dan latihan bersama penanggulangan bencana, terutama untuk kabupaten yang berbatasan dan memiliki risiko bencana alam tinggi.				
	Mendorong penetapan rute pariwisata yang menghubungkan destinasi unggulan dari beberapa kabupaten, seperti wisata alam, budaya, dan kuliner, yang dikemas dalam paket wisata terintegrasi.				
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kearifal lokal	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.				
	Penguatan peran keluarga dalam pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan				
	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Mendorong pendidikan keagamaan inklusif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dan toleransi dalam kurikulum sekolah, baik formal maupun non-formal, serta memfasilitasi kegiatan keagamaan yang menumbuhkan rasa persatuan				
	Inventarisasi dan dokumentasi Warisan Budaya				
	Mendorong penyelenggaraan festival budaya dan seni lokal secara rutin				
	Mendorong promosi budaya lokal melalui platform digital				
	Mendorong integrasi pendidikan budaya lokal dan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum pendidikan formal, baik di sekolah dasar hingga menengah.				
	Mendorong implementasi program pendidikan karakter yang menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran di semua jenjang pendidikan.				
Meningkatnya kesetaraan gender, taraf hidup keluarga, dan masyarakat yang inklusif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal				
	Peningkatan peran pemuda dalam Program Kesejahteraan Keluarga melalui karang taruna atau organisasi pemuda lainnya				
	Mendorong pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan dan akses modal, khususnya bagi keluarga kurang mampu				
	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan				
	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang				
	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan				
	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan				
	Peningkatan potensi pemuda dalam pengembangan teknologi, kemajuan kebudayaan, peningkatan inovasi dan kreatifitas				
	Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi				
	Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan				
	Peningkatan kualitas SDM pemuda dan olahraga yang adaptif dan berdaya saing global				
	Peningkatan peran pemuda sebagai agen perubahan sosial				
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan sumber daya alam dan penanganan polusi	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air melalui pelestarian daerah tangkapan air, dan mendorong penggunaan air secara efisien				
	Mendukung implementasi program konservasi untuk melindungi hutan, mangrove, dan daerah aliran sungai yang menjadi sumber utama air bersih dan pengatur iklim lokal				
	Menegakkan aturan tentang pembuangan limbah industri dan domestik ke sungai serta mengembangkan fasilitas pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan perkotaan dan industri				
	Mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang efektif, termasuk penerapan reduce, reuse, recycle (3R) serta mendorong pengolahan limbah industri dengan teknologi ramah lingkungan.				
	Memperketat regulasi dan standar lingkungan yang berlaku di tingkat kabupaten, termasuk penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk semua proyek pembangunan besar.				
	Meningkatkan kapasitas penegakan hukum dengan memperkuat pengawasan dan sanksi terhadap pelaku kegiatan yang merusak lingkungan, seperti penebangan liar dan pencemaran oleh industri.				
	Melakukan inspeksi dan audit lingkungan secara berkala untuk memastikan kepatuhan industri dan sektor lain terhadap regulasi lingkungan				
	Mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya/angin/mikrohidro sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil				
	Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH), taman kota, dan koridor hijau sebagai paru-paru kota untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak perubahan iklim				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Memfasilitasi penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan di sektor pertanian, industri, dan transportasi, seperti penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi hemat air				
	Mendorong program edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup di sekolah, komunitas, dan perusahaan, serta melakukan kampanye masif mengenai pengurangan sampah plastik, konservasi air, dan penanaman pohon.				
	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti penghijauan, program clean-up, serta pengawasan hutan desa dan hutan adat.				
	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kabupaten yang mencakup pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah.				
	Membentuk bank sampah di desa-desa dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS 3R) untuk meningkatkan pengumpulan dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan				
	Mengimplementasikan program pengurangan emisi gas rumah kaca, seperti reboisasi dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah iklim.				
	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana alam terkait iklim seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor melalui pelatihan dan penguatan sistem peringatan dini.				
	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah				
	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).				
	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan				



Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.				
	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.				
	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.				
	Pemantauan, evaluasi rutin dan penyusunan laporan terhadap efektivitas program dan kebijakan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas.				
Meningkatnya ketahanan energi terbarukan, pengelolaan air yang efektif, dan kemandirian pangan melalui inovasi	Mendorong penggunaan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya/tenaga angin/mikrohidro/biogas untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil				
	Peningkatan pemahaman masyarakat dan sektor industri tentang penggunaan teknologi hemat energi, seperti lampu LED, kendaraan listrik, dan alat-alat listrik efisien.				
	Peningkatan kemampuan sistem irigasi pertanian agar efisien, termasuk irigasi tetes dan irigasi sprinkler untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian				
	Mengimplementasikan pendekatan pengelolaan terpadu daerah aliran sungai (DAS) untuk melindungi sumber air dari hulu hingga hilir.				
	Mendorong pembangunan sumur resapan untuk menangkap dan menyimpan air hujan sebagai cadangan air saat musim kemarau.				
	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas				



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Bungo	Periode Pelaksanaan RPJMD			
		1	2	3	4
	Mendorong diversifikasi produksi pertanian dengan mengembangkan berbagai jenis tanaman lokal yang bernilai ekonomi tinggi dan tahan terhadap perubahan iklim, seperti sorgum, jagung, dan umbi-umbian.				
	Mendorong program desa mandiri energi dengan memanfaatkan potensi lokal seperti biogas dan energi surya serta mengembangkan program desa mandiri pangan melalui diversifikasi dan intensifikasi pertanian				
Meningkatnya sistem tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim melalui mitigasi	Melakukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi dan tingkat risiko bencana (banjir, gempa bumi, tsunami, longsor) untuk mengidentifikasi daerah yang paling rentan dan memprioritaskan upaya mitigasi di area tersebut.				
	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.				
	Mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi, serta memberikan pelatihan mengenai tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana.				



5.2.2 Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Indikator utama pembangunan adalah ukuran-ukuran kunci yang digunakan untuk menilai kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pemantauan dan peningkatan IUP secara konsisten akan membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan mengevaluasi efektivitas program pembangunan. Adapun IUP di Kabupaten Bungo untuk periode RPJPD Tahun 2025-2045 dan penyelarasan IUP Kabupaten Bungo dengan Provinsi Jambi dan Nasional disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 5.5
Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Bungo Tahun 2025-2045

No	Misi/Arah Pembangunan/Sasaran Pokok/Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal	Baseline 2025	Target 2030	Target 2035	Target 2040	Target 2045
TRANSFORMASI SOSIAL							
IE1	Kesehatan untuk Semua						
1.1	Sasaran Meningkatnya sistem Kesehatan Andal untuk Semua						
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,76	73,76	75,2	76,8	78,4	80
2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
	a) Angka Kematian Ibu (kasus kematian)	12	9	7	5	3	2
	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,7	13,7	3,0	2,8	2,6	2,5
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)						
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	89	90	100	100	100	100
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88	90	100	100	100	100
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89	93	100	100	100	100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata						
2.1	Meningkatnya Pemerataan Pendidikan Berkualitas						
5	Hasil Pembelajaran:						
	a) Nilai kompetensi literasi pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	- Sekolah Dasar (SD)	56,71	56,71	60,21	63,71	67,21	70,00
	- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	70,66	70,66	73,16	75,66	78,16	80,00
	Nilai kompetensi numerasi pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	- Sekolah Dasar (SD)	45,88	45,88	48,63	51,38	54,13	55,00 - 58,00
	- Sekolah Menengah Pertama (SMP)	69,54	69,54	71,04	72,54	74,04	75,00 - 78,00



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

	b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,39	8,39	9,29	10,19	11,09	12,00
	c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,66	12,66	13,19	13,73	14,27	14,81
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,41	11,53	13,65	15,76	17,88	20,00
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja sesuai lapangan usaha (%)	59,15	63,32	67,49	71,66	75,83	80,00
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif						
3.1	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif, Inklusif, dan Adil						
8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,29	5,00-5,20	3,75	2,5	1,5	0,50-0,57
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	55,66	55,56	66	76	86	96
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	NA	1	5	10	15	20
TRANSFORMASI EKONOMI							
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
4.1	Meningkatnya riset dan teknologi lokal untuk produktivitas ekonomi						
11	Produktivitas Industri dan Pertanian: Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,96	5,50 - 6,06	6,90 - 7,25	7,26 - 8,44	8,54 - 9,63	10,50 - 11,69
12	Pengembangan Pariwisata:						
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,58	2,61	2,69	2,77	2,85	2,93
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	45	50 - 100	100 - 350	350 - 550	550 - 800	800 - 1.000
13	Distribusi PDRB sektor tersier (%)	39,15	39,15	39,305	39,54	39,775	40,01
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:						
	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)						
	- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten	35,00	35,50	40,38	45,25	50,13	55,00
	- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten	29,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

	b) a) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,01	1,50	2,97	4,43	5,90	7,36
	c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,58	2,25	2,94	3,63	4,31	5,00
	d) Return on Asset (RoA) BUMD (%)	NA	15	23,75	32,5	41,25	50,00
15	Penciptaan lapangan kerja baik: Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,23	5,00 - 5,25	4,50	4,00	3,50	3,00 - 3,25
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,52	53,52	57,00	60,00	63,00	66,00
17	Tingkat Penguasaan IPTEK:						
	a) Pengeluaran iptek dan inovasi (persen APBD)	NA	0,5	0,75	1,00	1,25	1,50
	b) Indeks Inovasi Daerah	48,30 (Inovatif)	48,30 (Inovatif)	52,25 (Inovatif)	56,20 (Inovatif)	60,03 (Sangat Inovatif)	60,10 (Sangat Inovatif)
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau						
5.1	Meningkatnya ekonomi hijau dengan sumber daya berkelanjutan dan emisi rendah						
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:						
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	NA	73,61	77,87	82,13	86,39	90,65
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	15	30,62	40,47	50,31	60,16	70,00
IE6	Transformasi Digital						
6.1	Meningkatnya digitalisasi sektor publik untuk efisiensi dan transparansi						
19	Persentase ketersediaan akses dan infrastruktur TIK	15,9	18,5	20,4	40,8	73,6	100
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
7.1	Meningkatnya sinergi ekonomi lokal untuk daya saing daerah						
20	Indeks Harga Konsumen (IHK)	115,07	122,44	134,94	147,44	157,40	167,40
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	26,79	26,79 - 28,00	28,37	28,74	29,11	29,50 - 30,10
22	Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	18,88	18,88 - 20,05	20,35	20,65	20,95	21,01 - 22,30
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
8.1	Meningkatnya kemajuan kota dan desa untuk pertumbuhan ekonomi						
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:						
	a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	NA	56,00	67,00	78,00	89,00	100
	b) Persentase Desa Mandiri (%)	0,857	1,418	7,168	12,918	18,668	24,113



TRANSFORMASI TATA KELOLA

IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
9.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik dan investasi						
24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	1,95	2,6	3,5	4,0	4,5	5,0
25	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	(B-)	3,75 (B)	4,10 (A-)	4,40 (A-)	4,70 (A)	4,95 (A)
26	Berintegritas dan adatif: Survey penilaian integritas KPK (Nilai)	72,00	74,52	80,14	85,75	91,37	96,98
27	Pembangunan Hukum: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	66,1	70	75	80	85	90
MEMANTAPKAN STABILITAS DAERAH DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL							
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial						
10.1	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, keamanan dan demokrasi substansial						
28	Keamanan dan ketertiban: a) Persentase penegakkan perda K3 (Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban)	100	100	100	100	100	100
	b) Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	78	80	82,5	85	87,5	90
29	Angka kriminalitas	14,16	14,16	13	12,5	12	10,50
30	Penanganan Konflik: Persentase konflik sosial yang dilaporkan dan ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro						
11.1	Meningkatnya stabilitas ekonomi daerah melalui pengelolaan fiskal dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan						
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,39	0,39	0,54	0,69	0,84	0,99
32	Tingkat Inflasi (%)	2,85	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,25 ± 1	2,0 ± 1	2,0 ± 1
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan: Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	NA	0,08	0,45	0,82	1,18	1,55



IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan						
12.1	Meningkatnya kolaborasi regional untuk keamanan, stabilitas, dan pembangunan kompetitif						
34	Indeks daya saing daerah	2,98	2,98	2,98 - 3,32	3,32 - 3,66	3,66 - 4,00	4,00 - 4,50
35	Persentase kerja sama daerah ditindaklanjuti	95	95	97	99	100	100
MEMANTAPKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP							
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
13.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan kearifal lokal						
36	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	NA	60,15 - 60,23	60,23 - 61,93	61,93 - 63,63	63,63 - 65,58	69,58 - 70,29
37	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	65,17	65,81- 65,92	67,5	69	71	72,18 - 73,42
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
14.1	Meningkatnya kesetaraan gender, taraf hidup keluarga, dan masyarakat yang inklusif						
38	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	61,43 (Berkembang)	63,20 (Berkembang)	67,00 (Berkembang)	72,00 (Tangguh)	75,00 (Tangguh)	78,00 (Tangguh)
39	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,532	0,459	0,409	0,359	0,309	0,259
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas						
15.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan sumber daya alam dan penanganan polusi						
40	Kualitas Lingkungan Hidup:						
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,67	74,75	75,81	76,87	77,92	78,98
	b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	12,00	12,50	26,88	41,25	55,63	70,00
	c) Pengelolaan Sampah						
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	86	86	89	91,5	92	93
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	67	67	72	75	77	80
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
16.1	Meningkatnya ketahanan energi terbarukan, pengelolaan air yang efektif, dan kemandirian pangan melalui inovasi						
41	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan:						
	a) Ketahanan Energi						
	- Konsumsi listrik perkapita (Kwh)	533,79	540,56	572,36	600,72	625,34	645,87



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,54	8,30	7,51	6,79	6,15	5,56
	c) Ketahanan Air - Persentase Rumah Tangga dengan Akses ke Air Minum Layak	76,02	82,42	86,81	91,21	95,6	100
IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
17.1	Meningkatnya ketahanan energi terbarukan, pengelolaan air yang efektif, dan kemandirian pangan melalui inovasi						
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	130,20 (Sedang)	127,70 (Sedang)	125,20 (Sedang)	122,70 (Sedang)
45	Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ e)						
	a) Kumulatif	NA	68.267	72.480	76.694	80.907	85.120
	b) Tahunan	NA	842	4.845	8.848	12.850	16.853



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

Tabel 5.6

Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Nasional, Provinsi Jambi, dan Kabupaten Bungo

IUP RPJPN		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Provinsi Jambi		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Kabupaten Bungo		Baseline 2024	Target 2045							
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,4	80,0	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,14	79,39	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	73,76	80							
2	kesehatan ibu dan anak: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	2	kesehatan ibu dan anak: Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	107	15	2	kesehatan ibu dan anak: Jumlah Kematian Ibu (kasus kematian)	9	2							
a.				b.														
b.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0	b.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	11,5	3,5	b.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,7	2,5							
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):	272	76	3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk): a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	100	3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk): a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	100							
a.				b.														
b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment succes rate) (%)	91	100	b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment succes rate) (%)	91	100	b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment succes rate) (%)	90	100							
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89	99,5	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	93	100							
5	Hasil pembelajaran: Rata-rata nilai PISA			5	Hasil pembelajaran: persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - literasi membaca - numerasi			5	Hasil pembelajaran: Nilai kompetensi literasi pada asesmen tingkat nasional untuk: - SD - SMP									
a.				- membaca				396				485	- literasi membaca	9,09	63,64 - 72,73	- SD	56,71	70,00
				- matematika				404				490	- numerasi	0,00 - 2,00	45,45 - 54,54	- SMP	70,66	80,00
				- sains				416				487						
b.	Rata-rata nilai asesmen nasional			b.	persentase SMA/SMK yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				Nilai kompetensi numerasi pada asesmen tingkat nasional untuk:									



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

IUP RPJPN		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Provinsi Jambi		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Kabupaten Bungo		Baseline 2024	Target 2045
	- literasi membaca	62,89	75,73		- literasi membaca	25,45 - 27,45	65,31 - 67,31		- SD	45,88	55,00 - 58,00
	- numerasi	54,36	68,72		- numerasi	13,57 - 15,57	59,55 - 61,55		- SMP	69,54	75,00 - 78,00
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12,0	c.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,25	11,98 - 12,03	b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,39	12,00
c.	Harapan lama sekolah	13,32	14,81	d.	Harapan lama sekolah	13,32	14,75 - 14,78	c.	Harapan lama sekolah (tahun)	12,66	14,81
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	33,94	60,00	6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	10,21	10,21 - 11,39	6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,53	20,00
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	75,00	7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	57,2	75	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja sesuai lapangan usaha (%)	63,32	80,00
8	Tingkat kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	0,5 - 0,8	8	Tingkat kemiskinan (%)	7,45 - 7,52	3,5 - 5,5	8	Tingkat kemiskinan (%)	5,00 - 5,20	0,50 - 0,57
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	43,19	99,5	9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	29,94	81,44	9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten (%)	55,66	96
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	27	58	10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	1	20
11	Produktivitas Industri dan Pertanian			11	Produktivitas Industri dan Pertanian			11	Produktivitas Industri dan Pertanian		
	a) Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	20,8	28,0		Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	9,86 - 9,91	13,22 - 13,31		Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	5,50 - 6,06	10,50 - 11,69
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	3,2 - 3,4	3,3 - 4,2								
12 a.	pengembangan pariwisata Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0	12 a.	pengembangan pariwisata Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	1,21	2,06	12 a.	Pengembangan pariwisata Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	2,61	2,93



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

IUP RPJPN		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Provinsi Jambi		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Kabupaten Bungo		Baseline 2024	Target 2045		
b.	Devisa pariwisata (miliar USD)	22,1	100,0	b.	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)	5,66	14,15	b.	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	50 - 100	800 - 1000		
13	proporsi PDB Ekonomi kreatif (%)	7,92	11,00	13	Distribusi PDRB sektor tersier (%)	35,32	36,25	13	Distribusi PDRB sektor tersier (%)	39,15	40,01		
14 a.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)			14 a.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)				
					- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	11,46	16,6				- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kabupaten	35,50	55,00
					- proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	3,45	9				- proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Kabupaten	30,00	50,00
b.	Rasio kewirausahaan	3,14	8,0	b.	Rasio kewirausahaan provinsi	5,19	12	b.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,50	7,36		
c.	rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0	c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,22	6,5	c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	2,25	5,00		
d.	return on aset (ROA) BUMD (%)	3,4	5,6	d.	Return on aset (ROA) BUMD (%)	3,37	4,05	d.	Return on aset (ROA) BUMD (%)	15	50,00		
15	Penciptaan lapangan kerja baik Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 - 5,00	4,00	15	Penciptaan lapangan kerja baik			15	Penciptaan lapangan kerja baik				
				a.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,25 - 4,39	2,5 -3,1			a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00 - 5,25	3,00 - 3,25
				b.	Proporsi penciptaan lapangan kerja perempuan (%)	43	85						
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,30	70,0	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,8	65,2	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,52	66,00		
17 a.	Tingkat Penguasaan IPTEK Pengeluaran Iptek dan inovasi (persen PDB)	0,30	2,2 - 2,3	17	Tingkat Penguasaan IPTEK Pengeluaran Iptek dan inovasi (persen APBD)	0,32	0,45	17 a.	Tingkat Penguasaan IPTEK Pengeluaran Iptek dan inovasi (persen APBD)	0,5	1,50		
				b.	peringkat Indeks Inovasi Daerah (peringkat)	27	18					b.	Indeks Inovasi Daerah (Inovatif)



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

IUP RPJPN		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Provinsi Jambi		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Kabupaten Bungo		Baseline 2024	Target 2045
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			18	Tingkat penerapan ekonomi hijau		
a.	Indeks Ekonomi Hijau	70,80	90,65	a.	Indeks Ekonomi Hijau	73,61	92,8	a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	73,61	90,65
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	30,62	86,47	b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	30,62	70,00
19	Indeks Daya saing digital di tingkat global (peringkat)	43	20 besar	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,9	7,3	19	Persentase ketersediaan akses dan infrastruktur TIK	15,9	100
20	Biaya logistik (%PDB)	13,5	8,0	20	Koefisien Variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	7,78	4,96	20	Indeks Harga Konsumen (IHK)	122,44	167,40
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1 - 30,2	27,2	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19,1	12,9	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	26,79 - 28,00	29,50 - 30,10
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,0 - 21,6	40,0	22	Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	17,9	22,1	22	Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	18,88 - 20,05	21,01 - 22,30
23	Kota maju, inklusif dan berkelanjutan			23	Kota maju, inklusif dan berkelanjutan			23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:		
a.	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92	a.	Kontribusi PDRB PKN terhadap PDRB Provinsi (%)	13,9	14,5	a.	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,00	100
b.	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan (%)	67,00	100,0	b.	Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,84	100	b.	Persentase desa mandiri (%)	1,418	24,113
c.	Persentase desa mandiri (%)	4,00	16,25	c.	Persentase desa mandiri (%)	18,11	53,63				
24	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,12	5,00	24	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,19 (2022)	5	24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	2,6	5,0
25	Indeks pelayanan publik	3,68	5,00	25	Indeks pelayanan publik	4,04 (2022)	5	25	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,75 (B)	4,95 (A)
26	Anti Korupsi:			26	Indeks integritas provinsi (hasil SPI)	73,97	89,11	26	Berintegritas dan adatif:		
a)	Indeks Integritas Nasional	74,52	96,98						Survey penilaian integritas KPK (Nilai)	74,52	96,98
b)	Indeks Persepsi Korupsi	38	60								



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

IUP RPJPN		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Provinsi Jambi		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Kabupaten Bungo		Baseline 2024	Target 2045
27	Indeks Materi Hukum	0,51	0,71	27	Pembangunan Hukum: Indeks Reformasi Hukum	41,15	67,15	27	Pembangunan Hukum: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	90
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,69	0,89	28	keamanan dan ketertiban daerah: a. Persentase Perda yang ditegakan	100	100	28	keamanan dan ketertiban daerah: a. Persentase penegakkan perda K3 (Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban)	100	100
				b.	Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	70	90	b.	Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM	80	90
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5	80,0	29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	65,56	82,94	29	Angka Kriminalitas (jumlah kasus dilaporkan dibagi jumlah penduduk)	14,16	10,50
30	Indeks Demokrasi Indonesia	60 - 80	>80	30	Kerukunan dan toleransi:	sedang	tinggi	30	Penanganan Konflik: Persentase konflik sosial yang dilaporkan dan ditindaklanjuti	100	100
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	10,70 - 11,20	18,0 - 20,0	31	Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%)			31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,39	0,99
				a.	PAD terhadap pendapatan daerah (%)	44,64	48,8				
				b.	pajak Daerah terhadap PAD (%)	86,77	87,44				
				c.	retribusi Daerah terhadap PAD (%)	0,87	1,2				
d.	Rasio pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,2	2,1								
32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,5 ± 1	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1
33	pendalaman/intermediasi sektor keuangan:			33	pendalaman/intermediasi sektor keuangan:			33	pendalaman/intermediasi sektor keuangan:		
a.	Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200,0	a.	total dana pihak ketiga/PDRB (%)	18,5	56				
b.	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,0	60,0	b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,08	1,55		Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,08	1,55



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

IUP RPJPN		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Provinsi Jambi		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Kabupaten Bungo		Baseline 2024	Target 2045
c.	Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20,0	c.	nilai transaksi saham per kapita per provinsi (rupiah)	4.219.124	37.035.817,67				
d.	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120,0	d.	total kredit/PDRB (%)	18	54				
e.	total kredit/PDRB (%)	37,8	80 - 90								
34	inklusi keuangan (%)	91,0	98,0	34	Tingkat inklusi keuangan provinsi (%)	91,35	99,02				
35	<i>Asia Power Index (Military influence)</i>	16	45,0	35	Ketimpangan berkurang:			34	Indeks Daya Saing Daerah	2,98	4,00 - 4,50
				a.	Rasio Gini	0,337 - 0,341	0,31 - 0326				
				b.	Indeks Williamson	0,365	0,34				
				c.	Indeks daya saing infrastruktur	2,5	3,65				
36	<i>Asia Power Index (Diplomatic Influence)</i>	61,54	75,0 - 80,0	36	Persentase implementasi kerjasama daerah dari kerjasama yang dibangun	100	100	35	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	95	100
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,15 - 60,23	69,58 - 70,29	36	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,15 - 60,23	69,58 - 70,29
38	Indeks kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20	38	Indeks kerukunan Umat Beragama (IKUB)	65,81- 65,92	72,18 - 73,42	37	Indeks kerukunan Umat Beragama (IKUB)	65,81- 65,92	72,18 - 73,42
39	Indeks pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,00	39	Keluarga berkualitas:			38	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,20 (Berkembang)	78,00 (Tangguh)
				a.	Pembangunan keluarga berkualitas:						
					- Indeks pembangunan Kualitas Keluarga	72,41-72,42	77,52-77,63				
					- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,3	82				
				b.	Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta penduduk tumbuh seimbang						
	- Angka Kelahiran total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per WUS usia 15-49 Tahun	2,23	2,05								



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

IUP RPJPN		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Provinsi Jambi		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Kabupaten Bungo		Baseline 2024	Target 2045
					- Angka Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,74	81,73				
					- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,66	4,88				
					- Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility Rate/ASFR 15-19)	26,12	20,25				
40	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,425	0,15	40	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,5	0,25-0,23	39	Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,459	0,259
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati	0,44	0,75	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati Daerah	0,562	0,684				
42	kualitas Lingkungan Hidup			42	kualitas Lingkungan Hidup			40	kualitas Lingkungan Hidup		
a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68	75,15	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,29	74,91	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,75	78,98
b.	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	12,5	70,0	b.	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	12	50	b.	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	12,50	70,00
c.	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24	90	c.	Pengelolaan Sampah			c.	Pengelolaan Sampah		
		(16% terdaur ulang)	(35% terdaur ulang)		- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	16,56	85		- Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	86	93
					- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	24,89	100		- Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	67	80
43	ketahanan energi, air dan kemandirian pangan			43	ketahanan energi, air dan pangan			41	ketahanan energi, air dan pangan		
a.	ketahanan energi			a.	ketahanan energi			a.	ketahanan energi		
	- Indeks Ketahanan energi	6,77	8,24		- konsumsi listrik perkapita (Kwh)	696	3.080		- konsumsi listrik perkapita (Kwh)	540,56	645,87
					- intensitas energi primer	111	90				



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

IUP RPJPN		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Provinsi Jambi		Baseline 2024	Target 2045	IUP RPJPD Kabupaten Bungo		Baseline 2024	Target 2045
b.	prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of undernourishment</i>) (%)	7,21	0,77	b.	prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of undernourishment</i>) (%)	12,14	2,5	b.	prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of undernourishment</i>) (%)	8,30	5,56
c.	ketahanan air - akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,20	100	c.	ketahanan air - akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	34,66	100	c.	ketahanan air - Persentase Rumah Tangga dengan Akses ke Air Minum Layak	82,42	100
	- kapasitas tampungan air (m3/kapita)	65,18	200		- kapasitas air baku (m3/detik)	0,29	4,91				
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRE (%) - Indeks Resiko Bencana Provinsi	133,49	108,79-87,70	42	Indeks Risiko Bencana (IRB)	131,20 (Sedang)	122,70 (Sedang)
45	Persentase penurunan emisi GRK (%)			45	Persentase penurunan emisi GRK (%)			43	Intensitas emisi GRK (Ton CO2e)		
	- Kumulatif	28,12	51,51		- Kumulatif	20,63	44,53		- Kumulatif	68.267	85.120
	- tahunan	32,65	80,98		- tahunan	36,51	82,42		- tahunan	843	16.853



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan jangka menengah daerah maupun jangka pendek dalam rangka terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bungo untuk Tahun 2045 mendatang yaitu “BUNGO YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”. Visi pembangunan ini akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Kaidah pelaksanaan pembangunan ini meliputi 1) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan; 2) Kerangka Pengendalian; 3) Sistem Intensif; dan 4) Mekanisme Perubahan.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.



Proses perencanaan dan pendanaan yang dilakukan secara terpisah mengakibatkan muncul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan bias nya alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada inkonsistensi alokasi belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan.

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Pembangunan seharusnya menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh dan holistik.

6.1.2 Sistem Insentif

Dalam upaya penyusunan RPJPD yang inklusif dan partisipatif, Pemerintah Daerah menyadari pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan pelaku usaha. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan partisipasi yang aktif dan berkualitas dari berbagai pihak tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Daerah memutuskan untuk mengimplementasikan Sistem Insentif dalam proses penyusunan RPJPD. Sistem ini dirancang untuk memberikan insentif positif kepada individu atau kelompok yang berkontribusi secara signifikan dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang.

Salah satu bentuk insentif yang ditawarkan adalah penghargaan finansial bagi masyarakat atau organisasi yang memberikan masukan berkualitas dan inovatif dalam penyusunan RPJPD. Masukan tersebut dapat berupa ide-ide kreatif untuk pengembangan ekonomi lokal,



solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan, atau strategi untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan adanya Sistem Insentif ini, Pemerintah Daerah berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPJPD. Masukan dan ide-ide yang diperoleh dari masyarakat diharapkan dapat memperkaya dan menyempurnakan rencana pembangunan jangka panjang, sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

6.1.3 Kerangka Pengendalian

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan didalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di daerah dan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 tahunan dilaksanakan pengendaliannya melalui pengendalian terhadap dokumen jangka menengah dan dokumen jangka pendek. Pengendalian tersebut dilakukan terhadap kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi dalam upaya untuk mencapai target tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemerintah daerah, tujuan pemerintah daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJMN). Tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah. Pengendalian terhadap kemungkinan adanya



risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

- a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan. Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.
- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan penyebab, dampak, kategori dan sumber risiko sehingga bisa



dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

6.1.4 Mekanisme Perubahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo telah menyusun RPJPD yang komprehensif dan visioner untuk periode 20 tahun ke depan.



Namun, dalam jangka waktu yang panjang tersebut kondisi dan dinamika pembangunan dapat berubah secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan dan menyesuaikan RPJPD sesuai dengan perkembangan terkini. Dalam RPJPD, telah mengatur mekanisme perubahan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa RPJPD tetap relevan dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global.

Salah satu komponen utama dalam mekanisme perubahan adalah pembentukan Tim Evaluasi dan Penyesuaian RPJPD. Tim ini terdiri dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akademisi, praktisi, serta perwakilan masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Tugas utama Tim Evaluasi dan Penyesuaian RPJPD adalah:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi RPJPD.
2. Mengidentifikasi perubahan signifikan dalam lingkungan strategis, seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, pergeseran tren ekonomi, atau perubahan preferensi masyarakat.
3. Menganalisis dampak perubahan tersebut terhadap relevansi dan efektivitas RPJPD.
4. Mengusulkan penyesuaian atau revisi terhadap target, strategi, program, dan kegiatan dalam RPJPD jika diperlukan.

Dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian, Tim Evaluasi dan Penyesuaian RPJPD melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik, forum diskusi, dan mekanisme pengumpulan masukan secara *online* maupun *offline*. Masukan dan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam proses penyesuaian RPJPD. Setelah mengumpulkan data dan masukan, Tim Evaluasi dan Penyesuaian RPJPD akan menyusun rekomendasi perubahan yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk dibahas dan disahkan melalui mekanisme yang berlaku.



Mekanisme perubahan ini memastikan bahwa RPJPD tidak menjadi dokumen yang statis, melainkan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan pembangunan yang dinamis. Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan dapat menjaga relevansi dan efektivitas RPJPD dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.

6.1.5 Komunikasi Publik

Penyusunan RPJPD untuk periode 20 tahun ke depan, sebagai langkah awal membentuk tim penyusun yang terdiri dari berbagai perangkat daerah terkait dan perwakilan masyarakat. Tim ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, memetakan isu-isu strategis, dan merumuskan rencana pembangunan jangka panjang. Untuk memastikan partisipasi masyarakat dan membangun legitimasi, dilakukan serangkaian kegiatan komunikasi publik. Pertama, mereka mengadakan konsultasi publik untuk menampung aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi. Melalui metode komunikasi partisipatif, seperti diskusi kelompok terarah dan forum terbuka, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan.

Selain itu juga dilakukan survei dan kajian mendalam untuk mengidentifikasi isu-isu kritis, seperti lingkungan, kesenjangan sosial, dan pembangunan ekonomi. Dalam proses ini, dilakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, LSM, dan pelaku usaha, untuk memahami perspektif mereka dan mengintegrasikannya dalam rencana pembangunan. Setelah mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, selanjutnya melakukan analisis mendalam dan menyusun draft RPJPD. Draft ini kemudian disosialisasikan kembali kepada masyarakat melalui konsultasi publik lanjutan, dengan tujuan memvalidasi rencana dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat telah dipertimbangkan dengan baik.



Melalui proses komunikasi publik yang intensif dan partisipatif, pemerintah daerah Kabupaten Bungo berharap dapat menghasilkan RPJPD yang legitimate, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Komunikasi publik yang efektif tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi rencana pembangunan jangka panjang di daerah.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

6.2.1 Pembiayaan Sektor Publik

Penyusunan RPJPD yang komprehensif dan realistis membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang. Dengan visi pembangunan jangka panjang yang ambisius, diperlukan strategi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mewujudkannya. Salah satu langkah awal yang diambil adalah melakukan pemetaan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber-sumber lain seperti kerjasama dengan pihak swasta. Sumber-sumber pembiayaan tradisional tersebut mungkin tidak akan mencukupi untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJPD. Oleh karena itu, dilakukan strategi pembiayaan alternatif yang inovatif.

Salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah penerbitan obligasi daerah atau *municipal bond*. Obligasi daerah ini dapat menarik investasi dari sektor swasta dan masyarakat untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan jangka panjang yang direncanakan dalam RPJPD. Selain itu, bentuk mengembangkan skema kerjasama pemerintah dan swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) dalam pembangunan infrastruktur. Dengan skema ini, pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembiayaan, pembangunan, dan pengelolaan aset-aset publik seperti jalan, pelabuhan, atau fasilitas kesehatan dan pendidikan.



Untuk menarik minat investor dan mitra swasta, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah, serta berencana untuk memperkuat regulasi dan insentif fiskal yang mendukung investasi jangka panjang, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyusunan RPJPD ini juga memasukkan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan memberikan sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan untuk pembangunan jangka panjang. Dengan strategi pembiayaan yang komprehensif dan inovatif, diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD. Pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan akan memungkinkan implementasi program dan kegiatan yang berkualitas, serta menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

6.2.2 Pembiayaan Sektor Non Publik

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo menyadari bahwa selain mengandalkan pembiayaan dari sektor publik, tetapi perlu juga melibatkan sumber-sumber pembiayaan dari sektor non-publik atau swasta. Salah satu strategi yang dicanangkan adalah mendorong investasi swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang direncanakan dalam RPJPD. Untuk menarik minat investor swasta, dilakukan komitmen untuk memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, insentif fiskal, dan peningkatan layanan perizinan.

Selain itu, upaya untuk memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal, nasional, dan internasional dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah seperti pariwisata, industri kreatif, dan pertanian. Kemitraan ini diharapkan dapat menarik investasi swasta



dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan sumber daya manusia, serta transfer teknologi dan pengetahuan. Dalam sektor pariwisata, misalnya, berencana untuk menawarkan skema konsesi atau kerjasama dengan investor swasta dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata unggulan. Investor swasta dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan fasilitas akomodasi, transportasi, serta promosi dan pemasaran pariwisata.

Di sektor pertanian, mengajak perusahaan-perusahaan agribisnis untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi pertanian modern, sarana irigasi, serta fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Kemitraan dengan sektor swasta ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian daerah. Untuk memfasilitasi pembiayaan sektor non-publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo juga berencana untuk mengembangkan skema pendanaan alternatif seperti *crowdfunding* dan kemitraan dengan lembaga keuangan non-bank. Skema-skema ini dapat menjadi sumber pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek sosial dan lingkungan yang dicanangkan dalam RPJPD. Melalui keterlibatan sektor non-publik dalam pembiayaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo berharap dapat mewujudkan visi pembangunan jangka panjang secara lebih efektif dan berkelanjutan. Kemitraan dengan sektor swasta tidak hanya dapat menyediakan sumber pembiayaan tambahan, tetapi juga mendorong inovasi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

6.2.3 Manajemen Investasi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD, pentingnya pengelolaan investasi yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo membentuk Tim Manajemen Investasi yang terdiri dari perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, akademisi, dan praktisi investasi. Tugas utama Tim Manajemen



Investasi adalah mengidentifikasi peluang investasi yang sejalan dengan prioritas pembangunan dalam RPJPD, serta menyusun strategi untuk menarik dan mengelola investasi secara optimal. Langkah awal yang dilakukan adalah memetakan potensi investasi di sektor-sektor unggulan daerah, seperti pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan infrastruktur.

Untuk menarik minat investor, Tim Manajemen Investasi berkoordinasi dengan OPD terkait dalam menyiapkan regulasi yang kondusif, insentif fiskal, serta kemudahan perizinan dan layanan investasi terpadu. Mereka juga melakukan promosi dan pemasaran investasi secara aktif, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu strategi utama yang ditetapkan adalah mengembangkan skema kerjasama pemerintah dan swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dicanangkan dalam RPJPD. Skema ini memungkinkan investor swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan, konstruksi, dan pengelolaan aset-aset publik dengan jangka waktu tertentu.

Untuk memastikan pengelolaan investasi yang transparan dan akuntabel, Tim Manajemen Investasi menyusun pedoman dan kriteria penilaian yang ketat dalam proses seleksi investor dan mitra swasta. Aspek-aspek seperti rekam jejak perusahaan, kemampuan finansial, serta dampak sosial dan lingkungan menjadi pertimbangan utama. Selain itu, Tim Manajemen Investasi juga bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja investasi secara berkala. Mereka memastikan bahwa proyek-proyek investasi berjalan sesuai dengan rencana, memenuhi standar kualitas, dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Dalam mengelola investasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bungo
Tahun 2025-2045

Melalui pengelolaan investasi yang optimal, diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan jangka panjang secara lebih efektif dan berkelanjutan. Investasi yang masuk tidak hanya menjadi sumber pembiayaan, tetapi juga mendorong transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.


BURATI BUNGO,

MASHURI